



UNIVERSITAS INDONESIA

**ALUN-ALUN DI PUSAT KOTA *GEMEENTE* DI PESISIR
UTARA JAWA PADA AWAL ABAD XX MASEHI**

SKRIPSI

**YOKI RENDRA PRIYANTOKO
0704030496**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ALUN-ALUN DI PUSAT KOTA *GEMEENTE* DI PESISIR
UTARA JAWA PADA AWAL ABAD XX MASEHI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora

**YOKI RENDRA PRIYANTOKO
0704030496**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI
DEPOK
JANUARI 2010**

ii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 7 Januari 2010



(Yoki Rendra Priyantoko)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yoki Rendra Priyantoko

NPM : 0704030496

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Yoki Rendra Priyantoko
NPM : 0704030496
Program Studi : Arkeologi Indonesia
Judul : Alun-alun di Pusat Kota *Gemeente* di Pesisir
Utara Jawa pada awal Abad XX M

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana humaniora pada Program Studi Arkeologi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Irmawati M. Johan

(.....)

Penguji : Tawalinudin Haris, M.Hum

(.....)

Penguji : Kresno Yulianto, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
NIP 131.882.265



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, ilmu, dan karunia-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini terselesaikan. Shalawat juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan nikmat Islam dan menjadi tauladan serta sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan. Hormat dan sayang saya sampaikan kepada Bapak (Sukirman), Ibu (Indrayani) dan adikku (Wira Dwi Satria Pambudi dan Vita Ayu Mahareni) serta sepupuku (Istiqomah) yang senantiasa mendukung dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya selama belajar di Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Arkeologi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan, yang tidak mudah dilalui tanpa bantuan banyak pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meskipun tidak semuanya dapat disebutkan dalam tulisan singkat ini dan penulis mohon dimaafkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Ibu Irmawati Marwoto Johan yang telah membimbing dan mendampingi dengan penuh kesabaran sebagai Dosen, ibu, dan kakak. Terima kasih dan salut juga kepada dosen-dosen penguji, Mas Tawal dan Mas Anto yang masukan dan koreksiannya sangat penting demi perbaikan skripsi dan penelitian ini.
2. Terima kasih kepada dosen-dosen pengajar yang juga senantiasa mendukung penulis dalam studi di arkeologi, terutama Mbak Ninie Soesanti, Mbak Oyen (pembimbing akademik yang penuh semangat), Mas Eddy (yang selalu menanyakan kapan lulus?), Mas Isman, Mas Cecep, Mas Nana, dan Mas Abe.
3. Adikku Gaya Mentari yang menyemangati dan menemani dalam mendewasakan diri dengan senantiasa memunculkan tantangan-tantangan berpikir baru. Semoga aya mendapatkan yang dicita-citakan di masa

depan. Manfaatkan usia beliamu untuk mengenal dunia yang penuh tantangan ini dan menjadi yang terbaik.

4. Nur Janah Dwi Setyawati yang dengan sabar memberikan dukungan dan inspirasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dwi dapat menyelesaikan studinya di arkeologi dengan baik dan mencapai cita-cita yang diimpikan.
5. Sahabat-sahabatku Andy Handriana, Maria Artanti, Prima Rafika, Adhi Agus Oktaviana, Danny Radiansyah, Maharani Qadarsih, Dimas Setyo Saputro, Atina Winaya, Annisa (emak), M. Iqbal Johansyah, cewek 08 aneh (Nita, Addissya, Fina, dan Tika), Hutomo Putra dan Aryo F. (antara Fa*in* dan Fe*ri*nto), Doyog (Yogi Abdi Nugroho) dan Virta (Permata), Chusnul Chotimah (Inul). Kalian adalah inspirator, teman diskusi, dan pemberi ide jahil yang seru selama di kampus.
6. Teman-teman arkeologi 2004; Ustadz Andy yang kredibilitasnya mulai dipertanyakan, Profesional muda Danny yang penuh semangat transmigrasi, artis terkenal Dimas, Wina Ndut yang tak lagi gendut, Rani *big foot*, Dhamsky kalem, Ricky sok suci! (Ocha, 2004: 1) dan Bertus ganteng, Balsky the reporter, Myris centil, Alin imut, Sasa Goceng dan Kunta whoey, Tieva Baik, Anya Anya, Lina (le), Wiew wkwkwk, Ocha (pek deh!), Sekar (ung) goni, Yano Coach, Bunga ipeh dan Ajo BIPA Korea, Daniel Gokil, Rino transformer (Vespa->Matic), Yuli the Teacher, Gauz Chirebon, Surya The Lost People, Bowie dan Terbang, Tommy one big pack, Dita ladur, Prita si ibu, Andre yang pernah ada, Abel tak tau rimbanya, Nisa mak-mak.
7. Teman-teman arkeologi lainnya; Wira Pratama yang kaya raya, terima kasih atas pinjaman komputernya selama menyelesaikan penulisan skripsi. Anjali dan Alvin semoga kalian cepat lulus dan berhenti membuat gossip lagi, Ayi, Rangga yang suka maen ke kosan. Sang seniman Arkhi, dan Devi Dham yang cukup menghibur saat bermain di kosan bersama teman saya. Inul (a.k.a Chusnul Chotimah), Terryana (a.k.a Terrylia), Fifi dan Mitha semangat ya kuliah di arkeologi.

8. Seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Arkeologi (KAMA) yang telah mengajarkan saya banyak hal di luar studi selama di kampus. Terutama kepada teman-teman yang pernah mengisi kepengurusan KAMA tahun 2006 dan 2007 serta semua Ketua Pelaksana dan Panitia kegiatan yang telah melaksanakan program kerja dengan baik. Spesial untuk penasehat kepengurusan KAMA 2006 dan 2007, Mbak Inge, Irdiansyah, dan Bagus. Kalian adalah inspirasi dalam menjalankan organisasi arkeologi ini dan terima kasih telah menemani sampai akhir kepengurusan.
9. Pak Endang yang meminjamkan berbagai peralatan untuk kebutuhan studi dan kelulusan saya serta memberikan semangat supaya saya cepat meninggalkan kampus ini. Mamat, Ocoy, dan Benny yang menjadi teman baik di kukusan.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Budpar; Mas Yani, Pak Diman, Bu Ani, Bu Ita, Arum dan Pak satpam galeri nasional yang membiarkan saya sedikit berkarya selama 2 tahun terakhir.
11. Terakhir ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga besar di Jawa Timur yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses studi saya, keluarga besar S. Nur Muin di Bengkulu dan Uwak Iis di Bogor. Saya sangat bersyukur berjumpa kalian di dunia ini. Terima kasih semuanya!!!

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoki Rendra Priyantoko
NPM : 0704030496
Program Studi : Arkeologi
Departemen : Arkeologi
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Alun-alun di Pusat Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa pada Awal Abad XX Masehi

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang Menyatakan



(Yoki Rendra Priyantoko)

ABSTRAK

Nama : Yoki Rendra Priyantoko
Program Studi: Arkeologi
Judul : Alun-alun di Pusat *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa pada Awal Abad XX Masehi

Skripsi ini membahas mengenai pola yang tampak pada alun-alun dan bangunan di Pusat Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa yang dikenali dengan adanya alun-alun dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Penelitian dilakukan untuk mengungkap letak alun-alun dan keberadaan bangunan-bangunan di semua sisi alun-alun yang dikaitkan dengan perubahan status administrasi pemerintahan kota dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hasil analisis tersebut tidak menemukan pola bangunan pada semua *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa tetapi terdapat bangunan lama yang tetap dipertahankan posisinya meskipun kota-kota tersebut telah mengalami perubahan status administrasi pemerintahan.

Kata kunci:

Gemeente, Desentralisasi, Pusat Kota, Alun-alun

ABSTRACT

Name : Yoki Rendra Priyantoko
Study Programe : Archaeology
Title : The Square at *Gemeente* Center at the North Coast of Java at the Beginning of XX Century AD

This thesis discusses the patterns that appear square and building at the City Center *Gemeente* in the North Coast of Java that are recognized by the square and the buildings around it. The study was conducted to reveal the location of the square and the presence of buildings on all sides of the square which is associated with changes in the status of the city administration of centralization to decentralization. The results of analysis does not find the pattern at all *Gemeente* buildings in the North Coast of Java, but there are old buildings will be retained his position despite these cities have changed the status of public administration.

Key words:

Gemeente, Decentralization, City Center, Square

DAFTAR ISI

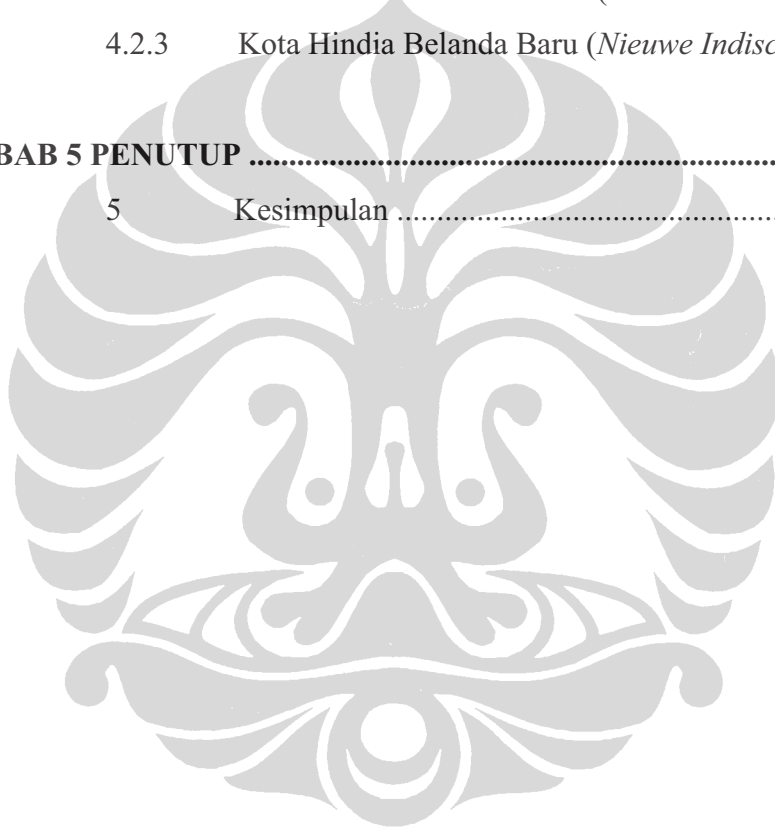
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Riwayat Penelitian	6
1.3 Permasalahan	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Landasan Berpikir	10
1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Pengumpulan Data	13
1.7.2 Pengolahan Data	16
1.7.3 Penafsiran Data	17
1.8 Kerangka Penelitian	18
BAB 2 GEMEENTE DI PESISIR UTARA JAWA AWAL ABAD XX	
MASEHI	21
2.1 Pemerintahan Kolonial di Jawa	21
2.1.1 Faktor Administrasi Kewilayahan	23
2.1.1.1 Pemerintahan Kota di Jawa Sebelum 1901	28
2.1.1.2 Pemerintahan Kota di Jawa Setelah 1901	32
2.1.2 Faktor Kependudukan	37
2.1.2.1 Penduduk Pribumi	37
2.1.2.2 Penduduk Asing	39
2.2 Kota <i>Gemeente</i>	41
2.2.1 Batavia dan Meester Cornelis	42
2.2.1.1 Stadhuis dan Stadhuisplein	48
2.2.1.2 Museum Senirupa dan Keramik (<i>Raad van Justice</i>)	49
2.2.1.3 Museum Wayang (Gereja Belanda Baru)	49
2.2.1.4 Kantor Pos Stadhuisplein	50
2.2.1.5 <i>Koningsplein</i>	51

2.2.1.6	Istana Merdeka dan Istana Negara	55
2.2.1.7	Balaikota (<i>Koningsplein Zuid</i>)	56
2.2.1.8	Stasiun <i>Weltevreden</i>	56
2.2.1.9	Pasar Gambir	57
2.2.2	Cirebon	57
2.2.2.1	Alun-alun Kejaksaan.....	60
2.2.2.2	Rumah Dinas Bupati	60
2.2.2.3	Balaikota	60
2.2.2.4	Tajug Agung (Masjid At Taqwa)	61
2.2.2.5	Hotel Wilhelmina	61
2.2.3	Tegal	61
2.2.3.1	Alun-alun	62
2.2.3.2	Masjid Agung Tegal	64
2.2.3.3	Balaikota Tegal	64
2.2.3.4	Stasiun Tegal	64
2.2.4	Pekalongan	64
2.2.4.1	Alun-alun	68
2.2.4.2	Balaikota Pekalongan	68
2.2.4.3	Masjid Agung Jami Pekalongan	68
2.2.4.4	Pendopo	68
2.2.5	Semarang	69
2.2.5.1	Alun-alun	71
2.2.5.2	Masjid Agung Kauman Semarang	71
2.2.5.3	Pasar Johar	72
2.2.5.4	Kantor Pos	73
2.2.6	Surabaya	74
2.2.6.1	Gereja Katolik Roma (<i>Roman Chatolic Church</i>)	76
2.2.6.2	Gedung Bank Mandiri (<i>Lindeteves Stokvis</i>)	76
2.2.6.3	Kantor Pengadilan	77
2.2.6.4	Kantor Pos dan Telegraf	77
2.2.6.5	Kantor Gubernur	77
2.2.6.6	Alun-alun Ketabang dan Balaikota Surabaya	78

2.2.7	Pasuruan	80
2.2.7.1	Alun-alun	80
2.2.7.2	Kantor Pos	82
2.2.7.3	Masjid Agung Pasuruan	82
2.2.7.4	Menara Air	83
2.2.8	Probolinggo	84
2.2.8.1	Alun-alun	86
2.2.8.2	Masjid Agung Roudatul Jannah Probolinggo	87
2.2.8.3	Stasiun Kereta Api Probolinggo	87
2.2.8.4	Pendopo	88
2.2.8.5	Penjara	89
BAB 3 PUSAT KOTA <i>GEMEENTE</i>		91
3.1	Bangunan di sekitar Alun-alun kota <i>Gemeente</i>	97
3.1.1	Alun-alun, dan Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	107
3.1.1.1	Balaikota (Kantor <i>Burgemeester</i>)	107
3.1.1.2	Pendopo	110
3.1.2	Alun-alun, dan Fasilitas Transportasi	112
3.1.2.1	Stasiun Kereta Api dan Pelabuhan	112
3.1.2.2	Jalan	115
3.1.3	Alun-alun, dan Fasilitas Perekonomian (Pasar)	118
3.1.4	Alun-alun dan Fasilitas Publik Lainnya	120
3.1.4.1	Masjid	121
3.1.4.2	Gereja	122
3.1.4.3	Kantor Pos	123
3.1.4.4	Penjara	123
3.1.4.5	Jaringan Pipa dan Sumur Artesis	124
3.1.4.6	Menara Air	124
3.1.4.7	Tempat Rekreasi	124
3.2	Bangunan disekitar Alun-alun berdasarkan Periodenya	127

BAB 4 POLA PUSAT KOTA *GEMEENTE* DI PESISIR UTARA

JAWA	131
4.1 Pola Alun-alun	132
4.1.1 Alun-alun yang bukan Bagian Bangunan	136
4.1.2 Alun-alun bagian Bangunan	138
4.2 Pola Berdasarkan Morfologi Awal Kota	140
4.2.1 Kota Kolonial Awal	141
4.2.2 Kota Hindia Belanda Lama (<i>Oud Indische Stad</i>)	144
4.2.3 Kota Hindia Belanda Baru (<i>Nieuwe Indische Stad</i>) ...	145
BAB 5 PENUTUP	147
5 Kesimpulan	147



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Peta Kota <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	14
Tabel 2.1 Kronologi Struktur Pemerintahan Hindia Belanda di Jawa...	25
Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Asing di Hindia-Belanda tahun 1860-1930	40
Tabel 3.1 Alun-alun pada Kota <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	93
Tabel 3.2 Bangunan dekat Alun-alun Kota <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	98
Tabel 3.3 Balaikota <i>Gemeente</i> di Jawa	108
Tabel 3.4 Pendopo pada <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	111
Tabel 3.5 Fasilitas Transportasi Kota <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa ..	114
Tabel 3.6 Daftar Jalan yang Melewati Alun-alun Kota <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	116
Tabel 3.7 Pasar di dekat Alun-alun Kota <i>Gemeente</i>	119
Tabel 3.8 Masjid di dekat Alun-alun	121
Tabel 3.9 Bangunan Gereja di dekat Alun-alun	122
Tabel 3.10 Kantor Pos	123
Tabel 3.11 Lokasi Wisata dan Hotel di <i>Weltevreden</i> tahun 1920	125
Tabel 3.12 Periode Pendirian Bangunan di sekitar Alun-alun Kota <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	127
Tabel 4.1 Bangunan di dekat Alun-alun <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	135
Tabel 4.2 Bangunan terhadap Alun-alun yang bukan bagian suatu Bangunan	136
Tabel 4.3 Bangunan di dekat Alun-alun yang merupakan bagian suatu Bangunan	138
Tabel 4.4 Bangunan di dekat Alun-alun Kota Kolonial Awal	142
Tabel 4.4 Bangunan di dekat Alun-alun Kota Hindia Belanda Lama.....	144

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Jalur Kereta Api di Jawa	24
Peta 2.2 Pusat Kota Batavia 1914	43
Peta 2.3 Letak bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Kota Batavia Lama	47
Peta 2.4 <i>Koningsplein</i> di Kawasan <i>Weltevreden</i>	53
Peta 2.5 Letak Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas di <i>Weltevreden</i> ..	54
Peta 2.6 Kawasan Alun-alun Kejaksaan <i>Gemeente</i> Cirebon	59
Peta 2.7 Letak Alun-alun <i>Gemeente</i> Tegal	63
Peta 2.8 Letak Alun-alun <i>Gemeente</i> Pekalongan	67
Peta 2.9 Letak Alun-alun <i>Gemeente</i> Semarang	70
Peta 2.10 Letak Alun-alun Kepanjen Surabaya	75
Peta 2.11 Letak Alun-alun Ketabang Surabaya	79
Peta 2.12 Letak Alun-alun <i>Gemeente</i> Pasuruan	81
Peta 2.13 Letak Alun-alun <i>Gemeente</i> Probolinggo	85
Peta 3.1 Alun-alun kota <i>Gemeente</i> di Jawa dan Bangunan di Sekitarnya	
(a)	102
Peta 3.1 Alun-alun kota <i>Gemeente</i> di Jawa dan Bangunan di Sekitarnya	
(b)	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alun-alun <i>Gemeente</i> di Pesisir Utara Jawa	96
Gambar 3.2 Denah Keletakan bangunan pada Alun-alun kota <i>Gemeente</i> di Jawa berdasarkan peta lama (a).....	101
Gambar 3.3 Denah Keletakan bangunan pada Alun-alun kota <i>Gemeente</i> di Jawa berdasarkan peta lama (b)	103



DAFTAR FOTO

Foto 2.1 Museum Sejarah Jakarta	48
Foto 2.2 Museum Senirupa dan Keramik (<i>Raad van Justice</i>)	49
Foto 2.3 Museum Wayang	50
Foto 2.4 Kantor Pos <i>Stradhuisplein</i>	50
Foto 2.5 Balaikota <i>Gemeente Batavia</i>	56
Foto 2.5 Pasar Gambir tahun 1921	57
Foto 2.7 Balaikota Cirebon	61
Foto 2.8 Alun-alun dengan latar belakang Masjid Kauman Semarang	71
Foto 2.9 Masjid Kauman Semarang	72
Foto 2.10 Pasar Johar Semarang	73
Foto 2.11 Kantor Pos Semarang	73
Foto 2.12 Gereja Katolik Roma Kepanjen, Surabaya	76
Foto 2.13 Gedung Bank Mandiri Surabaya	77
Foto 2.14 Kantor Gubernur dan Karesidenan	78
Foto 2.15 Kantor Pos Pasuruan	82
Foto 2.16 Masjid Agung Pasuruan	82
Foto 2.17 Menara Air Pasuruan	83
Foto 2.18 Alun-alun Probolinggo	86
Foto 2.19 Masjid Agung Roudatul Jannah Probolinggo	87
Foto 2.20 Stasiun Kereta api Probolinggo	87
Foto 2.21 Pendopo Bupati Probolinggo	88
Foto 2.22 Penjara Probolinggo	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang beragam. Pengertian alun-alun tidak terbatas pada lapangan terbuka, dan masih terdapat pengertian lainnya. Menurut Van Romondt (Haryoto, 1986:386), pada dasarnya alun-alun merupakan halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Biasanya rumah penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana dan camat bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam hal pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan dan pendidikan. Lebih jauh Thomas Nix menjelaskan bahwa alun-alun merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan titik awal dan hal yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Tetapi jika terdapat lahan terbuka yang dibiarkan tersisa dan disebut alun-alun, hal demikian bukan merupakan alun-alun yang sebenarnya. Jadi alun-alun bisa di desa, kecamatan, kota maupun pusat kabupaten (Nix, 1949:105-114).

Arsitektur setiap kota yang menjadi area publik (ruang terbuka publik) dan sebagai penunjuk pusat kota dibuat dalam bentuk lahan alun-alun¹. Ruang publik dipahami sebagai ruang yang diperuntukkan sebagai sebuah ruang kota yang dapat diakses secara umum dan cuma-cuma oleh masyarakat kota dari berbagai lapisan (Shirvani, 1985: 60). Paul Zucker (1959) menyatakan bahwa alun-alun (*square*) adalah tempat orang-orang berkumpul untuk bersosialisasi, melindungi mereka dari hiruk-pikuk lalu-lintas, membebaskan mereka dari tekanan kesibukan di pusat kota (Carmona, 2003: 144). Pendapat lain menyatakan alun-alun (*square*) adalah mikrokosmos dari kehidupan, menawarkan daya tarik, peristirahatan, pasar dan upacara rakyat, tempat untuk berjumpa teman dan menghabiskan waktu (Webb, 1990: 150). Secara fisik alun-alun (*square*) adalah areal yang dibingkai

(dikelilingi) oleh bangunan-bangunan untuk memamerkan bangunan disekitarnya sebagai karya agung (Moughtin, 2003: 63). Kota harus memiliki ruang untuk penempatan bangunan umum, tempat bertemu yang utama, tempat untuk perayaan atau upacara umum, tempat untuk pertunjukan, restoran, tempat untuk berbelanja, pasar, dan etalase, tempat dimana bangunan kantor mengelompok, tempat akomodasi rumah tinggal, tempat yang berhubungan dengan simpul-simpul transportasi. Suatu alun-alun (*square*) dapat berfungsi sebagai tempat aktifitas komersial seperti pasar, kegiatan budaya, tempat berdirinya kantor pelayanan umum (Krier, 1979: 58).

Arsitektur kota tersebut dapat dilihat dalam skala keruangan makro dan mikro. Pada skala makro arsitektur berarti berkaitan dengan konteks perencanaan kota, desain tata kota, dan arsitektur lanskap. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan bangunan-bangunan di dalam kota yang dibangun bersamaan atau berbeda periode. Sedangkan dalam skala mikro, arsitektur berkaitan dengan detail konstruksi, komponen bangunan, dan peralatan kelengkapan bangunan. Skala mikro tersebut berkaitan dengan bentuk fisik alun-alun dan detail-detail bangunan yang ada di dalamnya (Moerdjoko, 2005: 100). Sedangkan skala meso (semi-mikro), arsitektur berkaitan dengan alun-alun dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Hal tersebut digunakan untuk melihat bentuk fisik alun-alun dan bangunan-bangunan di sekitarnya.

Untuk memfasilitasi aktivitas sosial masyarakat sebagai area publik yang berada di pusat suatu daerah diperlukan adanya ruang publik berupa alun-alun tersebut. Maka keberadaan alun-alun tersebut juga dikelilingi bangunan-bangunan penting yang berkaitan dengan pemerintahan atau penguasa. Oleh sebab itu alun-alun menjadi perhatian yang cukup penting dari sebuah arsitektur perencanaan kota dan aspek budaya fisik dari sebuah kota. Mengingat alun-alun tumbuh dan berkembang seiring dengan latar belakang budaya kota. Di dalam studi ini arkeologi perkotaan digunakan sebagai pendekatan untuk menjawab permasalahan peran alun-alun pada kota-kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa dengan metode keruangan. Arkeologi adalah ilmu yang berkaitan dengan keadaan sosial budaya masa lalu melalui peninggalan-peninggalan benda dan memiliki tujuan untuk

merekonstruksi aspek-aspek kehidupan masa lalu (Fagan, 1975: 7; Sharer, R.J. dan W. Ashmore, 1979; 11), salah satunya adalah bentuk okupasi manusia pada suatu lokasi di muka bumi. Terdapat berbagai bidang kajian arkeologi yang berkaitan dengan keberadaan okupasi manusia, diantaranya adalah arkeologi pemukiman, arkeologi perkotaan, arkeologi lingkungan, dan lain sebagainya.

Arkeologi perkotaan (*urban archaeology*) adalah studi arkeologi yang terpusat pada pusat aktivitas penduduk. Baik kota yang masih dihuni hingga saat ini maupun kota yang telah tidak ada atau tidak dihuni lagi. Kota yang masih dihuni dapat berupa kota tua dari beberapa periode yang lalu dan masih bertahan hingga sekarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bangunan-bangunan tua disela-sela bangunan baru. Sedangkan untuk kota yang telah ditinggalkan dapat berupa sisa kota yang benar-benar kosong dan tertinggal reruntuhannya atau kota yang telah tidak ada dan terkubur tanah namun di atasnya didirikan kota yang sama sekali baru (Roger., 1999: 6). Bentuk perkotaan tersebut juga terdapat di Pulau Jawa, sebagai contoh Kota Trowulan yang telah hilang dan saat ini tumbuh permukiman baru di atasnya yang tidak lagi berkaitan dengan Trowulan di masa lalu.

Kota-kota Jawa Awal² (Wertheim, 1951: 24—40; Rahardjo, 2007: 31—34; Handinoto, 2008: 2) telah dirintis dari adanya permukiman-permukiman zaman prasejarah yang muncul seiring perubahan budaya hingga kota yang kompleks ketika kerajaan-kerajaan kuno tumbuh (Soejono, ed., 1990:255, 286). Dilihat dari hierarki kota-kota pada masa kuno tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: ekonomi, politik, dan kebudayaan. Meskipun dimasa awal tersebut, ekonomi bukanlah faktor yang utama, sehingga kekuasaan negara tidak terlalu berkaitan dengan penguasaan ekonomi. Hubungan ekonomi dan politik merupakan hal berbeda yang tidak proporsional. Hal tersebut membuat kaum penguasa di Jawa tidak harus berhubungan dengan faktor kepemilikan tanah atau kekayaan dan akhirnya legitimasi penguasa yang ada tidak memerlukan penguasaan di bidang ekonomi (Santoso, 2008: 23; Rahardjo, S. 2002: 33). Alun-alun telah menjadi bagian dari arsitektural kota-kota pada masa tersebut.

Kota memiliki berbagai komponen yang merupakan bagian dari perkembangan sejarahnya sebagai sebuah pemukiman, antara lain: pemerintahan, fasilitas sosial dan publik, sarana dan prasarana, pusat ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu komponen fasilitas sosial dan publik yang ada di setiap kota di dunia, dan di Jawa pada khususnya adalah alun-alun kota (Handinoto, 1992: 1). Hampir setiap tempat kediaman bupati, seorang kepala distrik di Jawa, orang selalu menjumpai adanya sebuah lapangan rumput yang luas, dikelilingi oleh pohon beringin yang juga terdapat di bagian tengahnya. Lapangan tersebut yang dinamakan “alun-alun”. Kota-kota sisa kerajaan kuno (seperti Surakarta dan Yogyakarta), mempunyai dua buah “alun-alun”, sebuah terletak di Utara Keraton dan sebuah lagi terletak disebelah Selatan Keraton. Rumput tidak boleh tumbuh dan ditutup dengan pasir halus di permukaan alun-alun tersebut (Paulus, 1917:31).

Pintu masuk yang menuju ke tempat kediaman raja atau bupati, di lokasi tersebut berdiri sebuah pendopo di sebelah Selatan alun-alun tersebut. Pegawai negeri atau orang-orang lain yang ingin bertemu dengan raja atau bupati menunggu waktunya di tempat tersebut untuk dipanggil, jika raja merestui untuk menerima kedatangan mereka. Oleh sebab itu pendopo tersebut kadang-kadang dinamakan juga Paseban (asal kata *seba*). Berbagai permaianan diadakan di alun-alun tiap hari Sabtu atau Senin (Seton atau Senenan) diadakan permainan Sodoran (pertandingan diatas kuda dengan menggunakan tombak yang ujungnya tumpul), atau pertandingan macan secara beramai-ramai yang dinamakan “*rampog macan*”. Raja duduk di Siti Inggil pada waktu pertunjukan, tempat yang paling tinggi di depan pintu Kraton. Pada tempat-tempat bupati terdapat panggung untuk melihat tontonan tersebut. Daerah Jawa Barat juga terdapat alun-alun kecil di depan rumah kepala desa, tapi alun-alun tersebut tidak dikelilingi oleh pohon beringin. Masjid seringkali terdapat disebelah Barat dari alun-alun (Handinoto, 1992: 2).

Setelah dikuasainya Pulau Jawa oleh Belanda pada masa selanjutnya, kota-kota awal tumbuh sebagai kota dengan arsitektur yang lebih baru dipengaruhi oleh adanya kolonial Belanda. Sistem pemerintahan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah kerajaan atau kesultanan lokal, tapi juga terdapat pemerintahan Hindia Belanda yang turut mengatur administratif di daerah

kerajaan atau kesultanan. Masa pemerintahan kolonial tersebut memunculkan kebudayaan Indis (*Indisch*) yang mempengaruhi bentuk arsitektural kota juga. Pengaruh tersebut berupa dibuatnya bangunan-bangunan Indis dalam satu kota dengan bangunan keraton. Perekonomian telah menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan kota. Perkembangan selanjutnya, dikenal pula arsitektur yang dianggap sebagai arsitektur kota Jawa yang mendapat pengaruh westernisasi (Handinoto, 1998: 2) atau arsitektur kota kolonial (Rahardjo, 2002: 20). Arsitektur kota kolonial tersebut muncul sebagai akibat bertambahnya penduduk dan percepatan laju perekonomian pada kota-kota di Pulau Jawa.

Sistem pemerintahan di Hindia Belanda juga berubah pada awal abad ke-20 dengan adanya Desentralisasi. Hal tersebut juga memunculkan banyak perubahan pada wajah kota-kota di Jawa. Muncul kota-kota *Gemeente* yang memiliki hak otonomi mengatur daerahnya. Sehingga beberapa daerah mulai membangun perluasan kotanya dan mendirikan pusat kota yang baru atau membangun pusat kota yang lama (Handinoto, 1996: 19).

Pemilihan Pusat *Gemeente* di Pesisir Jawa abad XIX-XX Masehi karena pada masa tersebut situasi politik, ekonomi, dan keamanan di Jawa setelah selesainya Perang Jawa (1825-1830 M) memiliki pengaruh terhadap morfologi (bentuk dan struktur) kota-kota di Pulau Jawa. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro (1830) peta wilayah kekuasaan kerajaan Mataram berubah. Kecuali Kesultanan Jogjakarta dan Kesunanan Surakarta yang berstatus semi merdeka, wilayah mancanegara Timur diurus langsung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (Zuhdi, S. 2002: 8).

Pulau Jawa sejak zaman Majapahit adalah pusat dari kebudayaan dan memiliki kompleksitas perkembangan kota-kotanya, dan pengaruhnya meluas hingga ke luar Jawa. Namun, fokus penelitian hanya terpusat melihat bentuk dan peran alun-alun kota *gemeente* awal abad XX di Pesisir Utara Jawa yang dipengaruhi perkembangan morfologi kota. Meskipun sejak dulu sampai sekarang bentuk fisik alun-alunnya sendiri tidak banyak mengalami perubahan, tapi bentuk fisiknya sejak periode pra-kolonial sampai sekarang telah mengalami banyak

perubahan. Konsep inilah yang sebetulnya menentukan alun-alun dalam suatu kota di Jawa (Handinoto. 1992: 2).

Setelah penguasaan Belanda atas wilayah Jawa, perekonomian merupakan faktor pendorong yang dianggap cukup kuat untuk mempengaruhi perubahan kebudayaan dan fisik sebuah kota. Perubahan fisik tersebut berupa pendirian bangunan baru untuk menggantikan bangunan-bangunan lama, juga justru pembangunan pusat kota yang baru. Pembangunan pusat kota yang baru tersebut pada beberapa kota seperti Malang, dan Surabaya, tetap mempertahankan keberadaan kota lamanya. Maka keberadaan alun-alun dalam kota yang terpusat pada perekonomian perlu ditelusuri lebih mendalam untuk menelusuri pola alun-alun dan bangunan di sekitarnya yang dipengaruhi perkembangan kota tersebut.

1.2 Riwayat Penelitian

Perkotaan di Jawa mulai dari tumbuhnya permukiman prasejarah hingga muncul kota-kota Jawa Awal. Kemudian masa-masa berikutnya kota-kota tersebut berkembang lagi menjadi kota-kota kolonial, yang tetap mempertahankan bangunan asli atau sama sekali berubah menjadi kota baru. Oleh sebab itu dalam menyusun penelitian digunakan acuan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kota-kota Jawa Awal dan Kolonial.

Penelitian Arkeologi Perkotaan Mataram Islam oleh Inajati Adrisijanti (2000) yang membahas mengenai latar belakang konsep perkotaan masa dari Mataram dengan berbagai komponen-komponennya.

Supratikno Rahardjo (2002), mengungkapkan penelitian mengenai Peradaban Jawa yang dilihat dari sudut pandang dinamika pranata politik, agama, dan ekonomi Jawa kuno yang sebenarnya adalah disertasi program doktoral arkeologi di Universitas Indonesia tahun 2001. Tahun 2007 penulis yang sama juga melakukan penelitian mengenai Kota-kota Prakolonial Indonesia: pertumbuhan dan keruntuhan. Penelitian tersebut diterbitkan oleh penerbitan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Hal yang disampaikan mengenai bentuk-bentuk dan gambaran kota-kota di Indonesia.

Pola permukiman kota pernah diteliti oleh Sri Narni (1995) dengan topik Keanekaragaman Pola Permukiman di Daerah Terjal Studi Kasus: Candi Semarang. Penelitian tersebut merupakan Tesis pada program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Sedangkan penelitian mengenai alun-alun di sampaikan oleh Moerdjoko (2005) yang membahas mengenai Alun-alun ruang publik bersejarah dan konservasi.

1.3 Permasalahan

Perkembangan arsitektur kota ditandai dengan adanya penambahan bangunan-bangunan baru dalam sebuah kota yang secara administratif juga dapat berubah. Bangunan baru tersebut dapat saja muncul sebagai ganti bangunan lama yang telah hancur atau dihancurkan, tetapi ada juga yang benar-benar dibangun di tempat yang berbeda tanpa merusak bangunan lama. Sehingga fungsi dan peran bangunan-bangunan tersebut terhadap bangunan lain di dalam sebuah tatanan perkotaan dapat mengalami perubahan atau sebaliknya.

Sebuah kota berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduknya, termasuk perubahan sistem politik atau yang berkaitan dengannya. Pertumbuhan yang bertambah sering ditemukan di berbagai kota. Penduduk berpindah ke pusat kota yang dominan untuk menjadi pegawai administrasi, tentara, seniman, dan pekerja. Produksi dan perdagangan semakin intensif karena kota tersebut mengalami penambahan produksi, dan karena kota yang otonom dapat menjadi pasar juga (Renvrew, C., dan Bahn, P., ed., 2005: 77).

Alun-alun merupakan hasil pengaruh arsitektur kota-kota pendahulunya dan masih masuk dalam kategori kota-kota arsitektural pada kota-kota Jawa Awal. Bentuk perkotaan masa Islam masih dipengaruhi oleh kota Majapahit (Santoso, Jo., 2008: 21). Namun, pada perkembangannya banyak faktor yang merubah wajah kota-kota di Pulau Jawa. Faktor tersebut antara lain adalah pengaruh dari adanya perubahan sistem pemerintahan dari periode pemerintahan pribumi hingga kolonial. Pada periode-periode tersebut berkembang juga kebudayaan arsitektur kota dan menyebabkan adanya penambahan bangunan dan pemindahan pusat-pusat pemerintahan.

Perkembangan budaya arsitektur kota yang merubah wajah kota di Jawa. Terutama kota-kota besar dan memiliki peran penting bagi kota-kota lainnya. Pertumbuhan arsitektur kota-kota di Jawa dapat dibagi menjadi 4 periode menurut latar belakang budayanya, antara lain: (1) arsitektur Jawa awal, (2) arsitektur Indis, (3) arsitektur Kolonial, dan (4) arsitektur Modern (Wertheim, 1951; Rahardjo, 2007: 31—34; Handinoto, 2008: 2).

Berakhirnya perang Jawa (1825-1830 M) telah membuat kekuasaan kolonial Belanda meluas di Pulau Jawa. Hal tersebut mempengaruhi morfologi kota-kota di Jawa karena adanya pembangunan-pembangunan fasilitas pemerintahan Hindia Belanda yang baru dikota-kota di Jawa. Selain itu perubahan perekonomian juga meningkat dengan adanya Tanam Paksa (1840-1870) di berbagai daerah di Pulau Jawa oleh gubernur jendral Van Den Bosch (Pusponegoro, M.D., 2008: 352). Perubahan morfologi kota-kota tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perubahan peran alun-alunnya, terutama pada kota-kota besar.

Alun-alun merupakan fasilitas publik yang ada disebagian besar kota-kota di dunia, dan Jawa khususnya. Hal tersebut juga berlaku pada alun-alun sebagai bagian dari arsitektur kota Islam di Jawa. Alun-alun sebuah kota dapat saja memiliki fungsi wilayah umum (lapangan tempat berkumpulnya warga kota), sekaligus halaman bangunan (keraton, istana, kantor pemerintahan, dan sebagainya), dan ikon sebuah kota (*mark point*). Namun, memiliki susunan sesuai dengan perkembangan morfologi kota, dan arsitektur bangunan-bangunan lainnya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dititikberatkan pada permasalahan: Bagaimana pola bangunan disekitar Alun-alun *Gemeente* di Pesisir Pantai Utara Jawa pada awal abad XX?

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pulau Jawa memiliki beragam kota yang tumbuh dari masa awal hingga masa kolonial. Kota-kota tersebut mengalami beberapa kali perubahan wajah kota seiring perkembangan arsitektural yang dipicu oleh pergantian sistem pemerintahan dan administrasi, serta perkembangan budaya dan ekonomi

penduduknya. Hal yang dapat di amati adalah peran alun-alun terhadap bangunan-bangunan lain yang terus tumbuh pada kota-kota pusat *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa. Kota-kota tersebut adalah kota-kota besar di Jawa bagian Barat, Tengah dan Timur yang dihubungkan dalam satu poros jalan dan rel kereta.

Alun-alun dan bangunan disekitarnya menjadi objek penelitian karena dari sebagian besar kota-kota yang tumbuh dari masa awal hingga kolonial, sehingga alun-alun dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendeteksi bentuk pusat kota dan perkembangannya.

Keberadaan kota sebagai tempat bermukim di masa awal sudah terdeteksi dari masa prasejarah dengan adanya artefak-artefak dari masa perundagian. Artefak-artefak tersebut berupa gerabah, dan benda-benda logam menunjukkan adanya kelompok undagi dengan bidang-bidang kerja tersendiri, selain kelompok petani. Hasil produksi mereka selain dipergunakan sendiri, tampaknya juga dipertukarkan sebagaimana terbukti dari temuan-temuan moko dan manik-manik dari berbagai situs di Indonesia (Soejono, ed., 1990:255, 286). Ciri sebuah kota adalah adanya kegiatan perekonomian (Weber, 1966:66—67), kemajemukan penduduk dari segi tempat asal dan jenis-jenis pekerjaan yang pada masa itu belum luas, dapat disimpulkan kota pada masa prasejarah merupakan tahap awal (Inajati, 2000: 5). Dalam hal ini pada masa prasejarah mungkin lebih sesuai disebut embrio kota yang pada saatnya nanti menjadi sebuah kota dengan kompleksitasnya.

Perkotaan di Indonesia selanjutnya muncul pada masa klasik yang data-datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, misalnya naskah kesusastraan di sampaikan oleh Pigeud (1960 III: 9—11), dan berita Cina diungkapkan oleh Groeneveldt (1960: 10—12) (Inajati, 2000: 6). Pada masa ini perkotaan di Indonesia secara umum dan di Jawa secara khusus masih merupakan masa awal pembentukan. Sumber berupa dokumen juga diperoleh dari peta-peta yang dibuat pada masa tersebut.

Fokus penelitian akan membahas pola bangunan di sekitar alun-alun kota pada masa pemberlakuan *Gemeente* pada kota-kota di Pesisir Utara Pulau Jawa. Perubahan ekonomi juga terjadi akibat diberlakukannya *cuturestetsel* diberbagai

tempat di Jawa. Pemusatan penduduk juga mulai nampak diberbagai kota besar di Jawa seperti Jakarta (Batavia), Semarang, Surabaya, Malang, dan Bandung. Adanya 3 kelompok etnis, yaitu Pribumi (Jawa), Cina, dan Eropa (Belanda) di dalam suatu kota maka terdapat perubahan sistem tata kotanya. Diikuti keterlibatan Belanda dalam pemerintahan kota-kota di Jawa membuat munculnya bangunan-bangunan kolonial ditengah bangunan pribumi. Alun-alun Kota Islam di Jawa akan dianalisis pada saat perkembangan arsitektur Kota Kolonial Awal, kota Hindia Belanda Lama (*Oud Indische Stad*), dan arsitektur Hindia Belanda Baru (*Nieuwe Indische Stad*) (Handinoto, 1998: 5).

Akhir dari perkembangan arsitektur tersebut adalah ketika terjadi perkembangan bangunan-bangunan pemerintahan baru yang dianggap pengaruh eropa. Bangunan-bangunan baru tersebut dibentuk sebagai wujud perluasan kota karena terjadi ledakan penduduk. Sehingga sistem pemerintahan berubah menjadi otonom di setiap kota. Pada saat ini peran alun-alun berubah lagi terhadap bangunan-bangunan baru. Kota-kota tersebut tumbuh sebagai akibat adanya ledakan penduduk dan akhirnya memunculkan kebijakan otonomi administratif pemerintahan yang dikenal dengan *gemente* (Handinoto, 1998: 6-7).

Penelitian ini hanya membahas pola keletakan bangunan dan alun-alun kota *gemeente* di Jawa awal abad XX Masehi karena untuk kota modern tentunya masih terus berkembang hingga saat ini dan belum mencapai bentuk akhirnya. Arus globalisasi membawa kota-kota tersebut untuk terus membangun³. Selain itu, terdapat jeda pembangunan kota yang melambat terjadi selama 30 tahun antara tahun 1950 hingga 1980, sebelum memasuki pembangunan kota modern yang signifikan.

1.5 Landasan Berpikir

Alun-alun memiliki pengertian yang beragam, pengertian tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk menjelaskan lebar data dan skala penelitian. Pengertian-pengertian tersebut mencakup alun-alun dalam konteks sebuah kota.

Penelitian arkeologi berdasarkan adanya bukti-bukti peninggalan masa lalu yang dapat berbentuk: artefak, fitur, ekofak, dan situs. Artefak adalah objek

bergerak yang terbentuk oleh aktivitas manusia. Fitur adalah artefak yang tidak dapat dipindahkan dari konteksnya. Sedangkan ekofak adalah materi nonartefaktual yang tidak mempunyai kaitan relevan dengan budaya. Artefak dapat berasal dari bahan yang berada di lingkungan seperti batu atau tanah yang diubah menjadi alat (kapak atau gerabah) oleh manusia. Sedangkan fitur dapat berbentuk makam, sisa bangunan, atau jalan yang dapat rusak bila dipindahkan (Sharer, R.J., 2003: 120).

Ekofak tidak terbentuk dari aktivitas manusia, tapi memiliki informasi yang signifikan tentang kebiasaan manusia masa lalu. Ekofak berbentuk lingkungan dan tempat binatang dan tumbuhan yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia masa lalu. Bukti-bukti tersebut ditemukan berupa tulang, kulit, atau polen. Situs adalah kumpulan artifak, fitur dan ekofak dalam satu satuan keruangan. Namun, tidak semua komponen tersebut harus ada dalam satu situs. Batasan dari sebuah situs arkeologi dapat berupa batas buatan, alam, maupun batas yang dibuat oleh peneliti (Sharer, R.J., 2003: 120—124).

Bila memperhatikan pengertian tersebut, maka alun-alun merupakan salah satu data arkeologi yang berupa fitur yang keberadaannya dapat diketahui melalui ciri-ciri fisiknya yang berbentuk tanah terbuka dan terdapat lapisan pasir yang menahan tumbuhnya rumput di lapangan tersebut. Selain itu, keberadaan alun-alun juga dapat dikenali dengan keberadaan bangunan-bangunan di sekitarnya. Namun, hal tersebut belum cukup kuat sehingga keberadaan alun-alun pada masa lalu dapat di telusuri pada peta-peta kuno. Oleh sebab itu pendekatan *historical archaeology* diperlukan untuk mengetahui keberadaan alun-alun tersebut.

Terdapat 2 konsep mengenai alun-alun dan bangunan-bangunan disekitarnya. Konsep pertama menjelaskan mengenai wujud alun-alun adalah lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung sebagai bagian dari bangunan. Bangunan tersebut dapat berbentuk rumah atau kantor tempat penguasa setempat. Konsep tersebut disampaikan oleh Van Romondt (Haryoto, 1986: 386), Thomas Nix (1949: 105-114), Rob Krier (1979: 58), dan Cliff Moughtin (2003: 63).

Konsep kedua memberikan pengertian bahwa alun-alun merupakan area publik yang menunjukkan pusat kota berfungsi sebagai tempat aktifitas komersial seperti pasar, kegiatan budaya, tempat berdirinya kantor pelayanan umum. Konsep kedua tersebut disampaikan oleh Hamid Shirvani (1985: 60), Paul Zucker (Carmona, 2003: 114), Michael Webb (1990: 150), dan Rob Krier (1979: 58).

Kedua konsep tersebut memberikan landasan bahwa dalam penataan sebuah kota, dapat menganut salah satu dari konsep tersebut atau keduanya. Penerapan konsep tersebut tergantung pada periode pembangunannya dan tujuan pembuatan alun-alun yang dapat terlihat dalam konteks alun-alun dan bangunan-bangunan sekitarnya.

Maka dalam mengkaji pola pusat kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa akan melihat alun-alun dari kedua sudut pandang tersebut. Sehingga terlihat perbedaan antara alun-alun yang merupakan bagian dari bangunan dan alun-alun yang terpisah dengan bangunan sekitarnya, namun tetap menjadi bagian dari arsitektur kota. Pola tersebut diharapkan dapat terlihat dari keletakan bangunan-bangunan disekitar alun-alun yang akan memberikan konteks alun-alun dalam sebuah kota.

Status *gemeente* yang sama pada setiap kota seharusnya memberikan kesamaan hak dalam membangun dan menyusun kota masing-masing. Namun, dalam perkembangan setiap kota sebelum menjadi *gemeente* memiliki kondisi dan morfologi awal kota yang berbeda. Kondisi tersebut berpengaruh pada bentuk arsitektur pusat kotanya pada masa *gemeente*. Kondisi tersebut juga dapat terlihat dari keletakan dan keberadaan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun pada masa *gemeente*. Secara morfologi, kota-kota tersebut dapat dibagi ke dalam arsitektur Kota Kolonial Awal, Kota Hindia Belanda Lama, dan Kota Hindia Belanda Baru (Handinoto, 1998: 5, Rahardjo, 2007: 31—34).

Pola pusat kota yang dalam hal ini berorientasi pada alun-alun akan tampak dalam dua sudut pandang tersebut. Pola pertama melihat alun-alun berdasarkan konsep dan pengertian alun-alun. Pola kedua melihat alun-alun berdasarkan morfologi awal kota sebelum pemberlakuan *gemeente*. Kedua sudut pandang tersebut akan memberikan gambaran terhadap kondisi alun-alun pada kota-kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa.

1.6 Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian tersebut, antara lain:

1. Menjelaskan mengenai bentuk bangunan di sekitar alun-alun berkaitan dengan perkembangan arsitektural kota.
2. Membagi area-area penting berkaitan dengan posisi alun-alun pada kota sebagai pusat kegiatan publik pada kota-kota *gemeente* di Jawa.

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, baik akademis maupun non akademis. Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Sebagai sumber informasi sejarah alun-alun dan penataan kota untuk kepentingan penelitian-penelitian lain di bidang arkeologi maupun non-arkeologi.
2. Menghasilkan gambaran bentuk pusat kota pada masa *Gemeente*.
3. Memberikan pertimbangan mengenai zona pusat kota yang harus dilestarikan atau dikembangkan.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian mengenai alun-alun kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa merupakan penelitian arkeologi perkotaan. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai bentuk alun-alun serta pola bangunan-bangunan di sekitarnya. Penelitian tersebut dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) pengolahan data, dan (3) penafsiran data.

1.7.1 Pengumpulan Data

Sesuai dengan batasan penelitian ini, maka yang menjadi data penelitian adalah peta dan denah kota-kota Jawa serta informasi mengenai bentuk-bentuk bangunan yang terdapat di kota-kota tersebut. Peta kota *gemeente* berasal dari tahun 1905—1942 atau tepatnya masa pemberlakuan *gemeentestaad* oleh

pemerintah hindia Belanda. Peta tersebut merupakan koleksi dari Okuhama University, Jepang, yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Peta Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa
(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

No.	Kota	Judul Peta	Peta		
			Sumber	Tahun	Keterangan
1	Batavia	Batavia (Oud)	<i>Okuhama University</i>	1927-1928	Blad 36/XXXVII B (oud No. 17 B)
		Batavia en Omstreken	<i>The University of Chicago Library</i>	1934	
		Batavia en Tandjoeng Priok	<i>World War II Armed Forces – Orders of Battle and Organizations</i>	1935	
		Batavia	<i>Departement of Railways, Tokyo, Japan 1920</i>	1920	
2	Cirebon	Residen Chirebon	<i>Okuhama University</i>	1921	Blad I A
		<i>Hoofdplaats Cheribon</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1921	
3	Tegal	Residen Pekalongan	<i>Okuhama University</i>	1921	Blad V B en D
		<i>Java Res. Pekalongan (Spoeddruk)</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1918	Blad V h/m
4	Pekalongan	Residen Pekalongan	<i>Okuhama University</i>	1920	Blad XIII D
		<i>Java Res. Pekalongan</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1918	Blad XIVE
5	Semarang	Semarang	<i>Okuhama University</i>	1937	Blad 47/XXXIX D No. XXI D
		Semarang	<i>Departement of Railways, Tokyo, Japan</i>	1917	

No.	Kota	Judul Peta	Peta		
			Sumber	Tahun	Keterangan
			<i>1920</i>		
		Semarang	<i>World War II Armed Forces – Orders of Battle and Organizations</i>	1935	
		<i>Kaart van Semarang</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1935	
		Semarang en Environs	<i>Semarang.nl</i>	1930	
6	Surabaya	Soerabaja	<i>Departement of Railways, Tokyo, Japan 1920</i>	1920	
		Soerabaja	<i>World War II Armed Forces – Orders of Battle and Organizations</i>	1935	
		Soerabaja	<i>Okuhama University</i>	1923-1924	Blad 54/XL D en 55/XL C (oud No. LXIII D en LXIX C)
		<i>Gemeente Soerabaja</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1934	
7	Pasuruan	Pasoeroean	<i>Okuhama University</i>	1936	Blad 55/XLI C (oud No. LXX C)
		<i>Java Res. Pasoeroean</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1935	<i>Blad LXXo</i>
8	Probolinggo	Residen Pasoeroean	<i>Okuhama University</i>	1923	Blad LXXVII A. (oud No. XLII-56 A)
		Probolinggo	<i>De Indische Stad op Java en Madoera, R. Gill</i>	1940	
		<i>Peta Java Res. Pasoeroean (Oude Res. Probolinggo)</i>	<i>The Royal Tropical Institute</i>	1914	<i>Blad H.III en IV.</i>

Universitas Indonesia

Informasi yang digunakan difokuskan pada bentuk tata kota berorientasi pada keberadaan alun-alun serta bangunan di sekitar alun-alun. Maka foto-foto bangunan di sekitar alun-alun merupakan data penunjang yang cukup penting. Data penunjang lainnya berupa kronologi sejarah perkembangan kota. Pengumpulan data deskripsi dan foto-foto alun-alun dari berbagai sisi dengan metode survey lapangan. Di dalam kegiatan tersebut juga sekaligus mengumpulkan informasi mengenai bangunan-bangunan di sekitar alun-alun.

Data-data mengenai peta dan denah kota-kota di Jawa diperoleh dari pemetaan lama dan baru. Pemetaan lama diperoleh dari foto-foto dan arsip peta yang dibuat pada masa kolonial, sedangkan peta baru diperoleh dari pencitraan satelit yang di unduh dari *Google Earth*. Sedangkan titik yang menjelaskan keberadaan alun-alun dan bangunan-bangunan di sekitarnya di tandai dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)*. Maka dalam pengumpulan data tersebut sangat mengandalkan pendekatan *Geographical Information System (GIS)* untuk arkeologi. Selanjutnya, titik-titik yang diperoleh diklasifikasi berdasarkan jenis bangunan dan periode pembangunannya. Data tersebut juga dilengkapi dengan pengumpulan denah dan peta kuno dari kota-kota Jawa. Sehingga diperoleh lapisan-lapisan latar belakang arsitektural bangunan-bangunan kota. Data tersebut merupakan bentuk 2 Dimensi terhadap muka bumi digunakan untuk penentuan titik yang dapat menggambarkan pola.

1.7.2 Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan baik peta, gambar, maupun foto-foto kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan keruangan pada arkeologi perkotaan. Arkeologi perkotaan adalah cabang ilmu arkeologi yang khusus mempelajari situs-situs kota.

Pendekatan lain untuk menelusuri keberadaan alun-alun pada masa *gemeente* yang digunakan adalah *historical archaeology*. *Historical archaeology* juga digunakan untuk menguraikan permasalahan tentang keruangan dan

keterkaitan titik-titik di dalamnya pada skala tertentu (Hall, M., & Stephen Silliman.W., ed. 2006: 65). Hal tersebut digunakan untuk menyusun gambaran pusat *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa, sehingga tingkat bentuk dan pola bangunan disekitar alun-alun pada saat pemberlakuan *gemeente* dapat terukur. *Historical Archaeology* adalah studi tentang sumber daya materi yang ditelusuri melalui sumber tertulis dengan menyusun silsilah menggunakan disiplin arkeologi (Paulo, ed, 1999: 1—2). Susunan keruangan kota dapat direkonstruksi kembali dengan berpedoman pada data-data sejarah untuk memperkuat keotentikannya. Data tersebut berupa peta yang dibuat pada periode yang bersangkutan, sehingga bangunan yang ada maupun yang telah hilang pada saat ini dapat ditelusuri kembali.

Perkembangan sebuah kota dilihat secara fisik dan dikaitkan dengan manusia, tinggalan budaya, dan keruangan yang dilihat dari berbagai sudut pandang (Hall, M., & Stephen Silliman.W., ed. 2006: 66). Alun-alun menjadi pusat orientasi semua kota yang diteliti sehingga ada keseragaman sudut pandang dalam melihat setiap kota. Hal tersebut berguna untuk generalisasi simpulan mengenai bentuk dan peran alun-alun pada perkembangan kota-kota pusat perekonomian di Jawa pada masa kolonial.

Uraian bentuk penempatan bangunan di sekitar alun-alun dapat dianalisis menggunakan pendekatan arkeologi keruangan (*spatial archaeology*). Bentuk penataan bangunan akan memperlihatkan pola bangunan-bangunan yang berada di sekitar alun-alun kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa awal abad XX Masehi.

1.7.3 Penafsiran Data

Setelah semua data diolah, maka langkah selanjutnya adalah penafsiran data. Pendekatan arkeologi perkotaan digunakan untuk menafsirkan data mengenai bentuk dan pola bangunan disekitar alun-alun pada kota-kota *gemeente* di pesisir utara Jawa. Pola tersebut akan menggambarkan wujud penataan kota pada masanya.

Penafsiran pertama, diperoleh dari hasil pembuatan denah alun-alun dan bangunan di sekitarnya. Selanjutnya penyusunan tumpang tindih (*overlay*) denah

antar kota. Alun-alun menjadi orientasi atau titik tengah dalam tumpang tindih peta tersebut. Tumpang tindih peta antar kota digunakan untuk menafsirkan pola alun-alun dan bangunan disekitarnya. Perkembangan tersebut akan tergambar dan pada akhirnya membagi kota-kota ke dalam pola-pola perkembangan fisik tertentu.

Arkeologi Perkotaan akan digunakan untuk menjelaskan kaitan antara keletakan bangunan berdasarkan fungsinya terhadap keberadaan alun-alun. Selain itu juga, dilihat keberadaan bangunan terhadap periode pembangunannya. Sehingga pola penempatan bangunan di sekitar alun-alun dapat tergambar sebagai bentuk tata kota pada masa *gemeente*. Termasuk perubahan dan pengaruh kebijakan *gemeente* terhadap tata kotanya di sekitar alun-alun tersebut.

1.8 Kerangka Penelitian

Penelitian mengenai Pusat *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa awal Abad XX Masehi tersebut terdiri dari 5 bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian, riwayat penelitian, ruang lingkup penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan kerangka penelitian

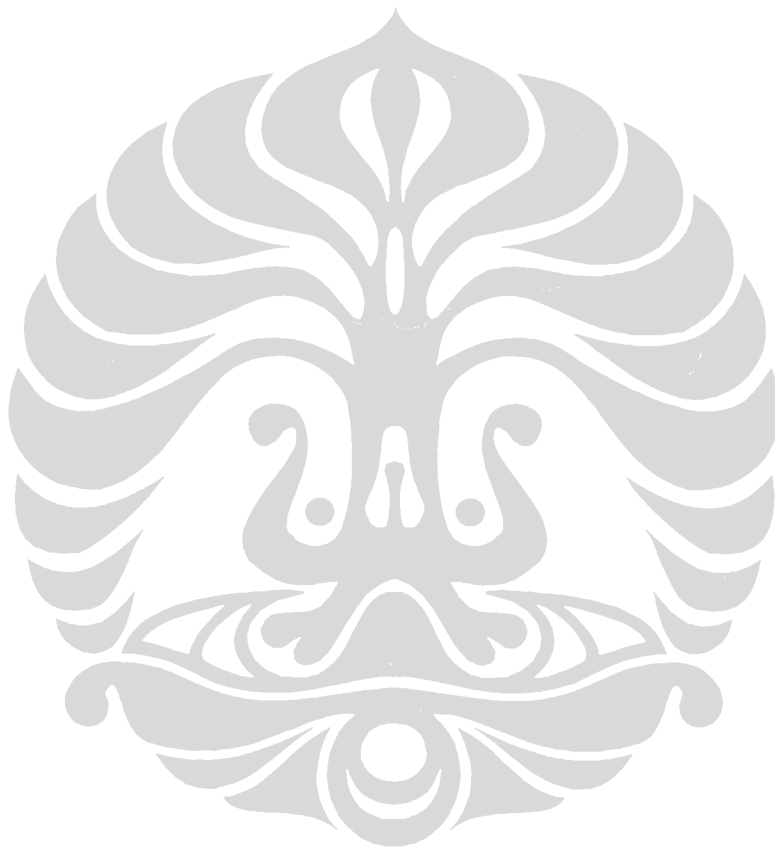
Bab kedua berisi uraian mengenai *Gemeente* di Jawa yang mencakup (1) sejarah pemerintahan kolonial di Jawa, dan (2) kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa.

Bab ketiga menguraikan analisa keruangan pusat kota *gemeente* di Pesisir Utara Jawa terhadap aspek sosial. Mulai dari (1) Bangunan di dekat alun-alun kota *gemeente*, dan (2) bangunan di dekat alun-alun berdasarkan periodenya. Bagian pertama bangunan-bangunan yang ada di sekitar alun-alun diidentifikasi berdasarkan letaknya yang terdiri dari: (a) fasilitas pemerintahan, (b) fasilitas transportasi, (c) fasilitas pasar, dan (d) fasilitas publik lain. Sedangkan pada bagian kedua, bangunan di sekitar alun-alun diidentifikasi dari periode pembangunannya, yang diuraikan sebagai: (a) bangunan lama, (b) bangunan baru.

Bab keempat merupakan bagian penafsiran analisis data. Bab tersebut terdiri dari dua sub bab yang membahas mengenai (1) pola alun-alun, dan (2) pola

berdasarkan morfologi awal kota. Pola alun-alun diuraikan menjadi dua kelompok, yaitu (a) alun-alun bukan bagian bangunan, dan (b) alun-alun bagian bangunan. Sementara bagian kedua menguraikan pola dan keletakan alun-alun dan bangunan disekitarnya berdasarkan morfologi kota, yaitu: (a) Arsitektur Kota Kolonial Awal, (b) arsitektur Kota Hindia Belanda Lama (*Oude Indische Stad*), dan (c) arsitektur Kota Hindia Belanda Baru (*Nieuwe Indische Stad*).

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penelitian.



Catatan:

¹Berdasarkan teori *Central Place*, (Christaller, 1966: 14) mengungkapkan, “Kristalisasi massa di sekitar inti adalah, anorganik serta organik alam, bentuk dasar tatanan hal-hal yang menjadi milik bersama - sebuah tatanan sentralistik. Urutan ini tidak hanya merupakan cara berpikir manusia, yang ada di dunia manusia imajinasi dan dikembangkan karena menuntut manusia, bahkan memperlihatkan ada pola yang melekat pada materi”.

² Kota-kota masa awal di Jawa adalah kota-kota yang berkembang sebelum masa kebudayaan Indis. Di dalam Rahardjo (2007: 31--34) kota-kota di Jawa mengalami 4 pertumbuhan arsitektural dan yang pertama di sebut sebagai arsitektur Jawa Awal, dan dilanjutkan dengan pertumbuhan arsitektur kota Kolonial awal, arsitektur Indis, dan terakhir modern. Pembagian tersebut berdasarkan pada pembagian latar belakang budayanya.

³Kekuatan mesin ekonomi yang dahsyat ini ternyata telah melahap baik pusat maupun pinggiran kota-kota besar di Jawa. Konsep-konsep seperti koservasi, renovasi dan sebagainya untuk daerah kota lama hanya didengar sebagai slogan kosong belaka. Perubahan morfologi yang terjadi pada kota-kota besar di Jawa pada akhir abad ke-20 ini terlihat jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan yang terjadi pada awal abad ke-20. Dan seperti yang kita lihat sekarang maka penanganan secara konsepsional masih belum kelihatan. (Handinoto, 1998: 12).

BAB 2

GEMEENTE DI PESISIR UTARA JAWA

AWAL ABAD XX MASEHI

Sejak pemerintahan penjajah Belanda berkuasa secara politik di wilayah Jawa, telah memberlakukan sistem pemerintahan yang sentralistik di Indonesia (Hindia Belanda), seperti dijelaskan pada *Regeringsreglement (RR)* atau Undang-undang Dasar bagi Hindia Belanda Tahun 1854 (Furnivall, 1967: 157). Sistem pemerintahan yang demikian tentu tidak lepas dari politik yang menguntungkan bagi pemerintahan kolonial yang pada prinsipnya segala urusan pemerintahan dipegang oleh Gubernur Jenderal. Namun, pada sisi lain Belanda juga mengakui adanya daerah-daerah *swapraja* atau desa yang tetap diperbolehkan melangsungkan *ketataprajaan* berdasarkan adat-istiadatnya asal saja tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial.

Sistem pemerintahan tersebut selanjutnya berubah menjadi desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah yang dikuasainya untuk mengatur daerahnya masing-masing. Meskipun pada dasarnya, pemegang kekuasaan tetaplah orang-orang Eropa.

2.1 Pemerintahan Kolonial di Jawa

Kepala pemerintahan di Hindia Belanda dijelaskan dalam *Regeering reglement (RR)* 1854, adalah Gubernur Jenderal yang menjabat atas nama Ratu Belanda secara sentralistik. Daerah Hindia Belanda dibagi dalam dua kategori besar yaitu *daerah Indirect Gebied* dan *Direct Gebied*. Daerah *Indirect Gebied* adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa Batavia. Daerah ini biasanya berbentuk kerajaan atau kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh raja/sultan dari kerajaan/kesultanan lokal dengan Residen/Gubernur sebagai wakil Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda. Kerajaan atau kesultanan memiliki status "negara semi merdeka" dalam lingkungan Kerajaan Belanda dengan perjanjian tersebut. Daerah-daerah tersebut diperintah sendiri oleh penguasa pribumi dan memiliki struktur pemerintahan lokal sendiri.

Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat Asisten Residen, Residen, atau Gubernur sesuai dengan tingkatan daerah yang didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dari sinilah kemudian muncul kedudukan khusus suatu daerah yang dikenal dengan Daerah *Swapraja* atau otonom (*Nomenklatur Zelfbesturende Landschappen*) (Furnivall, 1967: 157-158).

Daerah *Direct Gebeid* adalah yang diperintah secara langsung oleh Batavia secara hirarkis (Syahda G.L.S, 2000: 98). Pemerintahannya bersifat administratif atau sering disebut "pemerintahan *pangreh praja*". Pemerintahan ini pun dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura dengan Luar Jawa dan Madura. Di daerah Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya, adalah: Provinsi (Gubernur), Karesidenan (Residen), Kabupaten (Asisten Residen dan Bupati lokal atau *regent*), Kawedanan (Wedana), Kecamatan (Asisten Wedana), Desa (Lurah atau Kepala Desa).

Di daerah Luar Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya, adalah: Provinsi (Gubernur), Karesidenan (Residen), *Afdeling* (Asisten Residen), *Onder Afdeling (Controleur)*, *District* atau Kawedanan (Demang), *Onderdistrict* atau Kecamatan (Asisten Demang), Desa atau Marga atau Kuria atau Nagari (Kepala Desa atau nama lain sesuai daerahnya). Gubernur sampai Asisten Residen untuk Jawa dan *Controleur* untuk luar Jawa adalah berkebangsaan Belanda dan disebut *Europese bestuurambtenaren*. Sedangkan Bupati sampai Lurah atau Kepala Desa untuk Jawa dan Demang sampai kepala desa atau nama lain untuk luar Jawa berkebangsaan pribumi dan disebut *Inlandse Bestuurambtenaren* (Soetandyo W. 2004: 68).

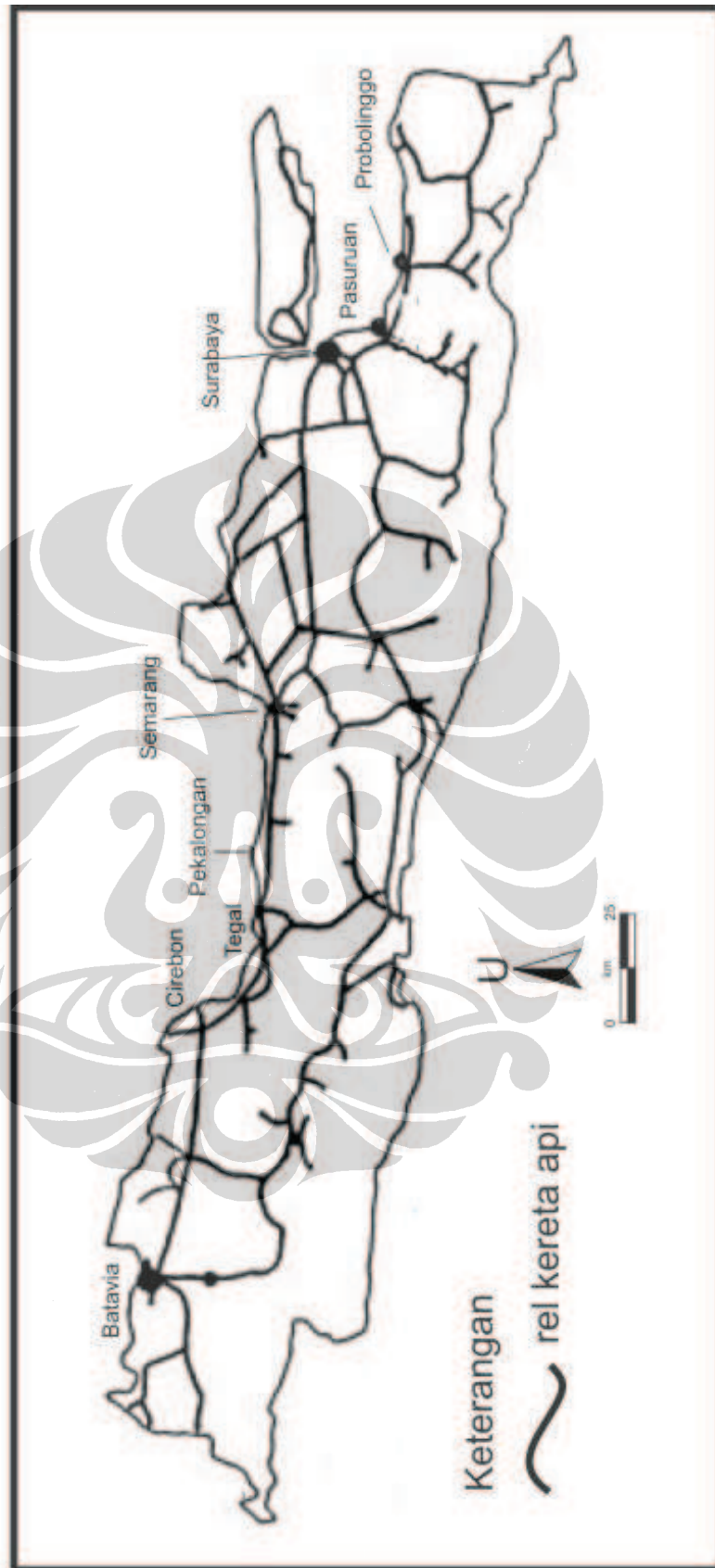
Decentralisatie Wet 1903 (*Stadblad* 1903 No. 329) memperkenalkan adanya prinsip otonomi. Di beberapa daerah mulai dibentuk *Locale Raad* (DPRD). Perkembangan selanjutnya muncul *Wet Op de Bestuurshervormings* 1922 (*Stadblaad* 1922 No. 216). Sebagai Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi terdapat *College van Gedeputeerden* yang dipimpin oleh Gubernur. Di tingkat Kabupaten terdapat *College van*

Gecomitteerden yang dipimpin oleh Bupati (*Regent*). Sedang di kotapraja (Kota Madya atau *Gemeente*) terdapat *College van Burgermeester en Wethouders* yang dipimpin oleh Walikota (Soetandyo W. 2004: 15—22).

2.1.1 Faktor Administrasi Kewilayahan

Secara struktural, wilayah kota berarti bagian dari wilayah administratif suatu negara atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang walikota. terbentuknya kota tidak dapat terlepas dari potensi strategis wilayah baik secara geografis dan ekonomis, maupun politis. Secara geografi dan ekonomi wilayah di Pantai Utara Jawa menjadi pusat jaringan jalan darat yang menghubungkan bagian Barat dengan bagian Timur Pulau Jawa, serta daerah pantai Utara dengan daerah pedalaman. Di sepanjang pesisir Utara Jawa terdapat *grote postweg* (jalan raya) yang membentang dari Anyer di bagian barat sampai Panarukan di bagian timur Pulau Jawa. Pembangunan jalan raya ini diprakarsai oleh Daendels, yang menjabat gubernur jenderal Hindia Belanda dalam periode 1808-1811, dari jalan raya ini terdapat beberapa jalan kecil atau jalan yang menuju daerah pedalaman.

Selain adanya jalan raya yang menghubungkan antara bagian Barat dan Timur Pulau Jawa, *NV Nederlandsch Indieshe spoorweg maatschappij (NIS)* mengajukan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalan kereta api di pulau ini, dan rute pertama yang dibangun adalah rute Semarang – Yogyakarta yang dibuka pada tanggal 17 Juni 1864 dan selesai 10 Agustus 1867, kemudian NIS terus mengembangkan usahanya tanggal 19 Juli 1868 jalur kereta api sampai di Kedungjati. Dua tahun kemudian yaitu 18 Pebruari 1870 jalur kereta api sudah sampai Solo lewat Gundi, kemudian dua tahun kemudian sudah sampai Lempuyangan, Yogyakarta. Perkembangan selanjutnya pengelolaan NIS diserahkan kepada *Staatspoor*. Perkembangan perkereta-apian di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang sangat pesat pada daerah-daerah itu dipandang sebagai tempat berpenduduk padat dan menghasilkan produk-produk pertanian yang penting seperti gula, nila, dan kopi (BAPEDA Kota Pekalongan, 2006: 37).



Sumber: Peta Jalur Kereta Api tahun 1925 (Handinoto, 1999:50, Lombard, 1996)

Selain tersedia jalan darat, kota-kota di Pesisir Utara Jawa juga dihubungkan dengan jalan laut yaitu tersedianya pelabuhan di tiap kota, yang sejak abad XVII telah menarik keinginan kompeni dagang Belanda (*Vereenigde Oost Indische Compagtiief*) untuk menguasainya. Kesemuanya itu telah menjadi faktor pendorong dan penggerak kota-kota di Pesisir Utara Jawa menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang cukup berkembang pada abad ke-19 (BAPEDA Kota Pekalongan, 2006: 38).

Pertimbangan kondisi wilayah tersebut kemudian menyebabkan berbagai perubahan sistem pemerintahan Hindia Belanda¹ di Jawa yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode sentralisasi dan desentralisasi. Periode sentralisasi pada pemerintahan hindia Belanda terjadi sebelum tahun 1901 sedangkan periode desentralisasi terjadi setelah tahun tersebut.

Tabel 2.1 Kronologi Struktur Pemerintahan Hindia Belanda di Jawa
(Dok: Y.R. Priyantoko, 2009)

No.	Struktur	Kepala Pemerintahan	Keterangan
1	Sebelum 1799		Sebelum VOC dibubarkan
	Pesisir	Gubernur Pantai Utara Timur Jawa di Semarang	
	Kabupaten	<i>regent</i> (bupati)	
	<i>Vessel</i>	residen, komandan, dan pengawas pertanian	Banten, Cirebon, Jawa Timur
	Batavia	Gubernur Jenderal di Batavia	Pinggir Priangan
	Kabupaten	<i>regent</i> (bupati)	
	kawedanan	Wedana	Di atas kecamatan dan di bawah kabupaten diisi orang pribumi
	<i>district</i>	Ass. Wedana	Setingkat kecamatan
	Desa	Kepala desa	
2	1799-1808	Gubernur Jenderal Hindia Belanda	
	Kabupaten	<i>regent</i> (bupati)	
	<i>Vessel</i>	residen, komandan, dan	

No.	Struktur	Kepala Pemerintahan	Keterangan
		pengawas pertanian	
	kawedanan	Wedana	Di atas kecamatan dan di bawah kabupaten diisi orang pribumi
	<i>district</i>	Ass. Wedana	Setingkat kecamatan
	Desa	Kepala desa	
3	1808-1811	Herman Willem Deandels	Sentralisasi
	Hindia Belanda	Gubernur Jenderal di Batavia	
	<i>prefectuurs</i>	<i>prefect</i>	5 <i>prefectuurs</i> Setingkat Karesidenan
	kabupaten	bupati	30 kabupaten
	kawedanan	Wedana	Di atas kecamatan dan di bawah kabupaten diisi orang pribumi
	<i>district</i>	Ass. Wedana	Setingkat kecamatan
	Desa	Kepala desa	
4	1812-1816	Thomas Stanford Raffles	
	Hindia Belanda	Gubernur Jenderal di Batavia	diisi orang eropa
	karesidenan	residen dibantu ass. Residen	17 karesidenan (diisi orang eropa)
	kabupaten	bupati dibantu patih	beberapa kabupaten/karesidenan (diisi orang eropa)
	kawedanan	Wedana	Di atas kecamatan dan di bawah kabupaten diisi orang pribumi
	<i>district</i>	Ass. Wedana	Setingkat kecamatan
	Desa	Kepala desa	
5	1818-1826	G.A. Baron van Der Capellen	
	Hindia Belanda	Gubernur Jenderal di Batavia	
	karesidenan	residen	
	kabupaten	bupati	menjadi setingkat kabupaten
	kawedanan	Wedana	
	<i>district</i>	Ass. Wedana	Setingkat kecamatan
	Desa	Kepala desa	

No.	Struktur	Kepala Pemerintahan	Keterangan
6	1855		<i>Staatsblad</i> 1855 No. 2
	Hindia Belanda	Gubernur Jenderal di Batavia	
	<i>gewest</i>	residen	setingkat karesidenan
	<i>afdeeling</i>	asisten residen	setingkat kabupaten
	<i>district</i>	<i>controleur</i>	setingkat kawedanan
	<i>onderdistrict</i>	<i>aspirant controleur</i>	setingkat kecamatan
	desa	Kepala desa	Desa
7	1905		<i>Staatsblad</i> 1905 No. 137
	Hindia Belanda	Gubernur Jenderal di Batavia	
	<i>gewest</i>	residen	setingkat karesidenan
	<i>afdeeling</i>	asisten residen	setingkat kabupaten
	<i>Gemeente</i>	<i>Burgemeester</i>	kotapraja atau kotamadya
	<i>district</i>	assisten wedana	setingkat kecamatan
	desa	kepala desa	desa
8	1922		<i>Staatsblad</i> 1922 No. 216
	Hindia Belanda	Gubernur Jenderal di Batavia	
	<i>Gewest</i>	gubernur	setingkat provinsi
	<i>karesidenan</i>	<i>resident</i>	setingkat karesidenan
	<i>afdeling</i>	<i>assisten resident</i>	setingkat kabupaten
	<i>Gemeente</i>	<i>Burgemeester</i>	kotapraja atau kotamadya
	<i>district</i>	assisten wedana	setingkat kecamatan
	desa	kepala desa	desa

Sebelum tahun 1799 atau pada saat VOC di bubarkan, pemerintahan menjadi tanggung jawa Gubernur Jenderal di Boutenzorg dan untuk urusan wilayah Jawa bagian Timur dibantu oleh Gubernur Pantai Utara-Timur Jawa berkedudukan di Semarang.

Desentralisasi merupakan imbas dari berbagai kondisi yang terjadi di Jawa maupun Belanda. Diawali dengan adanya pemberlakuan politik etis (1901) yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mensejahterakan juga penduduk pribumi. Selain itu, secara langsung kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh

keadaan wilayah kekuasaan Hindia Belanda yang semakin luas dan kondisi penduduk yang semakin padat membuat perlunya ada hak tiap daerah untuk menentukan nasibnya.

2.1.1.1 Pemerintahan Kota di Jawa Sebelum 1901

Pemerintah Daerah menurut Mr. J. Oppenheim dalam buku “*Het Nederlandsch Gemeenterecht*” (Utomo, Prabowo. 1991:2) adalah sebagai berikut:

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil daripada negara.
2. Adanya penduduk dalam jumlah yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus negara, akan tetapi bergerak untuk bersama berusaha atas dasar swadaya.
4. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pemerintah lokal atau pemerintah daerah tidak boleh memiliki undang-undang sendiri, segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah diatur oleh atau atas kuasa pemerintahan negara, karena statusnya merupakan bagian dari negara.

Pemerintah kolonial Belanda pada masa VOC tetap mempertahankan struktur pemerintahan pribumi, sehingga Belanda dapat memerintah rakyat melalui para pemimpin mereka sendiri. Tujuan akhirnya adalah untuk mempermudah perekrutan produk-produk pertanian rakyat pribumi yang laku untuk diekspor. Dalam hubungan ini Belanda menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi bekerja sama dengan rakyat untuk menghasilkan produk-produk dan para penguasa daerah itu diberi gelar *regent* (bupati) oleh VOC.

Pengaruh VOC sampai akhir abad XVIII meluas di seluruh Jawa, melaksanakan pengawasan terhadap daerah-daerah khususnya daerah Priangan dipegang oleh gubernur jenderal di Batavia, sedangkan pengawasan terhadap daerah pesisir dikendalikan oleh gubernur pantai Utara Timur Jawa, yang berpusat

di Semarang. Penguasa-penguasa di Banten, Cirebon, dan Jawa Timur menjadi *vassel* atau daerah taklukan VOC. Di setiap daerah yang telah dikuasainya, VOC menempatkan residen, komandan (kepala urusan militer), dan pengawas pertanian untuk wilayah keresidenan dan kabupaten (BAPEDA Kota Pekalongan, 2006: 39—40).

Pada masa VOC, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terbagi dalam 36 kabupaten (Clive Day, 1904:93- 94). Para bupati harus mengakui kekuasaan VOC, mereka tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan kekuasaan asing namun harus menjaga perdamaian dan harus mengumpulkan dan menyerahkan produk-produk yang dibutuhkan oleh VOC. Untuk perekrutan kepatuhan penduduk pribumi kepada para bupati, upacara-upacara tradisional tetap dipertahankan, dan mereka tetap meneruskan kehidupan sesuai dengan tradisi mereka. Intensifikasi eksploitasi VOC memungkinkan para bupati menerima pendapatan ekstra sehingga mereka menjadi kaya raya (Sutherland,1979: 6-7).

Pada akhir abad XVII VOC mengalami kebangkrutan dan kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu terutama kecurangan dalam pembukuan, hutang dan korupsi. Pada tahun 1795 ijin usaha (*octrooi*) VOC dicabut dan pada tahun 1798 kompeni dagang ini dibubarkan setelah berkuasa di sini selama hampir dua abad, selanjutnya pemerintahan diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), sistem pemerintahan daerah yang telah dibangun oleh VOC ditiadakan. Ia menjalankan sentralisasi kekuasaan di Batavia dan memperkuat kontrol administratif serta keuangan bagi para penguasa pribumi.

Kekuasaan gubernur pantai Utara-Timur Jawa dihapuskan dan wilayah itu dibagi dalam lima *prefectuurs* (wilayah yang dipimpin oleh seorang *prefect* atau kepala wilayah). Setiap *prefect* menjalankan kekuasaannya di bawah pengawasan gubernur jenderal. Dijelaskan juga pada masa pemerintahan Daendels di Jawa dibentuk 30 kabupaten dan hak turun-temurun bupati dihapuskan, sedangkan hak atas tanah, hak mendapat pelayanan tenaga kerja dan hak pemungutan hasil

pertanian dikurangi. Sebagai kompensasi semua itu, para bupati diberi kedudukan sebagai pegawai pemerintah yang digaji. (Sutherland,1979:1-7).

Setelah masa pemerintahan Daendels, Jawa jatuh ke tangan Inggris dan menjadi bagian daerah kekuasaan Inggris di India. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur jenderal untuk mewakili raja muda Lord Minto penguasa Inggris di India. Daendels dan Raffles meyakini sistem pemerintahan Barat lebih baik, kemudian Jawa dibagi dalam 17 wilayah keresidenan, setiap wilayah dipimpin oleh residen Eropa dan setiap residen dibantu oleh seorang asisten residen, kemudian tiap karesidenan dibagi dalam beberapa kabupaten.

Di dalam bukunya Heather Sutherland (1979: 9) dijelaskan bahwa, di samping membangun sistem pemerintahan Eropa, Raffles juga tetap mempertahankan sistem pemerintahan pribumi. Raffles menempatkan pegawai-pegawai pribumi di bawah kedudukan bupati dan di bawah pengawasan pemerintah pusat. Bupati dibantu oleh patih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Patih juga bertugas menguasai kepala-kepala teritorial yang lebih rendah yaitu wedana dan asisten wedana. Dalam sistem kepegawaian pemerintahan pribumi terdapat mantri (orang yang melaksanakan tugas khusus seperti pengairan), penghulu (orang yang bertugas dalam urusan keagamaan), dan jaksa (orang yang bertugas dalam urusan hukum dan pajak).

Setelah penjajahan Inggris berakhir pada tahun 1816 yaitu dalam bulan Agustus 1814, Inggris mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk mengembalikan Jawa dan milik-miliknya yang lain yang telah dikuasai oleh Inggris, akan tetapi pelaksanaan penyerahan kekuasaan itu baru terjadi dalam bulan Agustus 1816, karena pemerintah Inggris di Jawa masih menunggu perintah langsung dari gubernur jenderal Inggris di India (Day, Clive. 1972:167).

Pemerintah kolonial Belanda tetap melanjutkan sistem pemerintahan yang sudah dibentuk oleh Daendels dan Raffles. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G.A. Baron Van Der Capellen (1818-1826), tepatnya pada tahun 1819, para asisten residen mendapat kekuasaan atas daerah yang setingkat dengan kabupaten, sehingga dalam setiap residensi terdapat tiga atau lima asisten residen. Tingkatan ketiga dalam sistem pemerintahan Eropa di daerah adalah *controlour* (pengawas), dan sebenarnya kedudukan ini berasal dari pengawas (*opziener*) pada

masa VOC. Pada tahun 1820, gelar dan posisi bupati di Jawa diratifikasi (dikukuhkan). Ratifikasi itu memperkuat kedudukan bupati sebagai orang pertama dalam suatu kabupaten, dan di bawah perintah residen. Dalam urusan dengan penduduk pribumi, bupati adalah penasihat asisten residen. Tugas-tugas utama bupati adalah mengawasi pertanian, keamanan, kesehatan, pengairan, perawatan jalan, dan pemungutan pajak dalam wilayah kabupaten. Demikianlah pemerintahan kolonial Belanda telah memerintah dengan cara *indirect rule*.

Pemerintahan pribumi (*Inlandsch Bestuur*) atau *pangreh praja* melaksanakan perintah-perintah dari pemerintahan Eropa (*Binnenland Bestuur*) untuk pengaturan urusan-urusan yang berhubungan dengan penduduk pribumi. Pada pertengahan abad XIX, dilakukan pembaharuan pemerintahan kolonial (Mona Lohanda, 1996: 287). dengan dikeluarkan *regerings reglement* (undang-undang) tahun 1854. Di dalam pasal 67 undang-undang ini menyatakan bahwa: "Jika keadaan memungkinkan, penduduk pribumi harus ditempatkan di bawah pengawasan kepala-kepala daerah mereka sendiri yang ditunjuk dan diakui oleh pemerintah". Dengan demikian para bupati harus menunjukkan kualitas mereka sebagai pemimpin rakyat. Prestis dan karisma turun-temurun mereka merupakan jaminan untuk merekrut loyalitas rakyat, sedangkan di dalam pasal 69 menyatakan bahwa lebih memperkuat kedudukan bupati secara turun-temurun: "Bupati dipilih oleh gubernur jenderal dari kalangan pribumi, dan anak bupati atau keluarganya dapat dipilih jika memenuhi syarat calon bupati yaitu memiliki kemampuan, kepandaian, kejujuran dan kesetiaan". Peraturan ini telah memberi status khusus kepada keluarga bupati, dan menciptakan *clan* bupati sebagai kelas atas yang biasa disebut dengan ningrat priyayi. (Sutherland, 1975: 7).

Kekuasaan sentralistis Belanda diperkuat lagi dengan pemberlakuan *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie* yang dimuat dalam *Staatsblad* 1855 No. 2. Menurut peraturan tersebut Hindia Belanda adalah suatu *decentraliseerd geregeerd land* (suatu wilayah yang diperintah secara sentralistis). Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan yang sentralistis ini, dilaksanakan pula dekonsentrasi, yaitu pelimpahan tugas pemerintahan dari aparat pemerintah pusat kepada para pejabat pusat yang berkedudukan lebih rendah secara hirarkis. Para pejabat pusat itu disebar di seluruh wilayah negara, dan masing-masing

mendapat tugas untuk mengelola pemerintahan di lingkungan wilayah tertentu. Lingkungan wilayah jabatan ini disebut daerah *administrate*. Berdasarkan pada peraturan tadi, Jawa dibagi dalam daerah-daerah administratif yang disebut *gewest* (residensi dipimpin oleh seorang residen). Setiap *gewest* mencakup beberapa *afdeeling* (setingkat dengan kabupaten dan dipimpin oleh seorang Asisten residen), *district* (setingkat dengan kawedanaan dan dipimpin oleh seorang *controleur*), dan *onderdistrict* (setingkat dengan kecamatan - dipimpin oleh seorang *aspirant controleurr*) (Samudra, 2000: 95).

2.1.1.2 Pemerintahan Kota di Jawa Setelah 1901

Pada tahun 1893 muncul pemikiran-pemikiran *ethisch* (moral) yang mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan tanggung jawab moral kepada bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan kesejahteraan mereka. Tokoh-tokoh politik kolonial liberal adalah Van Kol, Van Deventer dan Pieter Brooshoofl. Van Kol menjadi juru bicara golongan sosialis dan melancarkan kritik terhadap kemerosotan kehidupan rakyat di Indonesia, sedangkan Brooshooft mengecam pemerintah Belanda yang hanya mengambil keuntungan dari rakyat dan tidak mengembalikan sedikitpun kepada mereka. Van Deventer sangat terkenal dengan tulisannya tentang "*Een Eereschuld*" (Hutang Kehormatan) pada tahun 1899, ia mengecam pemerintah Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dari keuangan negeri jajahan. Menurutnya, pemerintah Belanda telah menjalankan politik *Batig Slot* (hasil yang menguntungkan), yang berani mengeksploitasi hasil rakyat Indonesia, tanpa kepedulian untuk mengembalikan hasil itu sedikit pun. Van Deventer berpendapat bahwa uang rakyat tersebut harus dikembalikan sebab itu merupakan hutang kehormatan (Ricklefs, 2002:194).

Kritik-kritik tersebut di atas mendorong ratu Belanda untuk menyampaikan pidato pada bulan September 1901 yang menekankan spirit etis yaitu: "kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda. dengan pidato ratu Belanda itu, *Ethische politiek* (politik etis) dinyatakan dimulai. Belanda sebagai "wali" harus mengutamakan kepentingan rakyat pribumi. Pertama kali pelaksanaan politik etis ditekankan pada perbaikan

ekonomi, tetapi kemudian juga pendidikan, pembaharuan pemerintahan dan politik (Robert Van Niel, 1984: 51). Politik ini memperjuangkan tiga hal, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, desentralisasi, dan efisiensi.

Pada dasarnya tuntutan desentralisasi sangat berkaitan dengan pelaksanaan sistem liberal di Indonesia yang menyebabkan urusan pemerintahan di daerah-daerah meningkat secara pesat pada akhir abad XIX. Meningkatnya kepentingan-kepentingan Belanda di kota-kota, penumbuhan dan perkembangan pabrik-pabrik, kebutuhan akan fasilitas-fasilitas daerah seperti kereta api dan pelabuhan, semua dana untuk pengelolaan daerah merupakan urusan-urusan yang memerlukan keputusan dan penanganan yang sesegera mungkin. Jika residen harus melaporkan setiap urusan kepada gubernur jenderal di Buitenzorg (Bogor), hal itu akan menjadi hambatan bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu masyarakat di daerah-daerah menginginkan untuk dapat mempunyai suara dalam urusan-urusan pemerintah.

Desentralisasi dicanangkan pertama kali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda pada tahun 1903 dengan undang-undang yang disebut *decentralisatie Wet* yaitu undang-undang tentang desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya *Staatsblad* 1903 No. 329. Undang-undang tentang desentralisasi ini menambah peraturan dasar ketanegaraan Hindia Belanda dengan 3 pasal baru yaitu pasal 68a, 68b, dan 68c yang kemudian menjadi pasal-pasal 123, 124, 125 *Indische Staatregeling* yang merupakan dasar pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (*gewest*) dan bagian dari *gewest* untuk memiliki serta menyusun keuangan sendiri dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan landasan hukum bagi pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah-wilayah administratif tersebut. Dewan daerah ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan tentang pajak, urusan sarana dan prasarana umum seperti: jalan, taman, jembatan, makam, dan sebagainya (Jo Santoso, 1996: 145). Undang-undang Desentralisasi Tahun 1903 tersebut mencakup beberapa hal pokok yaitu:

1. Kemungkinan untuk pembentukan suatu daerah dengan keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya yang pengurusannya dilakukan oleh suatu dewan (*Raad*).

2. Bagi daerah yang dinilai telah memenuhi syarat, setiap tahun diberikan sejumlah uang dari kas Negara.
3. Ketua *gewestelijke raad* (dewan residensi) adalah pejabat pusat yang menjadi residen daerah yang bersangkutan, dan ketua dewan daerah selain residensi ditunjuk dengan ordonansi pembentukan. Pada umumnya juga ditunjuk pejabat pusat yang menjadi kepala daerah administratif.
4. Sebagian anggota dewan daerah diangkat oleh gubernur jenderal, sebagian diangkat karena jabatannya dalam pemerintahan dan sebagian lagi dipilih, kecuali semua anggota dewan kota besar/kotapraja, mulai tahun 1917 dipilih.
5. Dewan daerah berwenang menetapkan peraturan daerah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya, jika belum diatur dalam peraturan perundangan pusat.
6. Pengawasan terhadap daerah, baik berupa kewajiban daerah untuk meminta pengesahan atas keputusan daerah maupun hak menunda atau membatalkan keputusan daerah, berada di tangan gubernur jenderal Hindia Belanda.

Undang-undang desentralisasi tahun 1903 dilaksanakan lebih lanjut dengan *Decentralisatie Besluit (Staatsblad 1905 No. 137)* dan *Locale Raaden Ordonnantie (Staatsblad 1905 No. 181)*, kedua peraturan ini, daerah yang diberi keuangan sendiri disebut *Locaal Ressort*, dan dewannya disebut *Locale Raad* yang dapat dibedakan dalam *Gewestelijke Raad* (dewan keresidenan) dan *Plaattelijke Raad* (dewan yang dibentuk untuk bagian dari *gewest*/karesidenan). Dewan untuk bagian dari *gewest* yang berbentuk kota dinamakan *Gemeenteraad*. Demikianlah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut dibentuk daerah dengan keuangan dan aparatur pemerintahan daerah sendiri. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1999: 60, Wibawa, S., 2001: 234)

Setelah Perang Dunia I muncul wacana baru tentang pembentukan wilayah administratif yang lebih luas daripada *gewest*. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan tentang reorganisasi pemerintahan yang dimuat dalam *Staatsblad 1922 No. 216*. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan wilayah administratif yang lebih luas daripada *gewest* dengan nama provinsi. Di dalam pasal 67a undang-undang tersebut menjadi dasar hukum pembentukan provinsi,

pembentukan *provinciale raad* (dewan provinsi), pengangkatan gubernur (kepala daerah provinsi), dan pembentukan *college van gedeputeerden* (dewan pelaksana pemerintahan harian). Gubernur jenderal mengangkat seorang gubernur dalam setiap provinsi, seorang gubernur juga berkedudukan sebagai ketua *provinciale raad dan college van gedeputeerden* dan Pasal 67b menetapkan bahwa gubernur, atas nama gubernur jenderal, melaksanakan segala urusan rumah tangga provinsi, mengatur pekerjaan pegawai pemerintah, mengatur urusan militer, dan mempunyai kewenangan untuk menyatakan perang. Gubernur adalah juga pemegang kekuasaan tertinggi untuk urusan sipil dalam wilayahnya (Kaloh, 2003: 185, Handoyo, 1998: 199).

Masa tersebut pemerintah pangreh praja di Jawa dan Madura dibagi menjadi :

1. *Gewest*, tingkat pemerintah yang tertinggi adalah dapat disamakan dengan propinsi atau Gubernuran yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar *Gouvernoer* atau gubernur, *gewest* meliputi :
2. *Resident*, atau karesidenan dipimpin oleh seorang *resident*, residensi dibagi menjadi:
3. *Afdeeling*, dipimpin oleh seorang *assistens resident*, kecuali itu juga terdapat pemerintah dengan wilayah yang sama disebut dengan :
4. *District*, atau kawedanan yang masing-masing dipimpin oleh asisten wedana atau camat, distrik ini meliputi :
5. Desa, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa.

Untuk jabatan Gubernur, Residen, Asisten residen dijabat oleh orang Belanda, sedangkan jabatan di bawahnya dipegang oleh bangsa pribumi (BAPEDA Kota Pekalongan, 2006: 47). Sebagai tindak lanjut untuk pengaturan wilayah provinsi beserta seluruh aparatnya dikeluarkan *provincie-ordonantie* pada tahun 1924 (dimuat dalam *Staatsblad* 1924 No. 78). Secara garis besar undang-undang ini mengatur: (1) unsur-unsur pemerintah provinsi, yaitu: dewan provinsi. Badan pelaksana pemerintahan harian, dan gubernur; (2) pemilihan, keanggotaan. tugas-tugas. dan kewenangan masing-masing unsur pemerintahan tersebut, (3) pegawai provinsi, rapat-rapat dewan provinsi dan dewan pelaksana pemerintahan harian, pertanggungjawaban keuangan provinsi. anggaran biaya provinsi,

penerimaan dan pengeluaran provinsi, pengawasan tertinggi terhadap provinsi, dan lain-lain (Nurcholis, Hanif. 2005: 139).

Staatsblad Tahun 1924 No.78 kemudian dirubah dengan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1926 No. 525 yang isinya *Provincie-ordonantie* (*Staatsblad* 1924 No. 78) ini mendapat sedikit tambahan dan perubahan yang diatur dalam ordonansi 14 Agustus 1925 (*Staatsblad* 1925 No 397), ordonansi 4 Desember 1925 (*Staatsblad* 1925 No. 619), ordonansi 22 Desember 1925 (*Staatsblad* 1925 No. 654), ordonansi 25 Juni 1926 (*Staatsblad* 1926 No 254), dan ordonansi 27 Agustus 1926 (*Staatsblad* 1926 No. 373).

Wilayah Kota Besar yang diberi otonomi untuk wilayah Pulau Jawa adalah Kota Batavia (*Staatsblad* 1905 No. 208), Kota Meester Cornelis (*Staatsblad* 1905 No.206), Kota Bogor (*Staatsblad* 1926 No. 368), Kota Cirebon (*Staatsblad* 1926 No. 370), Kota Bandung (*Staatsblad* 1926 No. 369), Kota Sukabumi (*Staatsblad* 1914 No.310), Kota Semarang (*Staatsblad* 1929 No. 390), Kota Pekalongan (*Staatsblad* 1929 No. 192), Kota Tegal (*Staatsblad* 1906 No. 123), Kota Salatiga (*Staatsblad* 1917 No. 266), Kota Magelang (*Staatsblad* 1929 No. 249), Kota Surabaya (*Staatsblad* 1928 No. 504), Kota Malang (*Staatsblad* 1928 No. 501), Kota Madiun (*Staatsblad* 1928 No 499), Kota Kediri (*Staatsblad* 1928 No. 498), Kota Pasuruan (*Staatsblad* 1918 No.320), dan Kota Probolinggo (*Staatsblad* 322-1918), Kota Blitar (*Staatsblad* 1906 No. 150).

Inti desentralisasi bagi daerah kabupaten/Kota Besar itu adalah bahwa pada setiap kabupaten dibentuk *regentschapsraad* (dewan kabupaten) dan *Gemeenteraad* (Dewan Kota) yang bertugas membuat rancangan peraturan-peraturan dan mengawasi keuangan daerah. Secara garis besar setiap kabupaten/Kota Besar mempunyai otonomi untuk mengelola aset-aset daerahnya sendiri yang meliputi: jalan-jalan umum, lapangan dan taman, jaringan pipa air minum, saluran-saluran, penerangan jalan, pemakaman umum, pemotongan hewan, pasar dan los-los pasar, sumur artesis, tempat tempat rekreasi, dan penyeberangan dengan perahu tambang.

2.1.2 Faktor Kependudukan

Pertambahan penduduk pada akhir abad ke XVIII hingga pertengahan abad XX telah mendorong adanya pertumbuhan permukiman di Pulau Jawa. Hal tersebut mendorong munculnya kota sebagai pusat-pusat permukiman dan perekonomian. Pertumbuhan penduduk tersebut tidak hanya dari penduduk Jawa asli melainkan juga penduduk pendatang yang berasal dari Eropa, Cina, Arab, dan negara lainnya.

2.1.2.1 Penduduk Pribumi

Penduduk Pribumi di Jawa dan Madura sejak tahun 1800 telah bertambah 10 kali lipat. Pada tahun 1802 Engelhardt membuat perkiraan bahwa Penduduk Jawa berjumlah 3,5 juta jiwa. Raffles, lima belas tahun kemudian ketika mengadakan peraturan pajak tanah (*landrentestelsel*) di Jawa melakukan penghitungan dan memperkirakan bahwa penduduk pribumi berjumlah hampir 5 juta jiwa. Angka yang dibuat selanjutnya menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dan mungkin terus berlangsung sampai bagian kedua abad XIX. (van Laanen, J. T. M. 1987: 26)

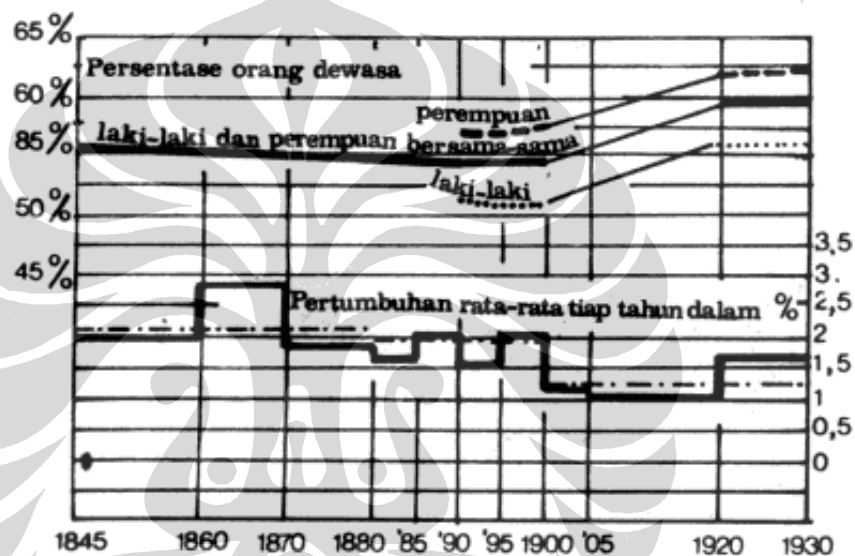
Setelah masa itu, pertumbuhan penduduk antara tahun 1900 sampai 1920 agak tersendat-sendat. Hal itu akibat tingginya angka kematian, yaitu sekitar 32,5 sampai 35 per seribu jiwa. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1918 ketika wabah penyakit membunuh puluhan ribu jiwa sehingga pertumbuhan penduduk terendah terjadi antara tahun 1917 sampai 1920, bahkan di beberapa daerah terjadi pengurangan. (van Laanen, J. T. M. 1987: 26)

Angka kematian itu disebabkan oleh menjangkitnya beberapa penyakit yang ada perti saat ini namun pada masa lalu memberikan dampak buruk. Cacar misalnya, dulu merupakan salah satu penyakit menular yang amat ditakuti dan menelan banyak korban. Pes pertama kali ditemukan pada tahun 1911 di Hindia Belanda, telah banyak menimbulkan ketakutan di antara penduduk. Penyakit yang menjalar dari Timur ke Barat ini hanya ada ditahun-tahun 1913, 1914, 1921, dan 1922. (van Laanen, J. T. M. 1987: 26, Direktorat Jendral PP & PL, 2007: 8)

Pada tahun 1915, Dinas Pemberantasan Pes dibentuk untuk memutus kontak antara manusia dengan tikus. Dinas ini bertugas melakukan perbaikan

perumahan dan pembinaan dalam mengurus rumah tangga, hingga tidak ada lagi tempat tikus bersarang. Di samping usaha perbaikan rumah, pemberian vaksinasi juga dilakukan. Awalnya, rakyat diberikan vaksin Haffkine. Karena hasilnya tidak memuaskan, pada vaksinasi berikutnya digunakan vaksin Otten (mulai tahun 1934), yang ternyata dapat menurunkan 20 % angka kematian dari angka semula. (Direktorat Jendral PP & PL, 2007: 9)

Diagram 2.1 Pertumbuhan dan Umur Penduduk Pribumi Jawa da Madura Tahun 1845 sampai dengan 1930



Sumber : van Laanen, J. T. M. (1987: 27)

Setelah tahun 1920 pertumbuhan penduduk berlangsung dengan cepat. Antara tahun 1920 dan 1930 pertumbuhan penduduk pulau Jawa sekitar 17,6 per seribu jiwa. Diperkirakan pada tahun 1930 jumlah penduduk Jawa dan Madura hampir 41 juta jiwa.

Ketika sensus tahun 1930 diadakan, penduduk Indonesia telah berjumlah 60,7 juta jiwa. Dari jumlah itu 41,7 juta jiwa berdiam di Pulau Jawa. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk di Indonesia sekitar 79,4 juta jiwa. Di Jawa jumlah penduduknya sekitar 48,4 juta jiwa, sedangkan di daerah luar Jawa jumlah penduduknya sekitar 22 juta jiwa.

Selain penyakit, perpindahan penduduk atau migrasi juga mempengaruhi pengurangan penduduk di Jawa, meskipun tidak terlalu signifikan. Diperkirakan pada tahun 1920 kurang lebih 760.000 orang Jawa tinggal di luar Jawa. Jumlah itu bertambah menjadi kira-kira 1.360.000 jiwa pada tahun 1930.

Walaupun berpindahnya orang Jawa ke luar Jawa tidak memiliki arti besar bagi jumlah penduduk, tetapi tidak bisa dilupakan bahwa jumlah penduduk dari suku bangsa tersebut tidak hanya kehilangan sejumlah anggota warganya yang berada pada puncak kekuatannya, tetapi juga pada puncak kemampuan untuk memberi keturunan.

2.1.2.2 Penduduk Asing

Selain penduduk lokal, juga terdapat penduduk asing yang tinggal di Jawa, antara lain kalangan Eropa, Cina, dan Arab dengan jumlah yang cukup signifikan. Penduduk Eropa merupakan para kaum Belanda yang banyak menjadi kepala di tiap daerah. Sedangkan cina dan Arab sebagian besar adalah pendatang yang menjadi sadagar dagang di Jawa dan menghuni kota-kota besar.

Kota-kota pantai seperti Batavia, Semarang dan Surabaya mengalami perkembangan sepanjang jaman. Mulai dari pendirian pos dagang sampai kota benteng dan akhirnya sebagai Kotamadya (*Gemeente*) dan ibukota propinsi, daerah pecinan selalu mengambil peran sebagai daerah perdagangan eceran dan pedagang perantara. Memang ada beberapa pedagang Cina yang menjadi pedagang besar dan meningkatkan perannya sebagai eksportir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang eceran dan perantara yang hidup didaerah pecinan. Hingga tahun 1940, daerah pecinan masih mempunyai peran penting dalam tata ruang kota-kota pantai (Widodo, 2005: 201-207).

Pada tahun 1800 tiga kelompok ini sudah jauh lebih besar dari tahun-tahun pertama abad itu. Penduduk Eropa jumlahnya hampir 44.000 jiwa, penduduk Cina 100.000 orang dan menjadi 500.000 orang menjelang akhir abad ke 19, dan Arab hampir 9.000 jiwa (Lombard, 1996, jilid 2:245).

Pertumbuhan penduduk asing erat kaitannya dengan masuknya imigran dari luar negeri. Orang Eropa pertama kali tiba di Hindia Belanda pada Abad XVI. Jauh lebih awal, lalulintas manusia antara Cina dan Hindia Belanda telah mencapai jumlah yang tinggi, sedangkan orang Arab baru pada permulaan abad XVIII datang dengan jumlah yang besar. Para imigran tersebut hampir sebagian besar menetap.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Asing di Hindia-Belanda tahun 1860-1930

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Eropa	Cina	Arab
1860	43.876	221.438	8.909
1880	59.903	343.793	16.025
1900	91.142	537.316	27.399
1905	94.518	563.449	29.588
1920	168.144	809.039	44.902
1930	240.417	1.233.214	71.335
Rata-rata pertumbuhan tiap tahun dalam persen			
1860-1880	1,6	2,2	3
1880-1900	2,1	2,3	2,7
1900-1920	3,1	2,1	2,5
1920-1930	3,6	4,3	4,7

Sumber : van Laanen, J. T. M. (1987: 27)

Imigran yang menetap di Hindia Belanda dalam dasawarsa terakhir abad XVIII lebih banyak dibandingkan dengan masa sebelumnya pada saat imigrasi hanya untuk berdagang saja. Para pendatang tersebut membentuk keluarga sehingga tingkat pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan pendatang asing lainnya yang tidak menetap.

Gejala menetapnya para imigran dan keturunan mereka dalam berbagai bentuk pada dasarnya secara kuantitatif berubah-ubah dari masa ke masa. Banyak di antara imigran Eropa tersebut akhirnya kembali ke negara asalnya dengan membawa anaknya. Meskipun cepat atau lambat anak tersebut datang kembali ke Hindia Belanda untuk tinggal sementara atau selamanya.

Para imigran Cina hanya sebagai kecil yang tinggal menetap dan meninggalkan negara asalnya. Meskipun begitu, mereka yang telah berkeluarga di sini jarang pulang ke Cina kecuali bila menjelang ajal. Hal tersebut bertolak belakang dengan imigran Arab yang hampir semuanya menetap. Memang banyak yang kembali ke negara asalnya setelah beberapa waktu bermukim di Hindia Belanda, akan tetapi sering hanya untuk sementara, biasanya untuk menyekolahkan anak-anaknya di negeri Arab. Orang India semuanya hanya tinggal sementara kecuali orang Benggali yang tampaknya tinggal menetap.

2.2 Kota *Gemeente*

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial membuka kemungkinan untuk membentuk daerah-daerah desentralisasi di Hindia Belanda, khususnya desentralisasi pengaturan keuangan dan pajak dan bukan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Mulai tahun 1906 berdasarkan *Besluit Decentralisatie* 1904 dan *Lokale Raden Ordonantie* 1905 (Soetandyo W., 2004: 15--21). Belanda membentuk daerah-daerah desentralisasi yaitu *Gemeente-Gemeente* (semacam kota) di seluruh wilayah Hindia Belanda, sebagai daerah yang menyelenggarakan pemerintahan lokal yang dipimpin oleh seorang walikota atau *Burgemeester* (sejak tahun 1922 dibentuk dewan pemerintah daerah (*college van Burgemeesters en wethouders*) yang diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di setiap *Gemeente* bidang pelayanan umum.

Seiring dengan tuntutan pemerintah lokal atas otonomi lebih luas dan kuatnya aliran politik etis di negeri Belanda, maka berdasarkan "*Indische Staatsregeling*" (IS) tahun 1925 (Stanley Henry Beaver, 1944: 98 dan 105) dimungkinkan membentuk daerah-daerah dengan otonomi lebih luas lagi yang terdiri dari wilayah-wilayah provinsi dan wilayah-wilayah lain yang bukan provinsi yang sedapat mungkin urusan-urusan rumah tangga daerah dapat diatur dan diurus sendiri oleh daerah. Karena itu sejak tahun 1928 dibentuklah tiga provinsi di Jawa dan Madura, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meliputi 70 Kabupaten otonom dan 18 kota otonom yang berupa *regenschaap* dan *stadsregenschap*, dan semua *Gemeente* yang dulu diganti

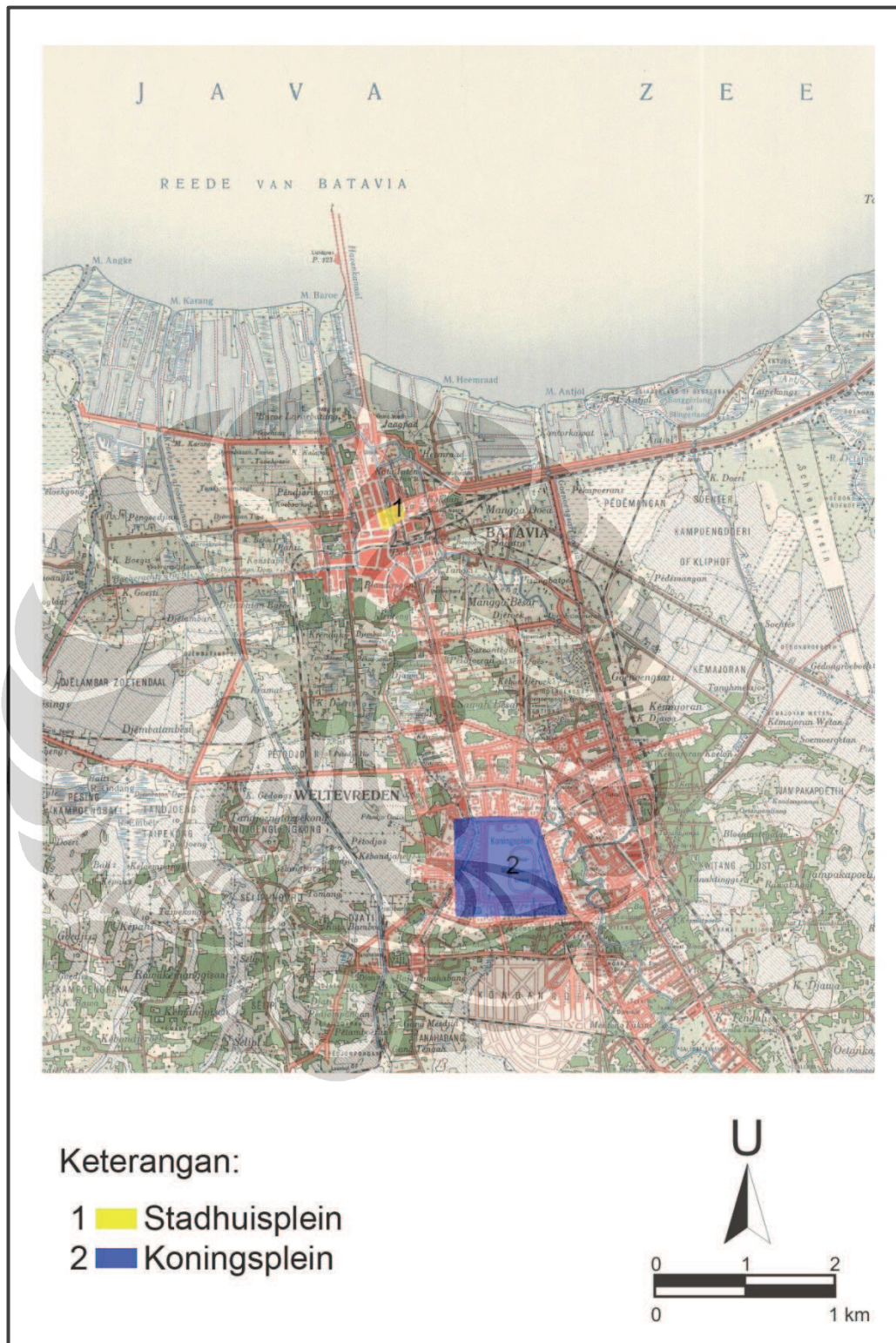
dengan daerah kotapraja atau *staads Gemeente*. Sedangkan di luar Jawa Madura mulai tahun 1938 dibentuk *Groups Gemeenteschaap*, semacam provinsi di Jawa, dengan keharusan membentuk pemerintahan kolegal. Walaupun demikian tetap saja sistem pemerintahan sentralistis dengan otonomi daerah yang sangat terbatas berlangsung sampai kekuasaan Belanda berakhir di Indonesia. Mulai pada masa ini diperkenalkan mekanisme pemilihan bagi badan-badan perwakilan dan pemerintahan kolegal di daerah-daerah walaupun sangat terbatas karena kepala daerahnya tetap saja ditetapkan oleh pemerintah kolonial.

Selama 1906-1918, dibentuk *Gemeente* di Jawa, yaitu: Jakarta, Jatinegara, Bogor, Bandung, Sukabumi, Tjirebon (Cirebon), Semarang, Tegal, Pekalongan, Magelang, Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Salatiga. Sedangkan di Sumatera yaitu: Medan, Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Padang, Sawahlunto, *Fort de Kock*, dan Palembang. Di Kalimantan Indonesia Timur, yaitu: Banjarmasin, Makasar, Manado dan Ambon. Dari 19 *Gemeente* di Jawa tersebut, 9 di antaranya adalah kota-kota pelabuhan di pantai Utara yang cukup penting, yaitu:

2.2.1 Batavia dan Meester Cornelis

Berdasarkan Ordonansi (Undang-undang) tanggal 18 Maret 1905 (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), Kota Batavia -- pada tanggal 1 April 1905 ditetapkan sebagai sebuah daerah lokal, yang mempunyai kewenangan mengatur keuangan sendiri, berikut Dewan-daerah yang berdiri sendiri dengan nama *Gemeente* Batavia. Kota tersebut adalah *Gemeente* pertama yang dibentuk di Hindia-Belanda. Luasnya ketika itu kurang lebih 125 km², belum termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk Batavia (kini Pulau Seribu).

Peta 2.2 Pusat Kota Batavia 1914



Sumber: Peta *Batavia en Omstreken* 1914 (The University of Chicago Libraries)

Tahun 1908, untuk keperluan menjalankan pemerintahan Pamongpraja, *Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia* dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan *Weltevreden*, serta 6 *Onderdistrik* (Mangga Besar, Penjaringan, Tanjung Priok, Gambir, Senen, Tanah Abang), yang dikepalai oleh para Wedana dan Assisten-Wedana. Dari 6 *Onderdistrik* dibagi lagi menjadi 27 buah *Wijk*, dan masing-masing *Wijk* dibagi lagi dalam Kampung-kampung. Meskipun terjadi perubahan menjadi *Gemeente*, namun tidak ada gedung baru yang dibangun. Pemerintahan di Batavia memanfaatkan gedung yang telah ada sejak awal.

Tahun 1904 ada ketentuan bahwa untuk *Gemeente* tertentu oleh Gubernur-Jenderal dapat diangkat seorang Ketua Dewan *Gemeente* tersendiri. Ketua Dewan yang diangkat itu memakai sebutan *Burgemeester* (Walikota). *Burgemeester* Batavia pertama-yang diangkat oleh Gubernur-Jenderal pada tahun 1916 adalah Mr. G.J. Bisschop.

Selanjutnya terjadi penggabungan *Gemeente* Batavia dan Meester Cornelis yang awalnya merupakan ibu kota dari kawedanan Jatinegara yang melingkupi Bekasi, Cikarang, Matraman, dan Kebayoran. *Geemente* Meester Cornelis (*Staatsblad* 1905 No.206) dibentuk bersamaan dengan dibentuknya *Geemente* Batavia. Namun, mulai 1 Januari 1936 *Geemente* Meester Cornelis disatukan dengan *Geemente* Batavia.

Sementara itu, lokasi pusat pemerintahan *Gemeente* Batavia pada saat awal dibentuk tetap berada di kawasan *Stadhuis* atau kota lama Batavia di *Stadhuisplein*. Hingga tahun 1925 secara bertahap, pusat pemerintahan *Gemeente* Batavia dipindahkan ke daerah sekitar *Weltevreden*, termasuk juga adanya balaikota Batavia yang baru. Balaikota tersebut berada di sebelah Selatan lapangan Koningplein.

Balaikota tetap ditempatkan pada Gedung *Stadhuis* pada saat terjadi perubahan status *Gemeente* sehingga tidak terjadi perubahan bangunan di sekitar *Stadhuisplein*. Perubahan tersebut hanya berpengaruh pada perubahan tanggungjawab pemerintah *Gemeente* terhadap infrastruktur kota. Infrastruktur tersebut salah satunya adalah pengaturan air bagi kebutuhan kota Batavia.

Batavia adalah kota pesisir yang dibangun di daerah muara sungai (Ciliwung), air tawar merupakan komoditas yang tak banyak tersedia di alam. Kota tersebut juga dibangun di dataran rendah berawa-rawa yang justru menjadi sumber berbagai macam penyakit. Pada abad ke-17 dan 18 angka kematian relatif tinggi. Pada abad ke-18 Batavia sempat dipuji para pelancong sebagai *Koningin van het Oosten*, Ratu dari Timur. Hal ini karena Batavia merupakan kota bergaya Eropa yang indah di belahan dunia Timur. Namun, pada akhir abad yang sama, gara-gara banyak orang Belanda yang mati, Batavia mendapat julukan baru: *Het Graf der Hollander* (Kuburan Orang Belanda).

Sampai awal abad ke-20, di kota Batavia muncul bermacam penyakit yang mematikan: kolera, tipus, dan difteri, yang antara lain disebabkan buruknya kualitas air minum. Menurut Scott Merrilees (2006) dalam buku *Batavia in Nineteenth Century Photographs*, untuk mengatasi persoalan air bersih, menjelang pertengahan abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun sumur-sumur artesis di berbagai tempat di Batavia. Sumur pertama digali di dalam Benteng Pangeran Frederik (*Princes Frederik Citadel*), di tempat Masjid Istiqlal berdiri sekarang, dan selesai pada 1843. Sumur-sumur berikutnya baru digali hampir 30 tahun kemudian. Pada tahun 1870-an ada enam sumur yang selesai digali, termasuk satu di sisi utara *Koningsplein*, Medan Merdeka Utara, kurang lebih di seberang istana gubernur jenderal yang kini jadi Istana Presiden.

Pembangunan sumur air tanah dalam ini terus dilakukan hingga akhir 1920-an. Waktu itu di seluruh Batavia sudah ada 50-an sumur artesis, yang kedalamannya bervariasi mulai dari 100 meter sampai hampir 400 meter. Di samping itu, juga dibangun 14 stasiun mesin pompa untuk meningkatkan tekanan air di dalam pipa-pipa pendistribusian.

Pemerintah telah membangun jaringan pipa pendistribusian sepanjang 90 kilometer. Melalui pipa-pipa itu air sumur dialirkan sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, termasuk ke daerah Meester Cornelis (Jatinegara). Segenap warga kota, baik pribumi maupun Eropa, boleh memanfaatkan air berkualitas baik ini dengan gratis. Sejak adanya sumur artesis ini, kondisi kebersihan dan kesehatan di Batavia meningkat secara signifikan.

Namun, banyak warga yang tak menyukai rasa air sumur dalam ini. Warnanya keruh sehingga kalau dipakai untuk menyeduh teh, warna air teh jadi hitam. Dengan demikian, air Ciliwung tetap merupakan air minum paling favorit di Batavia.

Meski jumlahnya sudah mencapai 50, sumur-sumur artesis tak mampu menghasilkan air dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk Batavia. Pada Oktober 1918 pemerintah memutuskan membangun jaringan pipa baru untuk mengalirkan air bersih ke Batavia dari mata air di Ciomas, di kaki Gunung Salak, Bogor. Pembangunan infrastruktur ini selesai pada akhir 1922, yang diikuti dengan penonaktifan sumur-sumur artesis dan pembongkaran bangunan-bangunan pelindungnya.

Tahun 1918, Belanda membuat masterplan Batavia, namun lebih untuk mengantisipasi pertumbuhan warga Eropa di kawasan Menteng. Pemerintah Hindia Belanda memulai program revitalisasi kampung pada tahun 1927, yang terhambat resesi ekonomi dunia 1929. Pengembangan Batavia kemudian kurang mendapat perhatian, karena pemerintah Hindia Belanda berniat memindahkan pusat pemerintahan ke Bandung.

Fasilitas lainnya adalah pengadaan tempat rekreasi di Batavia, dan salah satu lokasi yang berada di pusat kotanya adalah *Weltevreden (The Queen of The East)*. Di daerah tersebut terdapat bangunan-bangunan penting pemerintahan hindia Belanda, selain itu juga terdapat museum gajah (Museum Nasional). Untuk memfasilitasi kedatangan wisatawan dari berbagai negara, di Batavia juga telah disediakan berbagai hotel, antara lain: Hotel British India, Hotel des Indes, Hotel der Netherlanden, Hotel Java, dan Hotel Wisse. Hotel-hotel tersebut rata-rata memasang tarif 6 guilders (*Batavia Vereeniging Toeristenverkeer*, 1900: 12-26).

Peta 2.3 Letak Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas di Kota Lama Batavia



Sumber: Peta Google Earth (di edit oleh Y.R. Priyantoko, 2009)

2.2.1.1 *Stadhuis* dan *Stadhuisplein*

Stadhuis adalah bangunan di kawasan Kota Tua Jakarta saat ini dan didirikan pada tanggal 13 Januari 1707 di bawah Pemerintahan Gubernur Jenderal Joan van Hoorn. Namun, Pembangunan baru diselesaikan pada pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710.

Bangunan tersebut pernah menjadi Balaikota Batavia pada tahun 1710 hingga 1925, selain sebagai kantor pengadilan, kantor administrasi, dan penjara. Berarti gedung tersebut menjadi kantor pemerintahan hingga Kota Batavia menjadi *Gemeente*. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur klasik dengan campuran unsur-unsur barok (Heuken, 1997: 46). Di tengah-tengah atap bangunan terdapat menara kecil persegi delapan, yang berkubah dan menjulang di atas atap yang tinggi serta panjang. Jendela-jendelanya besar dan berpaling. Letaknya di sisi Selatan *Stadhuisplein* dan menghadap ke Utara, atau pada koordinat $6^{\circ}08'06,58$ LS dan $106^{\circ}48'48,16$ " BT.



Foto 2.1 Museum Sejarah Jakarta (oleh: Yoki Rendra P, 2009)

Stadhuisplein merupakan lapangan sekaligus halaman depan dari *Stadhuis* yang berbentuk segi empat dengan luas kurang lebih 0,8 Ha. Di bagian tengahnya terdapat pancuran air berdenah segi delapan dengan 4 pancuran. Bangunan tersebut dikelilingi kolam kecil yang berdenah serupa dan memiliki 2 tangga untuk turun ke bawah.

2.2.1.2 Museum Senirupa dan Keramik (*Raad van Justice*)

Gedung Museum Senirupa dan Keramik tersebut berada di Jalan Pos Kota No 2, Jakarta. Gedung Museum tersebut tepat berada di seberang Museum Sejarah Jakarta atau sebelah selatan *Stadhuisplein*. Gedung tersebut dibangun pada 12 Januari 1870 itu awalnya digunakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda untuk Kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia (*Ordinaris Raad van Justitie Binnen Het Kasteel Batavia*).



Foto 2.2 Museum Senirupa dan Keramik (oleh: Y.R. Priyantoko, 2009)

Bangunan tersebut memiliki denah angka delapan dengan bagian depan bergaya arsitektur klasisme di rancang W.H.F.H. van Raders (Heuken, 1997: 99). Luas bangunan kurang lebih 4.200 m².

2.2.1.3 Museum Wayang (Gereja Belanda Baru)

Gereja Belanda Baru atau *Nieuwe Hollanda Kerk* didirikan tahun 1736, namun akibat gempa dibangun lagi pada tahun 1808 setelah dijual oleh Deandels (Heuken, 1997: 93). Sehingga fungsinya sebagai gereja hanya sebentar. Selanjutnya tempat ini sempat menjadi gudang dan akhirnya menjadi museum Wayang. Lokasi bangunan ini berada di Jalan Pintu Besar Barat 27 dan memiliki luas bangunan kurang lebih 504 m².

Universitas Indonesia



Foto 2.3 Museum Wayang (oleh: Y. R. Priyantoko, 2009)

2.2.1.4 Kantor Pos *Stadhuisplein*

Bangunan kantor pos lama Batavia di *Stadhuisplein* berada di sebelah Utara *Stadhuisplein* atau depan Gedung Museum Sejarah Jakarta (*Stadhuis*). Kantor pos tersebut tetap digunakan meskipun pusat kota telah pindah ke *Weltevreden* tahun 1925 (Soeparmo, Y. 2009: 222).



Foto 2.4 Kantor Pos *Stadhuisplein* (oleh: Y.R. Priyantoko, 2009)

Bangunan kantor pos tersebut terdiri dari 2 lantai dengan denah persegi panjang, yang memanjang dari Utara-Selatan. Bangunan tersebut berada di area seluas 600 m².

2.2.1.5 *Koningsplein*

Masa selanjutnya disebabkan perkembangan kota Batavia yang mengarah ke Selatan dan berpusat di *Weltevreden* (sekarang daerah Gambir, kantor *Gemeente* Batavia menjadi sangat jauh dari pusat kota). Pada tahun 1913 kantor *Gemeente* Batavia beralih ke Tanah Abang West (sekarang jalan Abdul Muis No.35, Jakarta Pusat). Pada tahun 1919 kantor *Gemeente* Batavia pindah lagi ke *Koningsplein Zuid* (sekarang Medan Merdeka Selatan no.9).

Wilayah *Weltevreden* bukanlah sebuah wilayah baru dalam peta Batavia. Wilayah ini sudah terbentuk sejak abad XVII Masehi. Bermula saat *Anthonij Paviljoun* membangun vila-vila peristirahatan diatas lahan pemberian pemerintah kolonial tahun 1648 dengan nama *Weltevreden*. Kompleks perumahan inilah yang merupakan cikal bakal kawasan *Weltevreden* (letak kompleks tersebut saat ini berada disekitar Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto).

Bangunan di pusat pemerintahan Batavia lama antara lain: *Stadhuis* (saat ini Museum Fatahillah), *Raad van Justice* (saat ini Museum Seni Rupa), Gereja (saat ini Museum Wayang). Namun, sejak terjadinya perubahan ekologis kota akibat bencana letusan Gunung Salak tahun 1696 dan ditambah dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat penebangan hutan besar-besaran guna pembukaan lahan perkebunan di sepanjang aliran sungai Ciliwung berpengaruh buruk bagi lingkungan disekitar Benteng Batavia.

Proses sedimentasi dan pendangkalan sungai membuat meluapnya kotoran, air menjadi keruh dan berbau. Nyamuk dan lalat berkembang biak di rawa-rawa yang tergenang. Tahun 1732, untuk menanggulangi masalah kekurangan air bersih Gubernur Jendral ke-22 *Diederik Durven* memutuskan penggalian *Saluran Mookevert* yang menghubungkan sungai Cisadane dan Kali Angke dari arah Tangerang guna menambah debit air sungai. Program ini ternyata kurang berhasil dan menyebabkan bencana banjir bagi Batavia di tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, semakin tingginya tingkat kemakmuran masyarakat Batavia akhir abad ke-18, menyebabkan warga mencari tempat tinggal lebih baik di luar lokasi tembok Batavia. Perkembangan kota beralih dari sekitar Benteng ke arah Selatan yang memiliki udara lebih bersih dan sehat. Pemukiman-pemukiman baru

mulai terbentuk disekitar *Molenvliet* (Jl. Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk), *Riswijkstraat* (Jl. Majapahit), *Noordwijk* (Jl. Ir. Juanda), dan *Weltevreden* (khusus untuk *Weltevreden* merupakan kawasan peristirahatan elite bagi para pembesar VOC).

Kawasan *Weltevreden* mulai berkembang saat Justinus Vinck (1733-1735) membangun dua buah pasar besar didalamnya (Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang). Pasar-pasar tersebut dihubungkan oleh *De Grote Zuiderweg* (jalan tembus melalui Kampung Lima–Perapatan–sampai Kramat–terus ke Senen. Jalan Gunung Sari–Pasar Senen–Kramat).



Peta 2.4 *Koningsplein* di dalam Kawasan Weltevreden



Sumber: “Batavia Military Guide Map”, HQAFNEI Desember 1945.

Peta 2.5 Letak Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas di *Weltevreden*

Sumber: Peta Google Earth (diedit oleh Y.R. Priyantoko, 2009)

Kemajuan kawasan *Weltevreden* semakin pesat ketika *Gubernur Jendral Jacob Mossel* memerintahkan penggalian *Kali Lio* (saluran yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan parit memanjang yang sejajar dengan *De Grote Zuiderweg*) guna memudahkan sarana transportasi air dari dan menuju pasar. Selain itu, *Jacob Mossel* juga memerintahkan dibangunnya sebuah villa besar di tikungan Ciliwung sebagai tempat peristirahatan yang kemudian dibeli oleh penerusnya *Gubernur Jendral Petrus Albertus Van Der Parra* tahun 1767. Rumah ini selanjutnya dinamakan *Istana Weltevreden*.

2.2.1.6 Istana Merdeka dan Istana Negara

Istana Negara dan Istana Merdeka yang berada di satu kompleks di Jalan Merdeka, Jakarta, merupakan dua buah bangunan utama yang luasnya 6,8 hektar, dan terletak di antara Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Veteran

Pada awalnya di kompleks Istana di Jakarta ini hanya terdapat satu bangunan, yaitu Istana Negara (*Istana Rijswijk*). Gedung yang mulai dibangun 1796 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral *Pieter Gerardus van Overstraten* dan selesai 1804 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral *Johannes Siberg* ini semula merupakan rumah peristirahatan luar kota milik pengusaha Belanda, *J A Van Braam*. Kala itu kawasan yang belakangan dikenal dengan nama *Harmoni* memang merupakan lokasi paling bergengsi di *Batavia Baru*

Istana Merdeka yang menghadap ke Taman Monumen Nasional (Monas), (Jalan Medan Merdeka Utara) dan Istana Negara yang menghadap ke Sungai Ciliwung (Jalan Veteran). Sejajar dengan Istana Negara ada pula Bina Graha. Sedangkan di sayap Barat antara Istana Negara dan Istana Merdeka, ada Wisma Negara.

Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral *Louden* dan selesai pada tahun 1879 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral *Johan Willem van Landsbarger*. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 2.400 meter persegi, oleh arsitek *Drossares*. Istana Negara juga dikenal dengan nama Istana Gambir (Shihab, Alwi. 2004: 180).

Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, kedua istana tersebut merupakan tempat kerja dan tempat tinggal gubernur jenderal bila ada urusan di Batavia. Gubernur Jenderal Hindia Belanda lebih sering tinggal di Istana Bogor pada waktu itu. Terdapat 15 Gubernur Jenderal Belanda yang tinggal di Istana Merdeka (Shahab, Alwi. 2004: 181).

2.2.1.7 Balaikota (*Koningsplein Zuid*)

Balaikota yang dulu disebut sebagai *Koningsplein Zuid* berada di *Koningsplein South* (Jalan Medan Merdeka Selatan No.9 saat ini). Kantor tersebut digunakan sebagai Balaikota Batavia pada tahun 1919. Balaikota Batavia ini menempati lahan seluas 9585 m².



Foto 2.5 Balaikota *Gemeente* Batavia (Oleh: Y.R. Priyantoko, 2009)

Di sebelah Timur Balai Kota terdapat Istana Wakil Presiden yang juga merupakan gedung tua. Di sebelah kirinya terdapat Istana Merdeka Selatan dan Gedung Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia.

2.2.1.8 Stasiun *Weltevreden*

Stasiun *Weltevreden* tidak ditemukan lagi sisanya, saat ini dilokasi yang sama telah dibangun Stasiun Besar Gambir.

2.2.1.9 Pasar Gambir

Pasar Gambir sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1920-an. Letaknya di sekitar Stasiun *Koningsplein* (Jakarta Pusat) atau lapangan Monas. Peta *Batavia Military Guide Map*”, HQAFNEI Desember 1945 menunjukkan keberadaan pasar tersebut di sisi Barat daya *Koningsplein*. Pasar Gambir merupakan salah satu pasar terkenal dan termegah di Batavia pada zaman kolonial Belanda yang terdiri dari bangunan-bangunan stand yang berbentuk indah arsitekturnya, apalagi kalo pada malam hari. Di pasar itulah berbaur berbagai lapisan masyarakat dari segala penjuru Batavia.

Pasar tersebut bukan hanya merupakan tempat transaksi barang dagangan, melainkan juga arena rekreasi dan pertunjukan-pertunjukan kesenian, misalnya: sulap, musik dan lain sebagainya.

Pasar Gambir masa kini letaknya sudah dipindahkan ke sekitar arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, masih di Jakarta Pusat. Jadi pasar gambir adalah cikal bakal dari PRJ (Pekan Raya Jakarta).



Foto 2.6 Pasar Gambir 1921 dilihat dari atas (Sumber: KITLV,1921)

2.2.2 Cirebon

Sebagai kota yang berlatar belakang kesultanan, maka Cirebon memiliki keraton yang merupakan tempat tinggal sultan. Pada masa *Gemeente*, keraton Cirebon telah terpecah menjadi tiga, yaitu: Keraton Kasepuhan, keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Bila dikaitkan dengan sejarahnya maka perpecahan tersebut telah terjadi sejak tahun 1667. Pada tahun tersebut adalah

pembagian pertama terhadap Kesultanan Cirebon, dengan demikian terjadi pada masa penobatan tiga orang putra Panembahan Girilaya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Masing-masing kesultanan berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya (Rahardjo, 1998: 38)².

Suksesi para sultan selanjutnya pada umumnya berjalan lancar, sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV (1798-1803), saat terjadi perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan.

Keinginan Pangeran Raja Kanoman didukung oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan keluarnya *besluit* (surat keputusan) Gubernur-Jendral Hindia Belanda yang mengangkat Pangeran Raja Kanoman menjadi Sultan Carbon Kacirebonan tahun 1807 dengan pembatasan bahwa putra dan para penggantinya tidak berhak atas gelar sultan, cukup dengan gelar pangeran. Sejak itu di Kesultanan Cirebon bertambah satu penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan, pecahan dari Kesultanan Kanoman. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV yang lain bernama Sultan Anom Abusoleh Imamuddin (1803-1811). Semenjak itulah posisi Belanda menguat di Cirebon.

Setelah 2 kali terjadi perpecahan Kesultanan Cirebon yang melibatkan Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda pun semakin dalam ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga peranan dari keraton-keraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya semakin surut. Puncaknya terjadi pada tahun-tahun 1906 dan 1926, dimana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya *Gemeente Cheirebon* (Kota Cirebon), yang mencakup luas 1.100 Hektar, dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa (*Staatsblat*. 1906 No. 122 dan *Staatsblat*. 1926 No. 370). Tahun 1942, Kota Cirebon kembali diperluas menjadi 2.450 hektar. *Burgemeester* pertama yang memerintah di Cirebon adalah Y.H Johan (1920-1925).

Balaikota Cirebon didirikan di lokasi yang jauh dari keraton dan alun-alunnya, yaitu di daerah Kejaksaan tepatnya Jalan Siliwangi dekat dengan stasiun Cirebon. Alun-alun yang baru juga dibuat di daerah tersebut berdekatan dengan rumah dinas bupati Cirebon. Pusat pemerintahan kolonial di Cirebon terpisah dengan pemerintahan pribumi.

Peta 2.6 Kawasan Alun-alun Kejaksaan *Gemeente* Cirebon

Sumber: Peta *Hoofdplaats Cheribon* 1921 (Sumber: The Royal Tropical Institute, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

Universitas Indonesia

2.2.2.1 Alun-alun Kejaksaan

Alun-alun Kejaksaan terletak pada koordinat $6^{\circ}42'34.78''$ dan $108^{\circ}33'33.06''$. Luas alun-alun tersebut adalah 10816 m^2 , sebelah Barat berbatasan dengan Tajug Agung (Masjid At Taqwa saat ini), sebelah Utara berbatasan dengan Hotel Wilhelmina (sekarang sudah tidak ditemukan), sebelah Timur berbatasan dengan permukiman dan sebelah Selatan dengan Rumah Dinas Bupati Cirebon (Lihat Peta 2.5).

2.2.2.2 Rumah Dinas Bupati Cirebon

Rumah Dinas Bupati Cirebon berada di Jalan RA Kartini No 1 Kota Cirebon atau sebelah Selatan alun-alun kejaksaan. Bangunan tersebut hingga saat ini masih digunakan sebagai rumah tinggal bupati.

2.2.2.3 Balaikota Cirebon

Balaikota Cirebon terletak pada 235 m disebelah Utara alun-alun Kejaksaan. Balaikota (Staadhuis), atau disebut juga Balai Udang dibangun pada tahun 1927. Balaikota tersebut dirancang oleh J.J. Jiskoot, yang juga pada waktu itu merangkap dinas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cirebon pada tahun 1927. Delapan ekor udang di kedua "menara" nya menegaskan riwayat Cirebon sebagai kota udang. Alamatnya Jl. Siliwangi No.84 Cirebon, saat ini gedung tersebut berfungsi sebagai Kantor Walikota dan Pusat Pemerintahan Kota Cirebon.



Foto 2.7 Balaikota Cirebon (oleh: Y.R. Priyantoko, 2009)

2.2.2.4 Tajug Agung (Masjid At Taqwa)

Tajug Agung (Masjid Raya At-Taqwa) berkedudukan di Pusat Kota Cirebon, Jalan RA. Kartini No. 2 Cirebon atau sebelah Barat alun-alun. Bangunan yang terlihat saat ini merupakan bangunan baru. Tajug agung sebenarnya didirikan pada tahun 1918 dan baru diresmikan sebagai Masjid At Taqwa pada tahun 1963. Sisa bangunan lama sudah tidak ditemukan lagi, saat ini hampir semuanya merupakan bangunan baru.

2.2.2.5 Hotel Wilhelmina

Hotel Wilhelmina terletak di sebelah Utara alun-alun Kejaksaan yang saat ini tidak ditemukan lagi bangunannya. Sisa yang terlihat saat ini hanya berupa tanah kosong. Letak hotel tersebut tampak pada peta 2.5.

2.2.3 Tegal

Secara geografis kota Tegal terletak pada posisi $109^{\circ}08'$ - $109^{\circ}10'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}50'$ - $06^{\circ}53'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah yang relatif sempit bila dibandingkan dengan dengan wilayah sekitar yakni sebesar $39,68 \text{ Km}^2$ atau $0,11\%$ dari luas Provinsi Jawa Tengah, setelah ada penambahan dari sebagian wilayah Kabupaten Brebes.

Sejak tahun 1729 sampai tahun 1898, Tegal diperintah oleh residen sebagai kepala pemerintahan. Gewest atau daerah Tegal dengan kota Tegal sebagai Ibukota meliputi Pemalang dan Brebes. Pada tanggal 1 januari 1901, gewest dan bagian Tegal dihapuskan yang kemudian digabungkan dengan karesidenan pekalongan (Staatsblad 1900 No : 334).

Afdelling atau kabupaten Tegal luasnya hampir 600 Km^2 , terbagi menjadi 2 daerah pengawasan, yaitu: daerah pengawasan Tegal terdiri dari kawedanan Tegal dengan ibukota Mangkukusuman, Adiwerna, dan Suradadi, dan daerah pengawasan Procot meliputi kawedanan Slawi, Pangkah, Balapulung, Bumijawa dan Jatinegara, jumlah desa seluruhnya ada 386.

Kota Tegal dibentuk melalui ordonasi tahun 1906 menjadi *Gemeente* (*Ordonantie* tanggal 21 Februari 1906, *Staatsblad* 1906 No. 123 yang berlaku

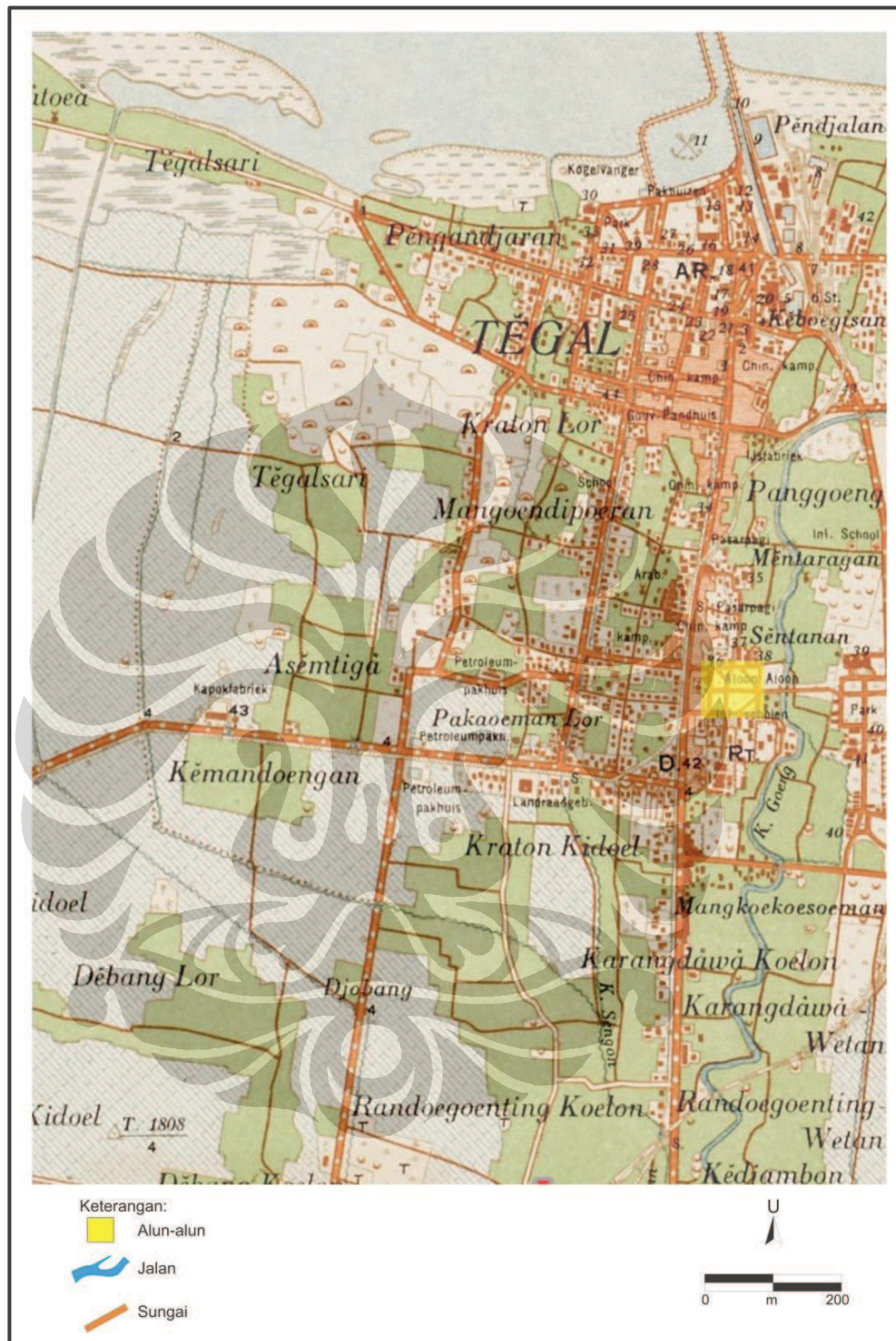
hingga pada tanggal 1 April 1906). Pada tanggal 1 April 1906 dilantiklah dewan kota Tegal yang pertama. Anggota-anggotanya terdiri dari 13 orang diangkat oleh G.G Van Hoogerdooff yang merupakan asisten residen Tegal bertindak sebagai ketua dewan.

Pada saat perubahan status *Gemeente* tersebut, Tegal tidak membuat pusat kotanya yang baru. Sehingga letak bangunan pemerintahannya masih berdekatan dengan alun-alun kota lamanya.

2.2.3.1 Alun-alun

Alun-alun Tegal berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 130 meter. Sisi melingkarnya ada disebelah timur. Di sebelah barat terdapat bangunan masjid agung yang menghadap ke timur. Hal tersebut merupakan peninggalan pra kolonial sesuai konsep kota-kota Islam.

Di sisi Selatan alun-alun terdapat bangunan Balaikota (saat ini merupakan bangunan baru). Sedangkan sisi Timur lurus dengan jalan langsung ke arah stasiun Tegal. Alun-alun tersebut sebagian besar telah berubah sehingga dapat dikenali hanya sebagai halaman masjid.

Peta 2.7 Letak Alun-alun *Gemeente Tegal*

Sumber: Peta *Java Res. Pekalongan (Spoeddruk) 1918 Blad V h/m (The Royal Tropical Institute, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)*

2.2.3.2 Masjid Agung Tegal

Masjid Agung Tegal sebenarnya dibangun saat pecahnya perang Jawa atau perang Diponegoro (1825-1830) oleh K.H. Abdul Aziz. Masjid ini pernah beberapa kali mengalami renovasi dan terakhir tahun 1927 (Zein, A.B, 1999: 261). Masjid tersebut berukuran 52 x 37 m² memiliki 2 bagian bangunan, yaitu sisi depan yang lebih kecil sebagai teras bangunan utama yang lebih besar. Sebagian bangunan yang ada sekarang merupakan bangunan baru.

2.2.3.3 Pendopo Tegal

Balaikota Tegal yang ada saat ini merupakan bangunan baru. Awalnya balaikota Tegal berada di bangunan yang saat ini menjadi gedung DPRD II Tegal. Sejak masa Hindia Belanda, balaikota Tegal menempati gedung tersebut. Sementara Balaikota yang sekarang dibangun tahun 1985 merupakan bekas lokasi pendopo alun-alun Tegal.

2.2.3.4 Stasiun Tegal

Stasiun Tegal berada di sebelah timur alun-alun kota Tegal. Stasiun Tegal mulai dibangun pada tahun 1885 sebagai stasiun trem JSM (*Java Spoorweg Maatschappij*). Pada tahun 1897, Stasiun Tegal dibeli oleh maskapai perkeretaapian SCS (*Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij*) dan stasiun dilengkapi dengan atap besar yang berbahan kayu yang mengatapi tiga sepur (jalur). Pada tahun 1918, sebagian dari bangunan direnovasi berdasarkan karya arsitek Henri Maclaine Pont (1885-1971) tetapi atap buatan tahun 1897 tidak diubah banyak.

2.2.4 Pekalongan

Staatsblad Nomor 124 Tahun 1906 mengatur tentang desentralisasi dengan pemisahan keuangan untuk ibu kota Pekalongan dari keuangan umum pemerintah Hindia Belanda. *Staatsblad* tersebut memuat 9 pasal yang merupakan dasar hukum pembentukan Kota Pekalongan. Di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa melaksanakan ketentuan dari ayat pertama pasal 68a dari peraturan Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dijalankan di atas sebagian dari

Karesidenan Pekalongan dengan Pekalongan sebagai ibu kota dan bagian daerah ini disebut *Gemeente* Pekalongan, kemudian dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa untuk *Gemeente* (Kota Pekalongan) disediakan dari keuangan kolonial sebesar F. 12.100 (dua belas ribu seratus gulden) setiap tahun.

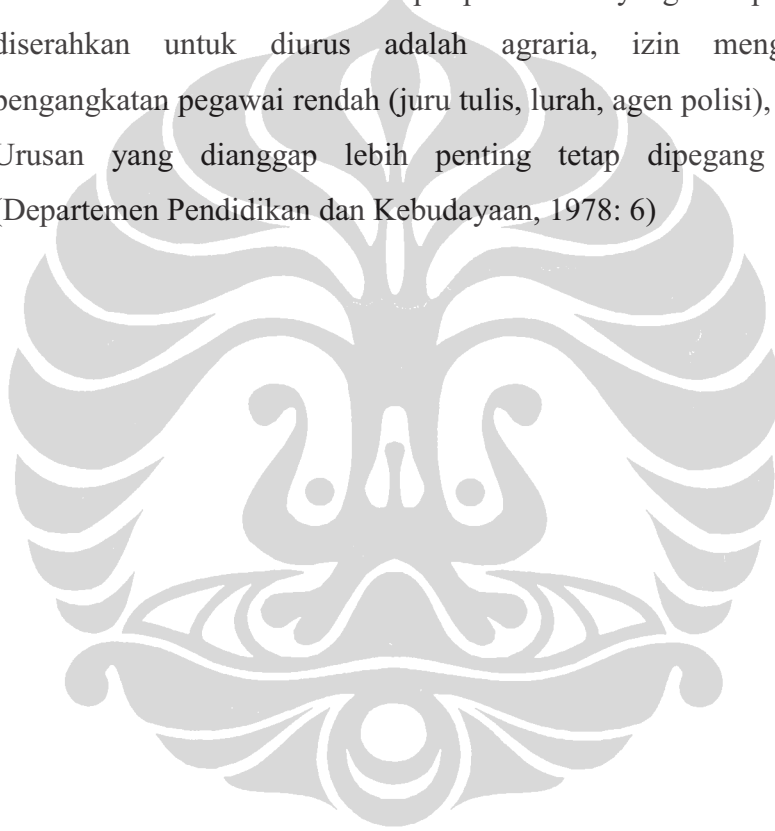
Pasal 3 menyebutkan di dalam Kota Pekalongan tidak disediakan lagi keuangan dari pemerintah Hindia Belanda untuk keperluan : a. pemeliharaan, perbaikan, pembaharuan dan pembangunan dari jalan-jalan umum dengan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk di dalamnya jalan kampung tanaman pohon-pohon, pembuatan jalan tebing, jalan dan selokan-selokan, sumursumur, batu kilometer, papan nama, jembatan-jembatan kaimur-kaimur, dinding beton di pinggir sungai, parit-parit pembuangan air, saluran-saluran parit untuk menyiram riool, pekerjaan-pekerjaan untuk memperoleh atau membagi air minum, air pencuci rumah potong hewan dan los pasar; b. Pemadam kebakaran; c. pembuatan tanah-tanah kuburan. Pasal 4 menyebutkan bahwa kepada *Gemeente* Pekalongan diberikan hak penguasaan atas unsur-unsur yang berada di dalam *Gemeente* yang dimaksud pasal 3, selanjutnya rumah pemadam kebakaran yang semula milik Hindia Belanda yang tercatat *Gemeente* Pekalongan, demikianlah yang berada di luar *Gemeente* yang dimaksud adalah kuburan Tionghoa di Kuripan dengan kewajiban supaya urusan-urusan itu tetap dipergunakan sebagaimana hukumnya sekarang. Pasal 4 menyebutkan kepada *Gemeente* Pekalongan diberi hak untuk menguasai unsur-unsur dalam pasal 3 tersebut di atas dan rumah pemadam kebakaran serta kuburan di Kuripan.

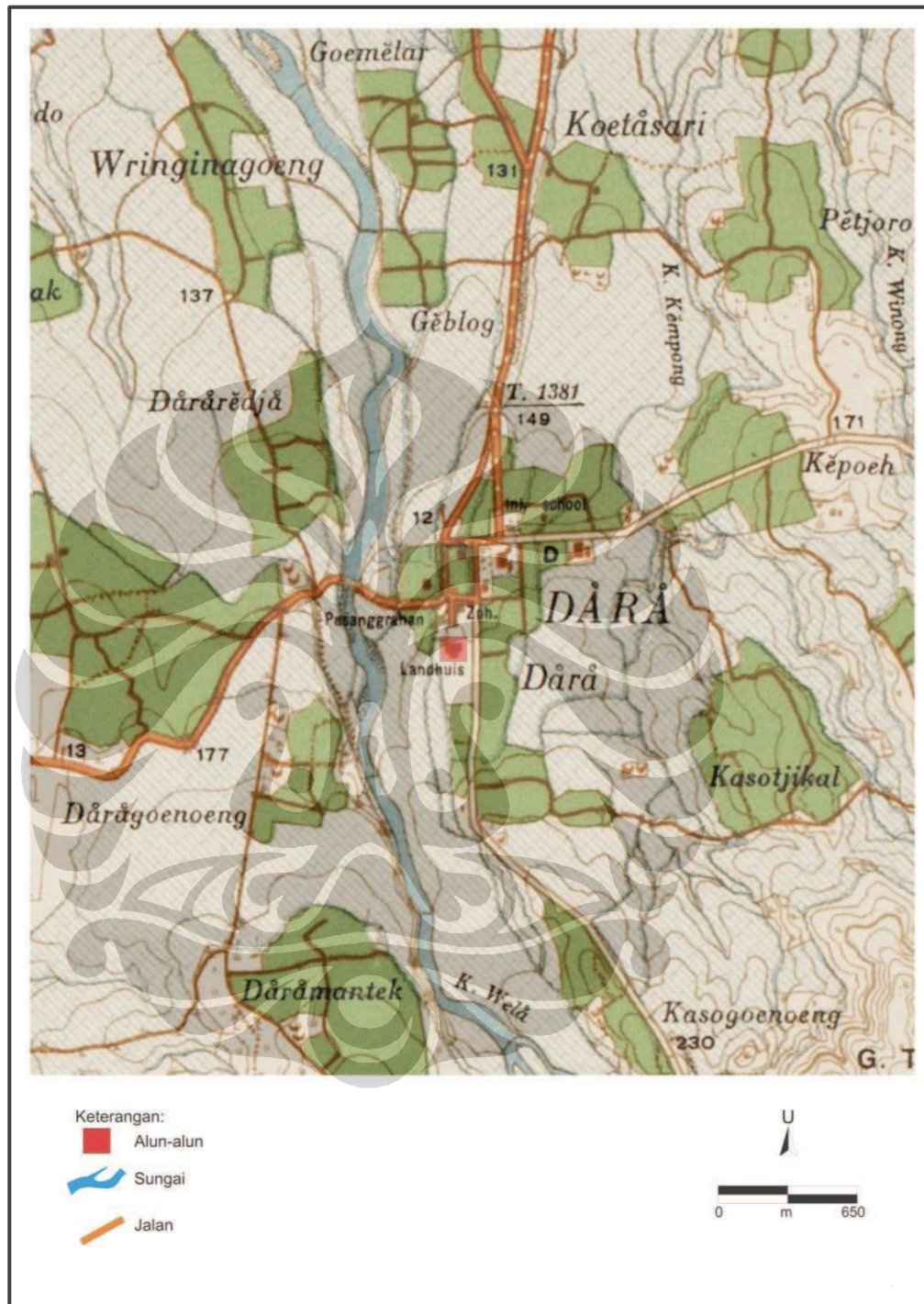
Pasal 5 menyebutkan bahwa semprotan dan alat pemadam kebakaran yang semula milik pemerintah Hindia Belanda diserahkan pada *Gemeente* Pekalongan dan Gubernur Jenderal menentukan nama-nama alat-alat inventaris tersebut dari milik Irigasi Karesidenan Pekalongan diserahkan tanpa ganti rugi.

Pasal 6 menyebutkan untuk *Gemeente* Pekalongan ditetapkan sebuah Dewan Kota Pekalongan dengan jumlah anggota 13 orang terdiri dari 8 orang Eropa atau yang dipersamakan dengan mereka (*gelijkgestelden*), 3 orang Bumi Putra dan 2 Orang Timur Asing dan Kepala pemerintahannya adalah dari Ketua dewan Kota Pekalongan tersebut. Pasal 7 menyebutkan membuat Peraturan Daerah dalam wilayah *Gemeente* Pekalongan. Pasal 8 *Gemeente* Pekalongan mengawasi

penggunaan kuburan umum yang baru. Pasal 9 menyebutkan bahwa ordonansi (peraturan) Gubernur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1906.

Staatsblad Nomor 124 Tahun 1906 semua diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Aspek lain dari politik etis yang harus dilaksanakan adalah *ontvoogding* (pembebasan perwalian/pendewasaan) bagi pejabat daerah pribumi. Tahun 1918 dikeluarkan *Ontvoogding Ordonnantie* 1918 (undang-undang tentang pembebasan perwalian). Sesuai dengan undang-undang ini pimpinan daerah kabupaten telah diserahkan kepada orang-orang Indonesia, yakni bupati dengan ketentuan bahwa ia telah mendapat pendidikan yang cukup. Bidang-bidang yang diserahkan untuk diurus adalah agraria, izin mengadakan keramaian, pengangkatan pegawai rendah (juru tulis, lurah, agen polisi), dan penetapan pajak. Urusan yang dianggap lebih penting tetap dipegang oleh orang Eropa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978: 6)



Peta 2.8 Letak Alun-alun *Gemeente* Pekalongan

Sumber: Peta *Java Res. Pekalongan 1918 Blad XIVe* (The Royal Tropical Institute, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

Kota *gemeente* Pekalongan memiliki sebuah alun-alun yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan Pendopo, Masjid, Pasar dan sebagainya. Letak dan bentuk alun-alun tersebut terlihat pada peta 2.7:

2.2.4.1 Alun-alun

Alun-alun pekalongan pada masa *gemeente* berada di sebelah Barat alun-alun saat ini atau di lokasi sekitar masjid tepatnya pada koordinat $6^{\circ}53'26''$ LS dan $109^{\circ}40'34''$ BT atau sebelah Selatan Masjid Jami Pekalongan. Luas alun-alun tersebut adalah 1340 m^2 berbentuk persegi panjang yang memanjang dari Selatan ke Utara (lihat peta 2.8). Alun-alun tersebut sekaligus adalah halaman masjid Jami Pekalongan.

2.2.4.2 Balaikota Pekalongan

Balaikota Pekalongan terletak di daerah Bundaran Jatayu sekitaran Jalan Diponegoro, Pekalongan. Bangunan tersebut saat ini digunakan sebagai Museum batik Pekalongan. Gedung tersebut telah ada sebelum masa *Gemeente*.

2.2.4.3 Masjid Agung Jami Pekalongan

Masjid Jami Pekalongan berada di sisi Utara Alun-alun Pekalongan. Bagian Masjid tersebut yang dibangun pertama kali merupakan inti dari masjid sekarang ini. Dibatasi sembilan pintu besar dengan 12 jendela besar, dengan ukuran luas 35 meter persegi. Bagian inti dalam masjid dilengkapi dengan 1 mihrab (ruang imam), 1 kubah untuk khatib.

Pada 3 Juni 1907, dibangunlah kubah di Selatan mihrab untuk shalat bupati Kiai Adipati Aryonotodirjo. Penyempurnaan berikutnya dimulai 1 Juni 1927 berupa perluasan masjid, berupa pembangunan serambi/pendapa depan dan samping (Utara dan Selatan). Pada tahun 1933 dibangun sebuah menara setinggi 27 meter berdiri megah menjulang di sisi Utara halaman masjid Jami'.

2.2.4.4 Pendopo

Pendopo kota Pekalongan berada di Timur Alun-alun masjid agung atau Selatan alun-laun baru kota. Pendopo tersebut berbentuk bangunan limasan

Universitas Indonesia

(memiliki atap berbentuk limas) dan memanjang dari Utara ke Selatan. Bangunan tersebut menempati tanah seluas 13.520 m².

2.2.5 Semarang

Pada tahun 1906, Semarang ditetapkan menjadi *Gemeente* (Kotapraja) berdasarkan Statsblad 1905 No. 137. Penetapan ini berarti sebagian kekuasaan dan wewenang pemerintah di Batavia di desentralisasikan kepada dewan-dewan perwakilan daerah sehingga konsekwensinya Semarang mempunyai hak otonomi dan kewajiban yang harus dipenuhi (Dewi Yulianti, 1997: 118). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh *Gemeente* Semarang dalam rangka pelimpahan wewenang tersebut adalah membuat pemukiman baru dengan konsep *garden city* di Selatan Kota Semarang atau tepatnya di Candi Baru Semarang. Pembuatan pemukiman Candi Baru Semarang oleh *Gemeente* tersebut disebabkan oleh semakin padatnya penduduk Kota Semarang yang menyebabkan munculnya permasalahan kota seperti kepadatan penduduk, ketidakteraturan tata ruang kota, sarana dan prasarana kebersihan yang tidak memenuhi persyaratan kota, serta menurunnya kualitas lingkungan sehingga menimbulkan wabah penyakit dan banjir (Hartono Kasmidi, 1985: 15).

Pemilihan daerah bukit Candi sebagai pemukiman yang baru dikarenakan udaranya yang sejuk dan bersih, pemandangan alam yang menghadap ke laut dan daerah tersebut belum tersentuh urbanisasi. Pembuatan pemukiman di Candi Baru Semarang mulai dilaksanakan pada tahun 1916 oleh Ir. Hernan Thomas Karsten dan ahli-ahli setempat. Pemukiman Candi Baru terhenti pengembangannya pada tahun 1942, pada saat Jepang menguasai Indonesia (Sri Narni, 1995: 35).

Peta 2.9 Letak Alun-alun *Gemeente Semarang*

Sumber: Peta *Kaart van Semarang 1935* (*The Royal Tropical Institute*, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

2.2.5.1 Alun-alun

Alun-alun Semarang hingga masa *Gemeente* tersebut terletak pada halaman masjid Kauman, hal tersebut didasarkan pada temuan berdasarkan foto tahun 1935 milik KITLV dan peta Semarang tahun yang sama milik *The Royal Tropical Institute* yang memperlihatkan foto alun-alun Semarang dengan latar belakang Masjid Kauman Semarang.

Pergeseran fungsi dari alun-alun ini di mulai sejak tahun 1938, Alun-alun Semarang dipenggal pada sisi timur oleh Pemerintahan Kolonial Belanda untuk di gunakan sebagai Pasar Johar untuk menggantikan pusat perdagangan yang ada sebelumnya di bawah pohon Johar.



Foto 2.8 Alun-alun dengan latar belakang Masjid Kauman Semarang (Sumber: KITLV, 1935)

2.2.5.2 Masjid Kauman Semarang

Masjid Agung Semarang atau yang sering disebut juga Masjid Kauman, merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Jawa. Letak masjid ini yaitu berada di sebelah pasar Johar Semarang.



Foto 2.9 Masjid Kauman Semarang (Oleh: Andy, 2009)

Masjid Besar Kauman didirikan tahun 1750 yang diperoleh dari prasasti berbahasa Belanda yang ditulis di bagian depan Masjid. Prasasti itu sendiri diukir diatas batu yang kemudian di satukan(ditanam) di tembok gerbang masjid, tulisannya pun masih sangat jelas terbaca walaupun sudah usang dimakan usia. Hal ini sangat menarik karena bila dianalisis kemungkinan masjid ini adalah masjid besar zamannya, yang banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, hal itu menandakan kalau dulu Semarang adalah kota besar dan kota pelabuhan yang cukup maju. Pusat kota Semarang sendiri dulunya adalah di kawasan Kota Lama.

2.2.5.3 Pasar Johar

Pasar Johar selesai didirikan pada tahun 1939. Arsiteknya adalah Thomas Karsten, seorang arsitek terkenal pada masanya. Menurut sumber resmi, pada tahun 1865 di lokasi tersebut terdapat sejumlah 240 buah dasaran --suatu jumlah yang cukup besar untuk ukuran waktu itu. Karena itu, untuk mengantisipasi perkembangannya, pemerintah membuka *loos* penampung pedagang-pedagang dengan biaya sebesar f 1.800, yang berhasil ditutup dari cukai para pedagang. Pada tahun 1920 *loos-loos* itu ditambah lagi, sementara gedung penjara yang berada di dekatnya dibongkar. Di zaman Republik, tahun 1955 Pasar Johar diperluas dan dibuat bertingkat dua.



Foto 2.10 Pasar Johar Semarang (Oleh: Andy, 2009)

2.2.5.4 Kantor Pos

Bangunan kantor pos Semarang didirikan bersamaan dengan kantor telegraf Semarang yaitu tahun 1907. Bangunan tersebut berukuran 50 x 24 m² menghadap ke arah Barat. Bentuk bangunan memperlihatkan adanya pengaruh arsitektur kolonial.



Foto 2.11 Kantor Pos Semarang (Oleh: Andy, 2009)

2.2.6 Surabaya

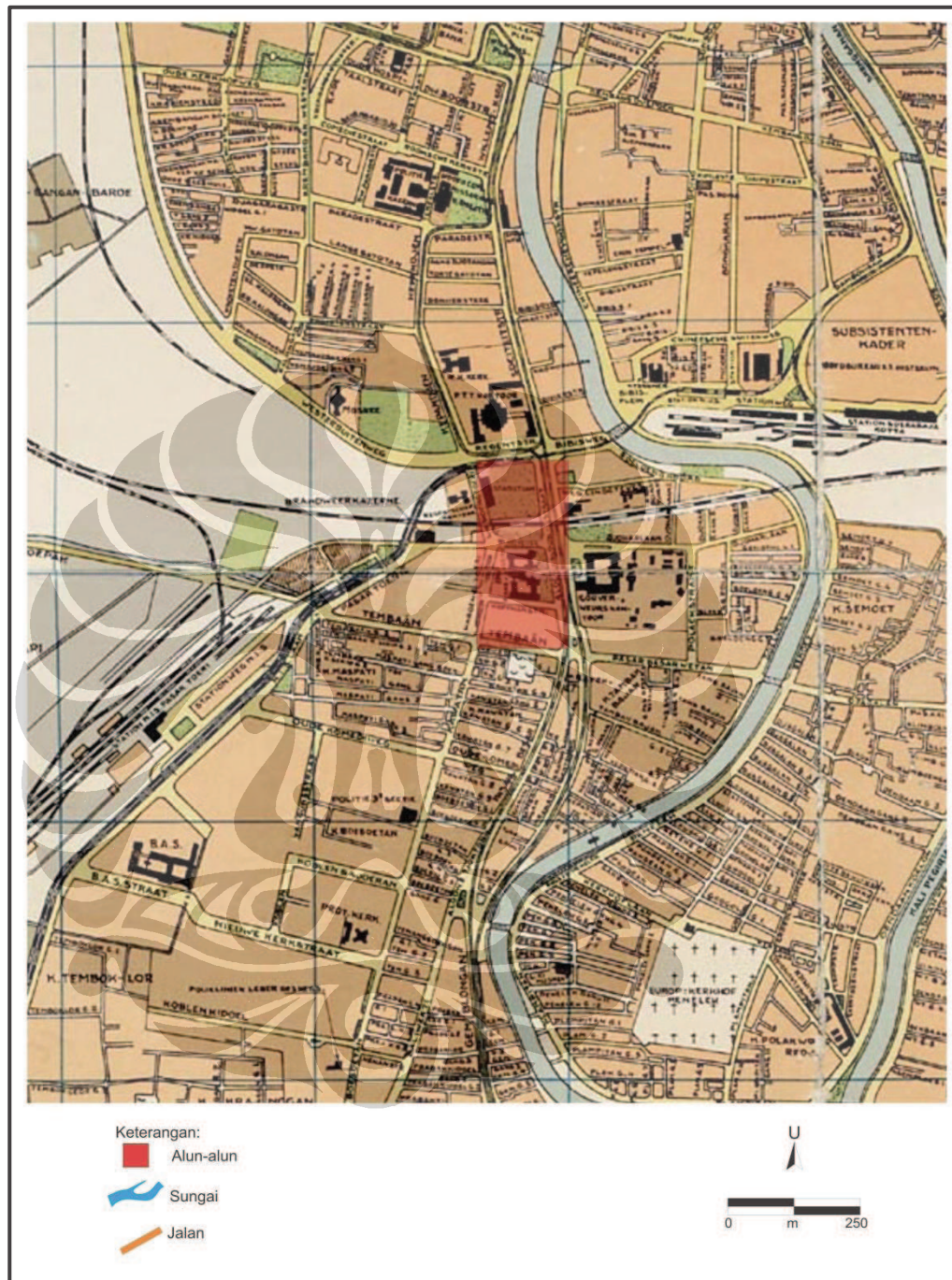
Pada tanggal 1 April 1906 (Staatsblad 1906 No. 149), pemerintah Belanda memisahkan wilayah Kabupaten Surabaya menjadi dua sistem organisasi pemerintahan, yaitu Kabupaten Surabaya dan *Gemeente* Surabaya. Meskipun begitu, pusat pemerintahan kabupaten (kantor bupati) masih tetap menempati wilayah *Gemeente* Surabaya.

Luas daerah yang menjadi wilayah kekuasaan *Gemeente* (kotapraja) Surabaya pada waktu itu adalah seluas lebih kurang ada 103 Km², dengan Kepala Daerah Kotapraja bertindak seorang Asisten Residen yang merangkap pula sebagai Asisten Residen dari Kabupaten (afdeling) Surabaya sekaligus bertindak sebagai ketua Dewan Kotapraja (*Gemeenteraad*). Jadi pada saat diresmikannya Surabaya menjadi Kotapraja itu, belum ada jabatan Walikota (*Burgemeester*). Jabatan ini baru ada mulai tanggal 21 Agustus 1916.

Dewan Kotapraja yang pertama-tama terbentuk pada tahun 1906 itu terdiri dari 23 orang anggota, yaitu 15 orang Eropa, 5 orang Indonesia dan 3 orang Timur asing (*vreemde oosterlingen*). Gedung Kotapraja Surabaya yang pertama-tama merupakan gedung sewaan yang terletak di Jalan Gemblongan (di seberang gedung PLN). Gedung milik swasta itu tiap bulan disewa dengan harga f 400,-. Kemudian berhubung dengan adanya perluasan-perluasan, maka diperlukan gedung yang agak besar, dan disewalah pula sebuah gedung yang terletak di Jalan Kadungdoro (tahun 1970 ditempati oleh Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur).

Di samping itu masih dipergunakan pula sebidang tanah yang terletak di Semut, di mana dibangun beberapa gedung untuk keperluan gudang-gudang, sebagai tempat penyimpanan barang-barang bahan dari bagian Perusahaan Air. Adapun gedung Kotapraja yang sekarang berdiri memangku Taman Surya, baru diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 1923. Walikota pertama untuk Surabaya dilantik pada tanggal 21 Agustus 1916, yaitu Mr. A. Meyroos. Ia menjadi Walikota Surabaya sampai tahun 1921.

Peta 2.10 Letak Alun-alun Kapanjen Surabaya



Sumber: Peta *Gemeente Soerabaja* 1934 (*The Royal Tropical Institute*, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

2.2.6.1 Gereja Katolik Roma (*Roman Catholic Church*)

Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria berada di Jalan Kepanjen, Surabaya, bangunan religius ini berdampingan dengan gedung SMA Katolik Frateran Surabaya. Sebelum dibangunnya Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria ini, sudah dibangun sebuah Gereja Katolik pertama di Surabaya bergaya Eropa yang terletak dipojok jalan Kepanjen dan Kebonrojo. Pada awalnya dua orang pastor pada tanggal 12 Juli 1810, Hendricus Waanders dan Phillipus Wedding datang dari Belanda dengan kapal ke Surabaya. Pastor Wedding kemudian bertugas ke Batavia sementara Pastor Waanders menetap di Surabaya.

Pastor Waanders sering mengadakan misa untuk umat Katolik di Surabaya. Pada tahun 1822, gereja tersebut dibangun di pojok *Roomsche Kerkstraat/Komedie weg* (Kepanjen/Kebonrojo). Namun belakangan gereja Katolik pertama ini dipindah ke gedung baru di sebelah Utaranya, tepatnya di jalan Kepanjen Kelurahan Krembangan Selatan di wilayah Surabaya Utara. Hal ini dikarenakan gereja yang lama rusak.



Foto 2.12 Gereja Katolik Roma Kepanjen, Surabaya (Oleh: Ridwan, 2008)

2.2.6.2 Gedung Bank Mandiri (*Lindeteves Stokvis*)

Gedung Bank Mandiri berada di Jl. Pahlawan adalah Gedung "Lindeteves Stokvis" dibangun pada th 1911. Perancangnya adalah Biro Arsitek Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers dari Batavia (Jakarta). dengan menara "Jam"nya yang sangat tinggi, gedung tersebut menjadi "Landmark" bagi lingkungan sekitarnya. Disebut Gedung Lindeteves Stokvis, karena gedung ini digunakan sebagai Pabrik Mesin Hindia Belanda.



Foto 2.13 Gedung Bank Mandiri Surabaya (Oleh: Y.R. Priyantoko, 2008)

2.2.6.3 Kantor Pengadilan

Gedung *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) di Zaman Belanda, di Jalan Pahlawan (*Alun-alun Straat*) pada perayaan HUT Ratu Wilhelmina tanggal 31 Agustus 1935. Ada acara karnaval dan pawai yang disaksikan rakyat yang memenuhi sepanjang jalan, *viaduk* jalan-jembatan pelintasan kereta api, bahkan sampai ke puncak gedung kantor Gubernur Jawa Timur di seberangnya. Pada zaman Jepang, gedung ini berubah fungsi menjadi Markas Polisi Militer (*Kenpetai*) dan sekarang sudah hancur. Di atas lahan ini didirikan Tugu Pahlawan untuk memperingati peristiwa 10 November 1945. Tugu Pahlawan ini diresmikan oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno tanggal 10 November 1952 dan di bawahnya dibangun pula Museum (bawah tanah) Tugu Pahlawan yang mengoleksi berbagai peninggalan masa perjuangan tahun 1945.

2.2.6.4 Kantor Pos dan Telegraf

Gedung tersebut dibangun pada th. 1878. Setelah Kantor Pos Besar Surabaya dipindahkan ke Jl. Kebonrojo pada th.1920, fungsinya berubah menjadi gedung BAAI harta peninggalan Jawa Timur.

2.2.6.5 Kantor Gubernur

Sepanjang sejarahnya, sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini Kantor Gubernur Jawa Timur telah mengalami perpindahan lokasi beberapa kali. Di jaman pemerintahan Belanda, pada awalnya Kantor Gubernur bertempat di sebuah

gedung di Jalan Jembatan Merah, Surabaya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1929 dibangunlah sebuah kantor baru yang berlokasi di Jalan Pahlawan 18 (sekarang Jalan Pahlawan 110). Pembangunan gedung tersebut selesai pada tahun 1931, seiring dengan itu kegiatan pemerintahan pun dipindahkan ke kantor baru yang kemudian difungsikan sebagai *Gouverneurs Kantoor* (Kantor Gubernur), *Residensi Kantoor* (Kantor Residen), dan CKC. Kantor Gubernur yang berlokasi di Jalan Pahlawan ini (sekarang dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur lama) berdiri di atas sebidang tanah seluas 11.612 m. Bangunan pokoknya terdiri atas 2 (dua) lantai bergaya Roma dengan luas bangunan 7.865 m yang dimodernisasi.



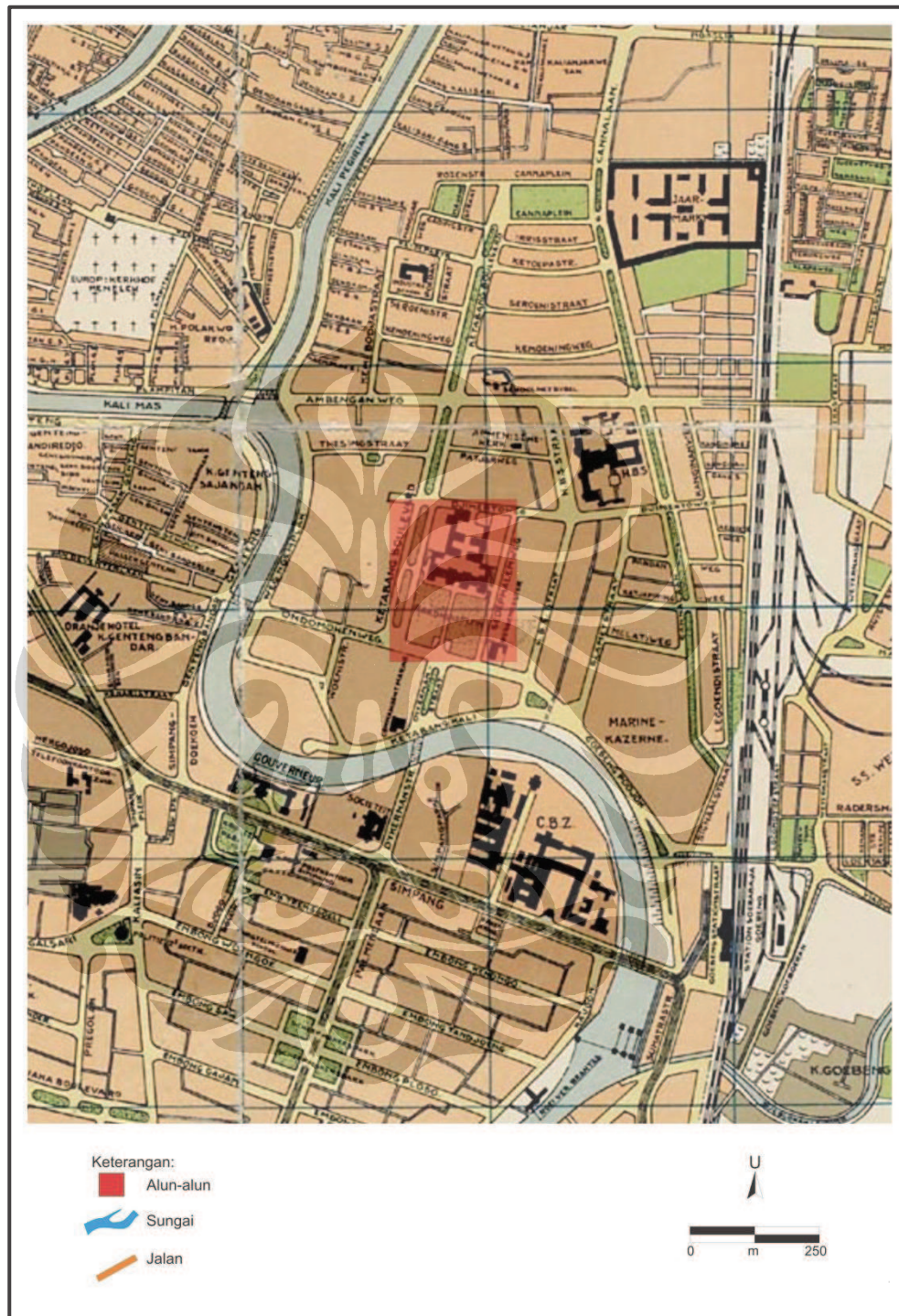
Foto 2.14 Kantor Gubernur dan Karesidenan (Oleh: Ridwan, 2008)

2.2.6.6 Alun-alun Ketabang dan Balaikota Surabaya

Gedung utama Balai Kota di Taman Surya di daerah Ketabang itu mulai dibangun pada tahun 1923 dan mulai ditempati pada tahun 1927. Arsiteknya ialah C. Citroen dan pelaksanaannya H.V. Hollandshe Beton Mij. Biaya seluruhnya, termasuk perlengkapan dan lain-lainnya, menghabiskan dana sekitar 1000 gulden.

Ukuran gedung utama memiliki panjang 102 m dan lebar 19 m. Konstruksinya terdiri dari tiang-tiang pancang beton bertulang yang ditanam, sedangkan dinding-dindingnya diisi dengan bata dan semen. Atapnya terbuat dari rangka besi dan ditutup dengan sirap, Belakangan atap ini kemudian diganti dengan genteng.

Peta 2.11 Letak Alun-alun Ketabang Surabaya



Sumber: Peta *Gemeente Soerabaja* 1934 (*The Royal Tropical Institute*, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

Universitas Indonesia

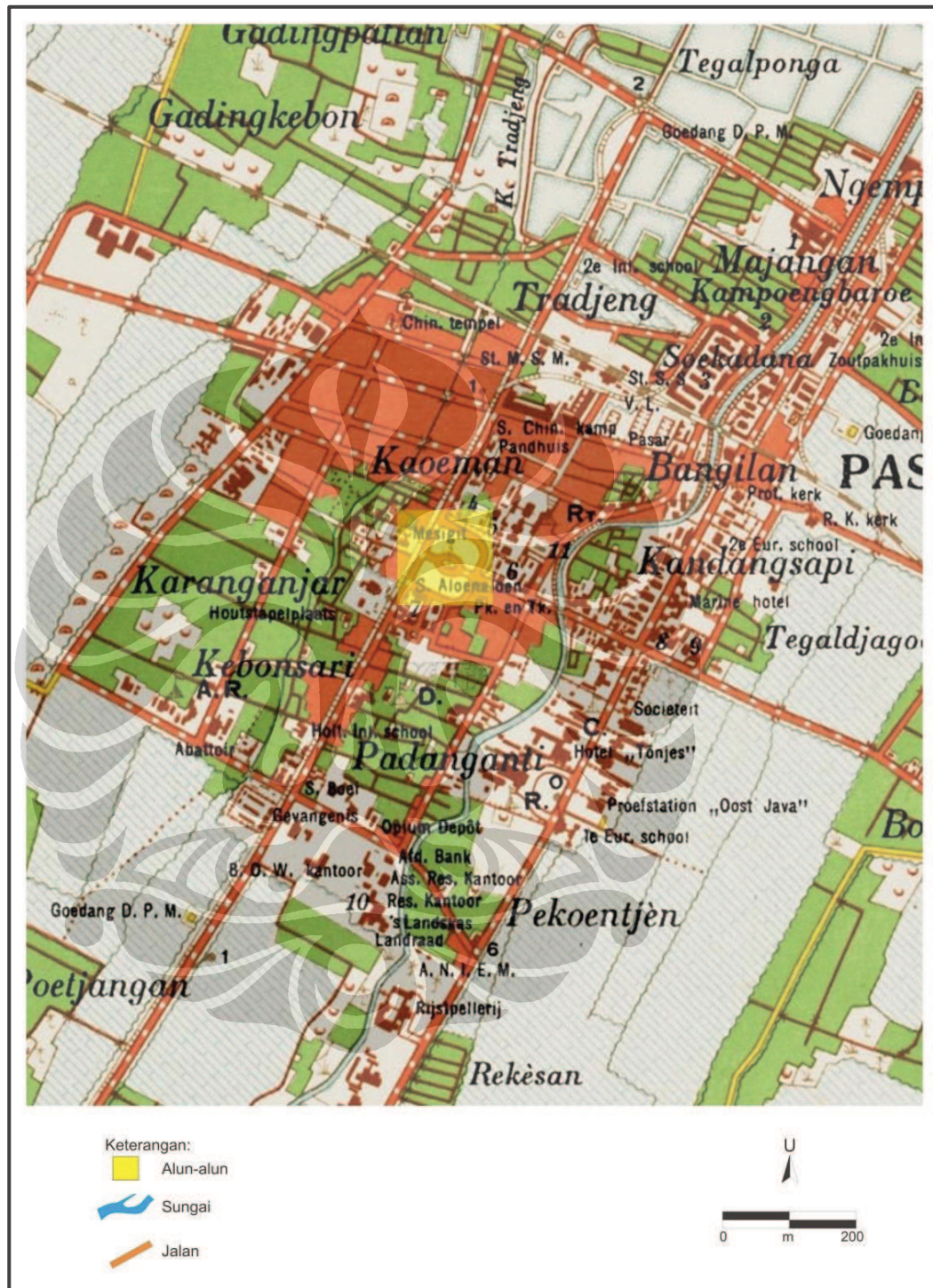
2.2.7 Pasuruan

Pemerintahan Pasuruan telah ada sejak Kiai Dermoyudho I hingga dibentuknya Residen Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan *Gemeente* Pasuruan terbentuk berdasarkan *Staatsblad* 1918 No.320 dengan nama *Stads Gemeente Van Pasoeroean* pada tanggal 20 Juni 1918. Meskipun begitu, baru tahun 1929 Pasuruan memiliki *Burgemeester*, yaitu: Mr. H.E. Boissevain (1929-1935), W.C. Krijgsman (1935-1936), Dr. C.G.E. de Jong (1936-1939), L.A. Busselaar (1939-1941), F. van Mourik (1941-1942).

2.2.7.1 Alun-alun

Alun-alun Pasuruan terletak ditengah kota Pasuruan tepatnya pada koordinat $7^{\circ}38'30''$ LS atau $122^{\circ}54'23''$ BT. Luas alun-alun tersebut adalah 19.404 m^2 dengan denah segi empat memanjang Barat Daya-Timur Laut.

Disebelah barat alun-alun terdapat masjid agung pasuruan yang menandakan alun-alun tersebut merupakan bagian dari halaman masjid dan merupakan konsep alun-alun lama. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan kantor pos dan menara air. Sedangkan di sebelah Timur dan Selatan merupakan permukiman.

Peta 2.12 Letak Alun-alun *Gemeente* Pasuruan

Sumber: Peta *Java Res. Pasoeroean 1935 Blad LXXo* (The Royal Tropical Institute, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

2.2.7.2 Kantor Pos

Kantor Pos Pasuruan berada di Jalan Alun-alun No. 1 Pasuruan, tepatnya berada pada 20 m sebelah Utara alun-alun kota Pasuruan. Bangunan tersebut berukuran 40x30 m² menghadap ke arah Barat.



Foto 2.15 Kantor Pos Pasuruan (Oleh: Ridwan, 2009)

2.2.7.3 Masjid Agung Pasuruan

Masjid Agung Pasuruan atau disebut Masjid Al Anwar dibangun oleh Adipati Nitidiningrat (1751-1799) pada masa kekuasaannya di Pasuruan. Masjid tersebut berada di sebelah Barat Alun-alun Pasuruan. Ornamen masjid berupa kaligrafi Arab dalam bentuk-geometris, hampir semua ornamen di dinding asli sejak saat didirikannya.



Foto 2.16 Masjid Agung Pasuruan (Oleh: Ridwan, 2009)

Di bagian belakang masjid terdapat makam ulama dan tokoh-tokoh penting, antara lain makam Adipati Nitiadiningrat serta makam KH. Abdul Hamid seorang tokoh pendiri Pondok Pesantren Salafiyah.

2.2.7.4 Menara Air

Menara air Pasuruan terletak di sebelah utara alun-alun pasuruan. Menara air tersebut merupakan fasilitas yang biasa di bangun di tengah kota dekat dengan alun-alun pada masa kolonial.



Foto 2.17 Menara Air Pasuruan (Oleh: Ridwan, 2009)

Berkaitan dengan pemenuhan air bagi kota, terdapat sumber air di Desa Umbulan, Kec. Winongan Kab. Pasuruan. Mata air ini ditemukan Belanda pada 1916. Pada 1917 berikutnya sumber tersebut dikelola *Inlando Water Bedrijf*. Tentu saja air yang melimpah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda di Pasuruan dan Surabaya.

Masyarakat kota Pasuruan menggunakan 65 liter/detik, dan masyarakat Kota Surabaya menggunakan 110 liter/detik. Meski sisa airnya masih melimpah, penduduk asli di sekitar sumber itu tidak diizinkan memanfatkannya. Sisa air tersebut hanya dibiarkan tumpah ke laut melalui Sungai Rejoso.

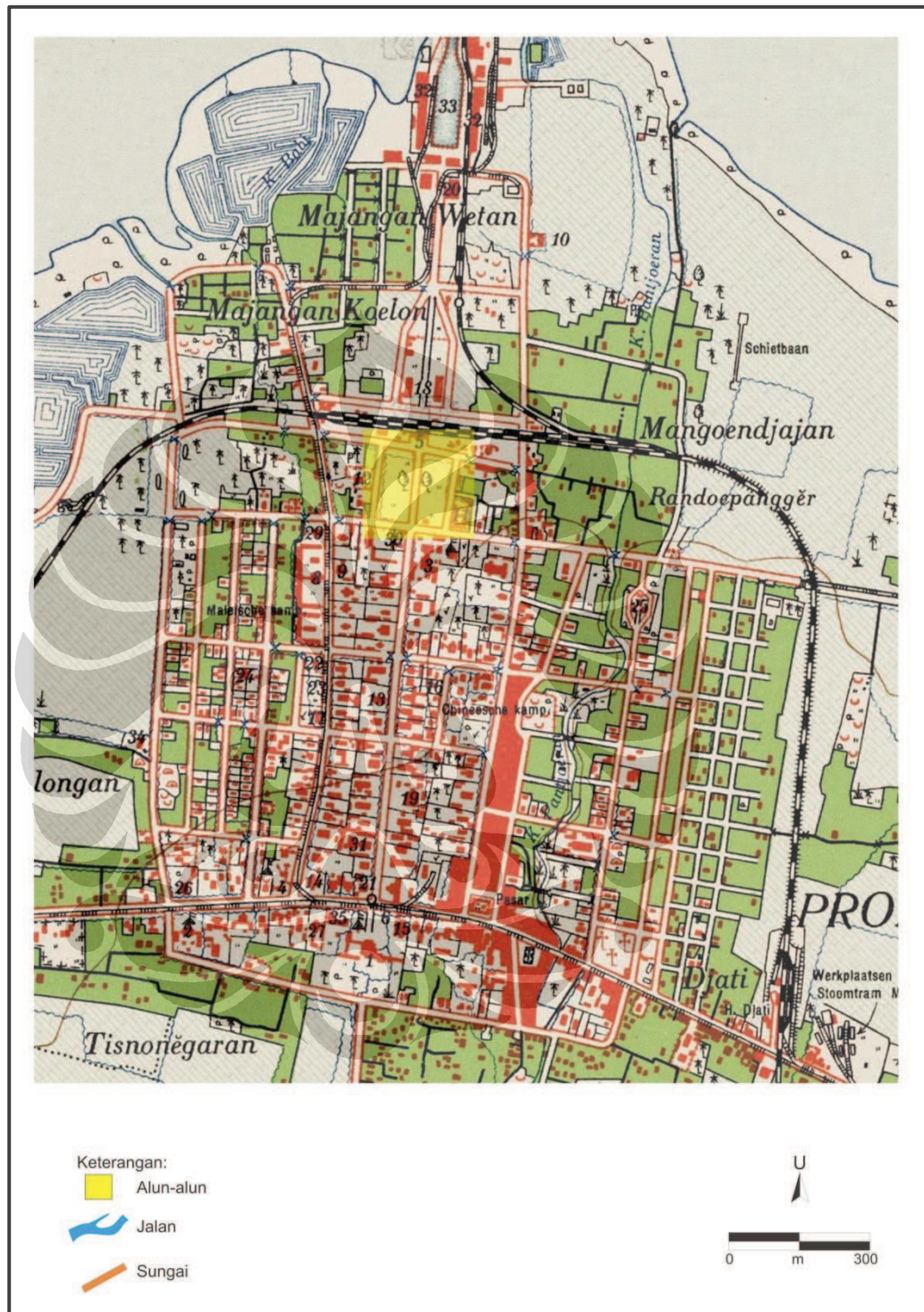
Sumber air Umbulan baru diserahkan kepada Stads Gemeente van Pasoeroean pada 1940 dengan pertimbangan karena kota Pasuruan waktu itu merupakan kota bandar yang amat penting bagi perdagangan dan industri.

Pemanfaatan sumber air Umbulan kemudian berkembang menjangkau masyarakat Kota Pasuruan dan sekitarnya.

2.2.8 Probolinggo

Pemerintah Hindia Belanda membentuk “*Gemeente Probolinggo*” (Kota Probolinggo) pada tanggal 1 Juli 1918 (Berdasarkan *Staatsblad* 322-1918). Tanggal 1 Juli 1918 kemudian dijadikan sebagai hari jadinya Pemerintah Kota Probolinggo. Tahun 1926 *Gemeente* diubah menjadi *Stads Gemeente* berdasarkan *Staatsblad* 365 Tahun 1926. *Gemeente Probolinggo* selanjutnya menjadi Kota Probolinggo berdasarkan Ordonansi pembentukan kota (*Staatsblad* . 1928 No.500).

Sejak tahun 1918 *Gemeente Probolinggo* dipegang/dijabat oleh seorang Asisten Residen (di bawah Karesidenan Pasuruan). Baru tahun 1928 diangkat seorang *Burgemeester* (Walikota) sebagai kepala daerah yang berkuasa penuh (Handinoto, 1997: 4). Pada tahun 1929 Probolinggo pernah menjadi Ibukota Karesidenan Probolinggo. *Burgemeester* (Walikota) Probolinggo pertama ialah Tn. Meyer. Tahun 1935 pangkat *Burgemeester* untuk *Stads Gemeente Probolinggo* dihapus dan sebagai pejabat diangkat Asisten Residen yang berkedudukan di Probolinggo (1935-1942) yaitu LA. de Graaf dan diganti L. Noe.

Peta 2.13 Letak Alun-alun *Gemeente* Probolinggo

Sumber : *Peta Java Res. Pasoeroean (Oude Res. Probolinggo) 1914 Blad H.III en IV.* (The Royal Tropical Institute, diolah oleh: Yoki R.P, 2009)

Hingga tahun 1940 morfologi kota Probolinggo hampir tidak berkembang. Tambahan yang penting antara th. 1880 an dibuat daerah hunian bagi penduduk setempat disebelah Timur kota (kurang lebih 25 ha). Antara daerah disebelah Timur yang sudah ada dengan daerah hunian Pribumi terdapat lajur-lajur panjang yang belum dikapling. Hal ini bisa artikan sebagai jalur peredam yang dibuat untuk pengawasan dan keamanan bagi kepentingan masyarakat kolonial. Kawasan ini dibangun terakhir bersama dengan bangkitnya Probolinggo sebagai pelabuhan angkutan hasil bumi dari sudut Timur Jatim dan industri gula serta pabrik penggilingan padi. Semuanya ini memerlukan banyak orang-orang Pribumi sebagai tenaga kerja. Selain itu pada akhir abad ke-19 juga dibangun rel kereta api yang melewati Probolinggo sehingga dibangun sebuah stasiun kereta api di depan alun. Sehingga dapat dikatakan pusat kota probolinggo tetaplah alun-alun kotanya.

2.2.8.1 Alun-alun

Alun-alun Probolinggo terletak di tengah kota tepat berada di depan Masjid Agung Probolinggo. Alun-alun seluas kurang lebih 2,7 hektar tersebut dikelilingi oleh bangunan-bangunan lama, antara lain: masjid Agung Pasuruan di sisi Barat, Stasiun Kereta Api di sisi Utara, dan Penjara di sisi Timur dan Pendopo di sisi Selatan.



Foto 2.18 Alun-alun Probolinggo (Oleh: Liman, 2008)

2.2.8.2 Masjid Agung Roudatul Jannah Probolinggo

Masjid Agung Probolinggo berada di sebelah Barat alun-alun kota Probolinggo, yang didirikan pada tahun 1770 oleh Tumenggung Joyonegoro. Masjid yang ada saat ini merupakan bangunan baru namun masih di posisi yang sebenarnya.



Foto 2.19 Masjid Agung Roudatul Jannah Probolinggo (Oleh: Liman, 2008)

2.2.8.3 Stasiun Kereta Api Probolinggo

Stasiun Kereta Api Probolinggo dibangun pada akhir abad ke-19 yang berada di sebelah Utara alun-alun kota Probolinggo. Pembangunan stasiun tersebut adalah sebagai realisasi dari keberadaan transportasi kereta api dan pembangunan rel kereta yang dilakukan sebelumnya.



Foto 2.20 Stasiun Kereta Api Probolinggo (Oleh: Liman, 2008)

Jaringan rel kereta api dari Surabaya ke Pasuruan sepanjang 63 km selesaidibangun oleh *Stadspoorwegen* (SS), pada th. 1878, kemudian diperpanjang sampai Probolinggo sampai 40 km pada th. 1884. Setelah itu pada th. 1895 rel kereta api disambung lagi dari Probolinggo-Klakah. Pada th. 1896 menyusul cabang-cabang ke Lumajang dan Pasiran, selanjutnya diteruskan lewat Jember ke Bondowoso, Situbondo dan diteruskan ke pelabuhan Panarukan dengan jarak 151 km, semua ini selesai pada th. 1897. Dengan demikian hubungan dengan rel kereta api dari Probolinggo ke kota-kota lain terutama dengan kota-kota perkebunan Jatim, antara th.1900 sudah terealisasi dengan baik.

2.2.8.4 Pendopo

Pendopo Kota Probolinggo berada di sebelah Selatan Alun-alun Probolinggo. Pendopo tersebut berbentuk bangunan joglo dengan luas 400 m². Berbentuk bangunan joglo dengan luas 30 x 26 m². Di bagian belakang dan sisi kiri-kanannya terdapat bangunan kantor yang merupakan tempat kerja pemerintah probolinggo. Sebagian bangunan telah diperbaharui sehingga yang dapat diidentifikasi hanya lokasinya saat ini dan bagian depan pendoponya.



Foto 2.21 Pendopo Bupati Probolinggo (Oleh: Liman, 2008)

2.2.8.5 Penjara

Bangunan penjara probolinggo berada di sebelah Timur alun-alun kotanya. Berdasarkan peta Probolinggo tahun 1880-1940, bangunan penjara tersebut telah ada. Bangunan tersebut masih digunakan hingga masa *gemeente*. Penjara Probolinggo tersebut memiliki ukuran bangunan 80x50 m².



Foto 2.22 Penjara Probolinggo (Oleh: Liman, 2008)

Catatan:

¹Hindia-Belanda (*Nederlands(ch)-Indië*) adalah sebuah wilayah koloni Belanda yang diakui secara hukum *de jure* dan *de facto*. Kepala negara Hindia-Belanda adalah Ratu atau Raja Belanda dengan perwakilannya yang berkuasa penuh seorang Gubernur-Jendral. Perbatasan Hindia-Belanda dengan negara tetangganya ditentukan dengan perjanjian-perjanjian legal antara Kerajaan Belanda dengan Kerajaan Sarawak (protektorat Inggris di bawah dinasti Brooke "*the White Rajah*"), Borneo Utara Britania (Sabah), Kerajaan Portugis (Timor Portugis), Kekaisaran Jerman (Papua Nugini Utara), Kerajaan Inggris (Papua Nugini Selatan). Hindia-Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam UU Kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat Kerajaan Belanda, diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia-Belanda.

²Dengan demikian, para penguasa Kesultanan Cirebon berikutnya adalah:

- Sultan Keraton Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin (1677-1703)
- Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin (1677-1723)
- Pangeran Wangsakerta, sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati (1677-1713).

BAB 3

PUSAT KOTA *GEMEENTE*

Pengertian “pusat kota” pada kota-kota di Jawa berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Keadaan sosial politik, termasuk sistem pemerintahan, letak geografis, serta sejarah masa lalu sebuah kota sangat berpengaruh pada kawasan yang disebut sebagai “pusat kota” (Damayanti, 2005: 34). Pusat kota di Indonesia ditandai dengan adanya bangunan-bangunan yang berkaitan dengan kegiatan perkotaan dan cenderung terdapat pada beberapa titik pusat. Kegiatan-kegiatan tersebut cenderung beraneka dalam sebuah kota. Pusat kota atau dapat disebut juga dengan istilah “*urban center*” atau “*urban core*”, juga dianggap sebagai “*central bussines district*”, kawasan kompleks pemerintahan atau “*civic center*”. Semuanya tentu tergantung dari sejarah perkembangan di masing-masing kota tersebut (Damayanti, 2005: 39). Alun-alun kota dalam hal ini akan diangkat menjadi pusat kegiatan kota.

Akibat berkembangnya penduduk yang sangat cepat di Jawa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menyebabkan percepatan pertumbuhan kota. Terutama kota-kota di Pesisir Utara Jawa yang tumbuh berorientasi pada keberadaan pelabuhan di Pantai Utara, dan selanjutnya dipengaruhi oleh jalan raya pos dan rel kereta api yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota lain baik di sepanjang pesisir maupun dengan kota pedalaman. Pemberlakuan undang-undang desentralisasi selanjutnya mempengaruhi perubahan kota dengan pemindahan pusat-pusat kotanya ke kawasan yang disebut “kota baru” (Rully Damayanti, 2005: 39).

Keberadaan pusat pemerintahan cukup untuk menunjukkan adanya pusat kegiatan sebuah kota. Namun, pusat pemerintahan tersebut tidak berdiri sendiri. Terdapat daya dukung yang juga dibangun di sekitar lokasi pusat pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan ciri sebuah kota yang memiliki beberapa komponen selain pemerintahan kota, antara lain: pusat perdagangan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya yang ditunjukkan dengan adanya pusat

permukiman, serta terdapat pusat sarana permukiman sebagai fasilitas pelengkap kota (Mumford, 1961:).

Keberadaan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun tersebut diharapkan dapat memperlihatkan pola kota dalam skala meso. Skala meso digunakan untuk membatasi pembahasan hanya pada bangunan-bangunan yang berkaitan dengan wewenang *gemeente* dan berada dekat dengan alun-alun. Batas fisik yang digunakan adalah bangunan-bangunan pemerintahan dan publik yang bersebelahan langsung dengan alun-alun atau jalan pembatas alun-alun. Skala makro akan terlihat pada seluruh penataan kawasan di kota-kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa. Sedangkan dalam skala mikro akan menjelaskan mengenai letak dan susunan perbangunan.

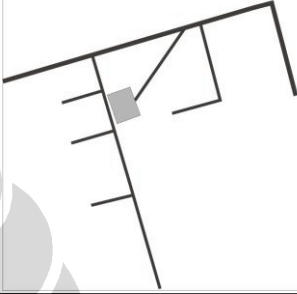
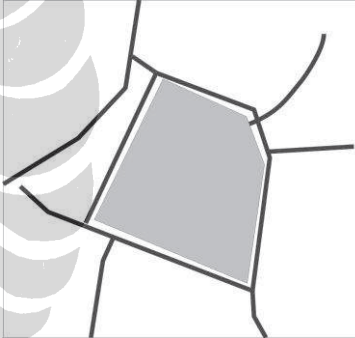

Bentuk alun-alun pada kota-kota *Gemeente* di Pesisir Pantai Utara Jawa berbeda di tiap kotanya. Namun secara fisik memiliki denah dasar yang memiliki empat sisi atau secara sederhana berbentuk segi empat (beraturan maupun tidak beraturan). Bentuk alun-alun yang beragam tersebut menunjukkan tidak adanya konsep khusus yang menjelaskan mengenai bentuk pasti alun-alun selain alasan fungsionalitas dan penataan kota.

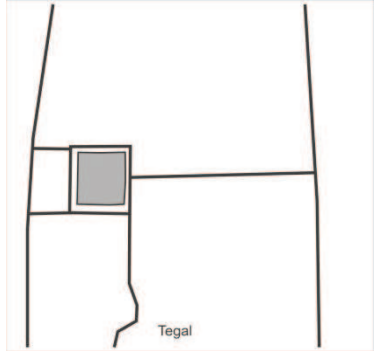
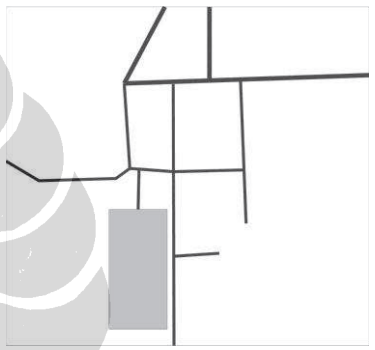
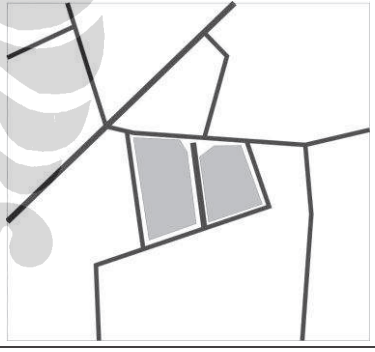
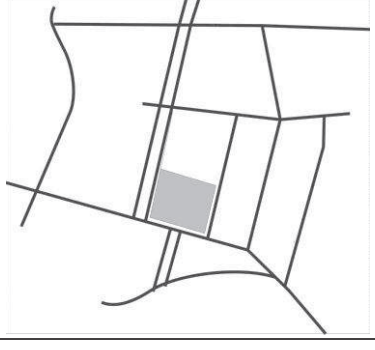
Alun-alun di Batavia (*Stadhuisplein*), Cirebon, Tegal, Surabaya (Ketabang), dan Pasuruan memiliki bentuk segi empat beraturan. Batavia memiliki alun-alun *Koningsplein* berbentuk trapesium yang lebih sempit di sisi Utara dan memiliki sisi miring di sebelah Timur. Kota Semarang juga memiliki alun-alun berbentuk trapesium namun sisi miringnya di sebelah Utara.

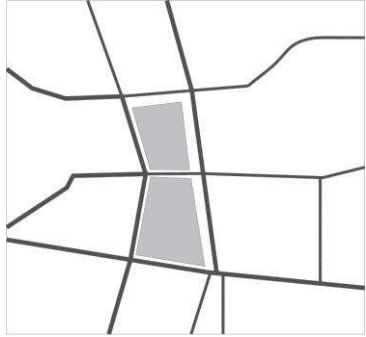
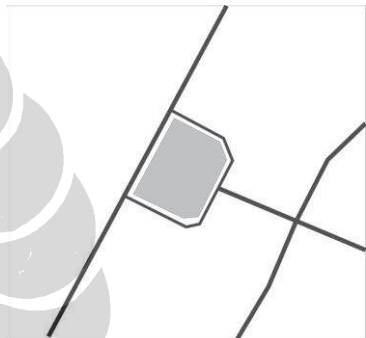
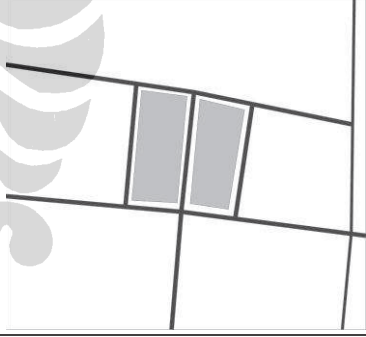
Arah memanjang alun-alun di setiap kota berbeda dan tidak semuanya memanjang ke arah Utara-Selatan secara benar. Sebagian besar memiliki arah memanjang yang miring, Barat laut—Tenggara atau Timur laut—Barat daya. Alun-alun Batavia (*Koningsplein*), Tegal, Surabaya (Kepanjen), dan Probolinggo memiliki arah memanjang mendekati lurus Utara—Selatan. Sedangkan alun-alun Batavia (*Stadhuisplein*) memiliki arah memanjang Barat Laut-Tenggara. Kota yang memiliki arah memanjang alun-alunnya ke Timur Laut-Barat Daya adalah Cirebon, Semarang, Surabaya (Ketabang), dan Pasuruan.

Tabel 3.1 Alun-alun pada Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Ukuran (m)				Denah
	Sisi 1 (U)	Sisi 2 (T)	Sisi 3 (S)	Sisi 4 (B)	
Batavia 1 (Stp) 6°08'04.27" LS dan 106°48'46.93" BT	100	70	100	70	
Batavia 2 (Knp) 6°10'30.86" LS dan 106°49'37.66" BT	700	1000	1000	1000	
Cirebon (Kjs) 6°42'34.78" LS dan 108°33'33.06" BT					

Alun-alun	Ukuran (m)				Denah
	Sisi 1 (U)	Sisi 2 (T)	Sisi 3 (S)	Sisi 4 (B)	
Tegal 6°52'03.14" LS dan 109°08'16.69" BT	126	130	126	130	
Pekalongan 6°53'26.62" LS dan 109°40'34.23" BT	102	130	102	130	
Semarang 6°58'20.44" LS dan 110°25'26.13" BT	160	226	170	280	
Surabaya 1 (Ktb) 7°15'36.63" LS dan 112°44'48.38" BT	125	130	125	130	

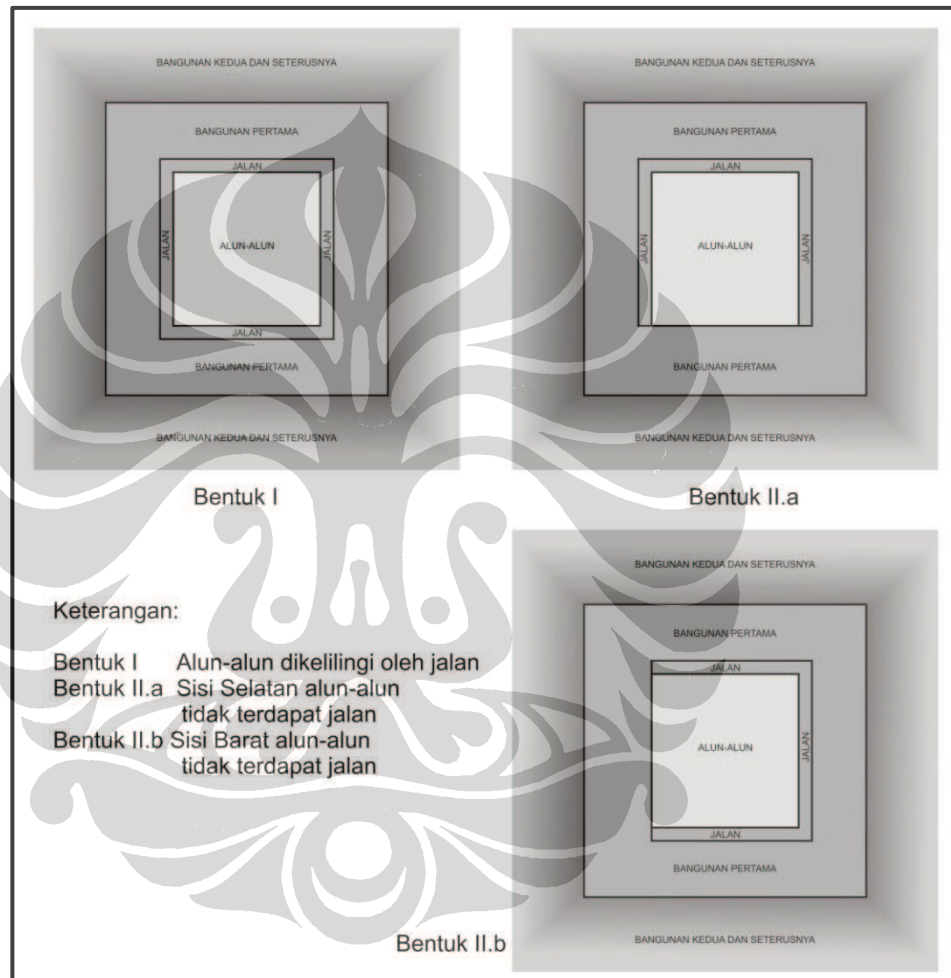
Alun-alun	Ukuran (m)				Denah
	Sisi 1 (U)	Sisi 2 (T)	Sisi 3 (S)	Sisi 4 (B)	
Surabaya 2 (Kpj) 7°14'46.36" LS dan 112°44'15.65" BT	106	209	171	212	
Pasuruan 7°38'31.15" LS dan 112°54'24.30" BT	140	150	124	150	
Probolinggo 7°44'39.01" LS dan 112°12'56.95" BT	175	170	165	170	

Keterangan : Ukuran dan denah alun-alun merupakan hasil rekonstruksi dan peta lama dari setiap kota gemeente di pesisir Utara Jawa.

Alun-alun terluas adalah Batavia *Koningsplein* yang memiliki bentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi Utara 700 m, serta sisi Timur, Selatan, dan Barat 1000 m (lihat Tabel 3.1).

Selain bentuk denahnya, alun-alun dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu: (1) alun-alun yang bukan merupakan halaman suatu bangunan, (2) alun-alun yang menjadi halaman bangunan di sebelah Barat atau Selatannya. Alun-alun yang bukan merupakan halaman suatu bangunan biasanya dibatasi di keempat

sisinya, biasanya oleh jalan. Alun-alun tersebut dijumpai di kota Batavia (*Koningsplein*), Tegal, Pekalongan, Surabaya (Kepanjen), Pasuruan dan Probolinggo. Alun-alun kategori kedua ditemukan di Batavia (*Stadhuisplein*), Semarang (Johar), Surabaya (Ketabang), Cirebon (Kejaksanaan).



Gambar 3.1 Diagram Alun-alun *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa

Alun-alun bentuk pertama berupa lapangan yang dikelilingi jalan dan sekaligus menjadi pembatasnya dengan bangunan-bangunan lain. Bangunan pertama merupakan bangunan-bangunan yang langsung menghadap ke jalan di sekeliling alun-alun tersebut. Alun-alun bentuk pertama dijumpai pada kota Batavia (*Koningsplein*), Cirebon, Tegal, Pekalongan, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo.

Bentuk kedua dapat dibedakan lagi menjadi dua tergantung letak bangunan utama yang menjadi bagian alun-alun tersebut. Alun-alun bentuk kedua yang pertama berupa alun-alun yang terdapat jalan sebagai pembatasnya di sisi Barat, Utara, dan Timur, sedangkan sisi Selatan langsung ke bangunan lain. Alun-alun tersebut lebih sebagai halaman dari bangunan di sisi Selatannya. Alun-alun bentuk kedua ditemukan pada kota Batavia (*Stadhuisplein*). Bentuk lainnya memiliki bangunan di sisi Baratnya sedangkan pada sisi Utara, Timur, dan Selatan dibatasi oleh jalan. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa alun-alun adalah bagian dari bangunan di sisi Baratnya. Alun-alun bentuk ketiga ditemukan pada kota Semarang.

Penanda pusat kota adalah adanya ruang bagi publik kota dan menggunakan alun-alun sebagai titik pusatnya. Jadi permasalahan berupa, bangunan-bangunan yang berkaitan dengan status *gemeente* di sekitar alun-alun akan di uraikan. Bangunan di lapisan pertama menjadi objek yang dikaji lebih lanjut untuk mengungkap pola pusat kotanya. Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan kewenangan *gemeente* antara lain: Kantor *Gemeente*, Jaringan Pipa Air Minum, tempat tempat rekreasi, sumur artetis, jalan-jalan umum, lapangan dan taman, dan penyeberangan dengan perahu tambang, dan pasar.

Bangunan-bangunan di sekitar alun-alun tersebut juga tidak semuanya bangunan baru yang dibangun ketika status *gemeente* diberlakukan. Latar belakang sejarah setiap kota di Indonesia pada umumnya berdiri dari masa sebelum kolonial, maka alun-alun merupakan komponen pokok kota tersebut. Keberadaan alun-alun di tengah kota secara otomatis merupakan peninggalan dari masa sebelumnya, yaitu masa berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam maupun masa kolonial awal. Hal tersebut berarti pada masa *gemeente* tidak terdapat alun-alun baru yang dibuat, namun alun-alun yang ada dirubah secara fisik begitupula bangunan-bangunan di sekitarnya.

3.1 Bangunan di sekitar Alun-alun kota *Gemeente*

Bangunan-bangunan di sekitar alun-alun kota *gemeente* di pesisir utara jawa memiliki fungsi yang beragam. Di beberapa kota, seperti dijelaskan di bab 3

mengenai bangunan-bangunan yang menjadi kewenangan *gemeente* adalah: Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat (Kantor *Gemeente*, Jaringan Pipa air minum, tempat-tempat rekreasi, sumur artesis), fasilitas transportasi (jalan-jalan umum, lapangan dan taman, dan penyeberangan dengan perahu tambang), Fasilitas Perekonomian (pasar).

Bangunan pemerintahan yang digunakan walikota atau *burgemeester* biasanya berupa balaikota, sedangkan keraton merupakan tempat penguasa pribumi yang sudah ada sebelumnya. Pendopo merupakan aula atau ruang penyambutan tamu yang umumnya ada pada keraton-keraton Jawa¹.

Bangunan-bangunan yang berada di dekat alun-alun kota *gemeente* tersebut tidak semuanya berada di dekat alun-alun kota yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Bangunan dekat Alun-alun Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa
(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Jenis Bangunan	Arah Hadap	Jarak (km)	Letak terhadap Alun-alun
Batavia 1 (Stp)	Balaikota	Utara	0	Sisi Selatan
	Stasiun Beos	Barat	0,243	Sisi Selatan
	Gereja Batavia baru	Timur	0,01	Sisi Barat
	Kantor Pos	Timur	0,01	Sisi Utara
	Kantor Pengadilan	Barat	0,02	Sisi Timur
Batavia 2 (Knp)	Balaikota	Utara	0,025	Sisi Selatan
	Stasiun Weltevreden	Timur	0	Sisi Timur
	Pasar Gambir	-	0	Sisi Timur
	Gereja Immanuel	Barat	0,03	Sisi Timur
Cirebon (Kjs)	Masjid	Timur	0	Sisi Selatan
	Rumah Bupati	Barat	0,015	Sisi Timur
	Hotel Wilhelmina	Utara	0	Sisi Barat
Tegal	Pendopo	Utara	0,02	Sisi Selatan
	Menara Air	-	0,183	Sisi Timur
	Pasar Alun-alun	Utara	0,27	Sisi Timur
	Stasiun Tegal	Selatan	0,45	Sisi Utara
Pekalongan	Pendopo	Utara	0,015	Sisi Timur

Kota	Jenis Bangunan	Arah Hadap	Jarak (km)	Letak terhadap Alun-alun
	Masjid Agung	Timur	0	Sisi Utara
	Pasar Alun-alun	-	0	Sisi Selatan
Semarang	Masjid Kauman	Timur	0	Sisi Barat
	Pasar Johar	-	0	0
	Kantor Pos Kota	Barat	0,14	Sisi Utara
Surabaya 1 (Ktb)	Balaikota	Barat	0	Sisi Utara
Surabaya 2 (Kpj)	Balaikota	Selatan	0,03	Sisi Timur
	Pasar Besar	-	0,08	Sisi Timur
	Gereja Katolik Roma	Barat	0,14	Sisi Utara
	Kantor Pos Kepanjen	Selatan	0,01	Sisi Utara
Surabaya 3 (Jm)	Balaikota	Timur	0,01	Sisi Barat
Pasuruan	Pendopo	Selatan	0,03	Sisi Utara
	Poncol	Timur	0,04	Sisi Selatan
	Kantor Pos Trajeng	Selatan	0,03	Sisi Utara
Probolinggo	Pendopo	Utara	0,044	Sisi Selatan
	Stasiun Probolinggo	Selatan	0,04	Sisi Utara

Setiap kota ternyata memiliki bangunan yang berbeda-beda berdasarkan fungsinya. Susunan bangunan tersebut bila diletakkan ke dalam sebuah denah akan tampak pada gambar 3.2. Posisi tiap bangunan bila dibandingkan satu kota dengan kota lainnya akan terlihat pola penempatan bangunan yang memiliki fungsi sama terdapat pada letak yang sama. Sementara terdapat juga bangunan lain yang memiliki fungsi sama namun tidak sama letaknya.

Bangunan-bangunan pada denah akan dibedakan berdasarkan fungsinya dengan warna. Bangunan-bangunan tersebut antara lain: Bangunan Pemerintahan (Balaikota, dan Pendopo) ditandai dengan warna merah, Fasilitas Transportasi (Stasiun, Pelabuhan) ditandai dengan warna hijau dan Jalan dengan warna Hitam, Fasilitas Perekonomian (Pasar) di tandai dengan warna biru. Dan terakhir Fasilitas Publik lainnya (Masjid, Gereja, Kantor Pos, Menara air dan Penjara) di tandai dengan warna kuning.

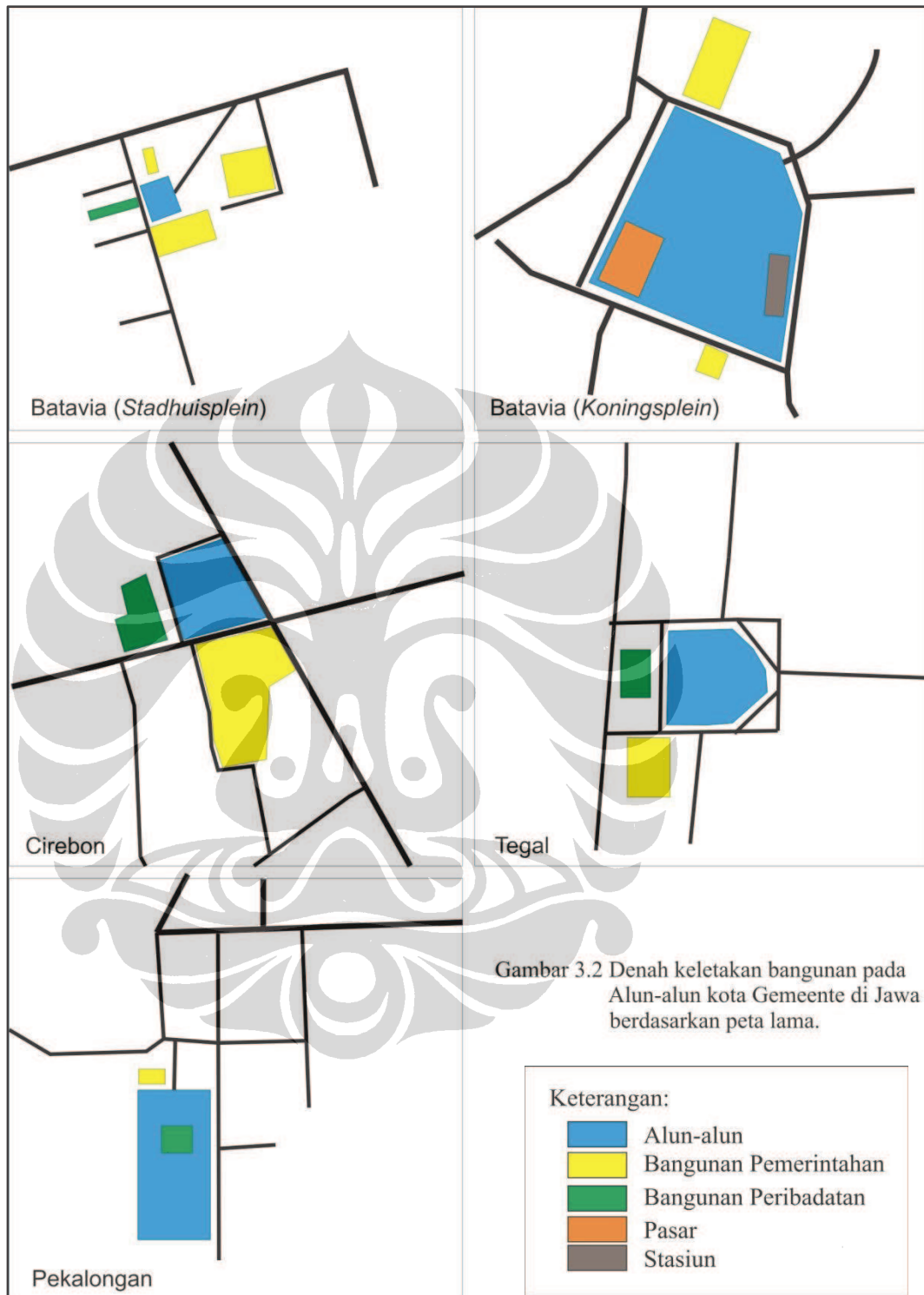
Kota yang memiliki bangunan paling beragam adalah kota Batavia (*Stadhuisplein*) yang memiliki 5 bangunan dengan fungsi berbeda di alun-alunnya. Bangunan-bangunan tersebut adalah Balaikota (*Stadhuis*), Kantor Pos,

Gedung Pengadilan, dan bekas Gereja. Susunan tersebut tidak sesuai dengan konsep kota kolonial yang disampaikan oleh Handinoto, yang menyatakan bahwa terdapat penguasa pribumi dan Eropa di dekat alun-alun. Hal tersebut diperkirakan karena perkembangan Batavia yang sejak awal telah dikuasai asing (Eropa), maka sebagian besar tata kotanya telah diatur oleh pemerintah kolonial.

Kota yang memiliki balaikota di dekat alun-alun hanya Batavia dan Surabaya. Hal tersebut diperkirakan karena kota Batavia dan Surabaya memang dirancang oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menjadi pusat pemerintahannya. Keberadaan alun-alun dan letaknya yang strategis membuat pemerintah Kolonial membangun pusat kotanya sejak awal sesuai dengan desain mereka.

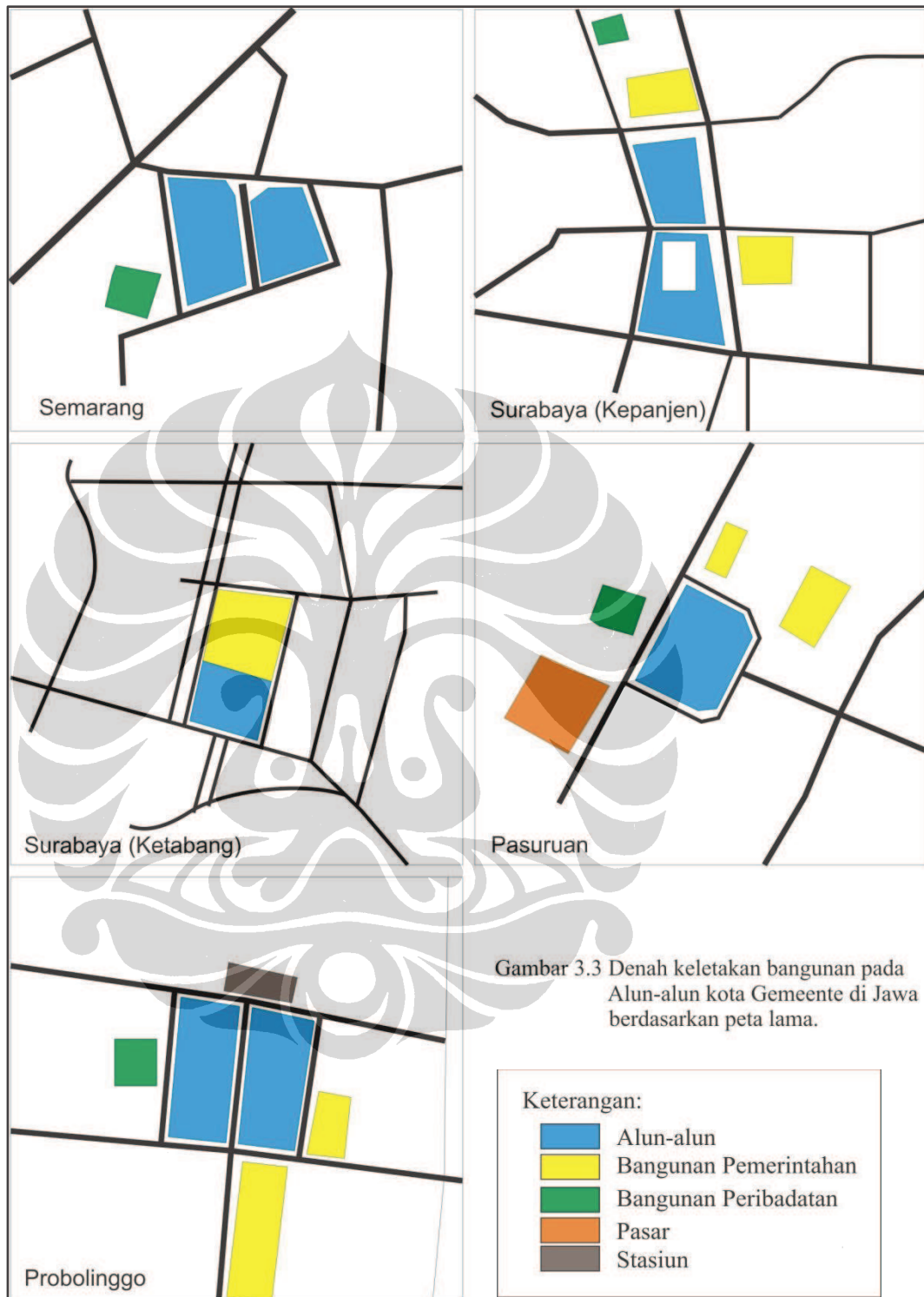
Balaikota awal Batavia adalah *Stadhuisplein* yang hingga masa gemente, di sekitar alun-alunya ditemukan bangunan-bangunan, antara lain: balaikota (*Stadhuis*), Stasiun Beos, Gereja Batavia Baru, Kantor Pos, dan Kantor Pengadilan. Bangunan-bangunan tersebut tidak terpengaruh dengan perubahan status pemerintahan kota. Hal tersebut diperkirakan karena bangunan-bangunan yang ada masih dapat digunakan sehingga tidak memerlukan perubahan lagi untuk memanfaatkannya. Susunan bangunan dapat dilihat pada gambar 3.2.

Batavia mendirikan pusat kota yang baru di daerah Selatan pada perkembangannya yang disebut Kawasan Weltevreden dan dibuat alun-alun *Koningsplein*. Tampaknya pada pemindahan pusat pemerintahan tersebut tidak terdapat alasan konseptual melainkan hanya kondisi teknis. Hal ini dipertegas karena sebelumnya kantor *gemeente* pernah berada di daerah Tanah Abang Selatan. Selain itu, pembuatan lapangan *Koningsplein* juga bukan sebagai halaman suatu bangunan tertentu. Bangunan-bangunan penting yang berada di sekitar *Koningsplein*, antara lain: Balaikota, Stasiun Weltevreden, Pasar Gambir, dan Gereja Immanuel. Sama halnya dengan pusat kota yang lama di *Stadhuis*, ketika berpindah ke Weltevreden, bangunan-bangunan yang berada di sekitar alun-alun tersebut bukan bangunan baru. Bangunan-bangunan lama di Batavia maupun Weltevreden merupakan bangunan lama yang hanya di alih fungsikan ketika status pemerintahan berubah.





Peta 3.1 Alun-alun kota Gemeente di Jawa dan bangunan di sekitarnya





Peta 3.2 Alun-alun kota Gemeente di Jawa dan bangunan di sekitarnya

Tabel 3.2 tersebut juga diperlihatkan adanya satu kota yang bangunan pemerintahan atau semacamnya tidak ditemukan dekat dengan alun-alun kota pada masa *gemeente*, yaitu kota Semarang dan Cirebon. Pada kota Semarang, alun-alun kota yang awalnya merupakan halaman Masjid Kauman diubah menjadi pasar Johar pada masa *gemeente* tersebut. Alun-alun tersebut hilang dan pemindahan permukiman ke daerah candi juga tidak diikuti oleh pemindahan pusat pemerintahan. Dalam hal ini, pusat pemerintahan kota Semarang memang tidak ditempatkan pada daerah sekitar alun-alunnya. Sehingga tidak ditemukan keberadaan bangunan pusat *gemeentenya*, namun terdapat bangunan-bangunan fasilitas publik di sekitarnya, semacam kantor pos, pasar, dan masjid.

Balaikota Batavia baik di *Stadhuisplein* maupun di *Koningsplein* semuanya menghadap ke Utara. Di *Stadhuisplein*, balaikota langsung dengan alun-alun tanpa pembatas, namun di *Koningsplein* balaikota dan alun-alunnya di batasi oleh jalan. Di Surabaya, justru balaikotanya tidak di sebelah Selatan alun-alun, dari ketiga balaikota dan alun-alun, semua berada pada posisi yang berbeda. Balaikota di Alun-alun Ketabang berada di sebelah Utara alun-alun, sedangkan di Alun-alun Kepanjen bangunan balaikota berada di sebelah Timur. Alun-alun Jembatan Merah langsung berada di tepi Barat sungai Kalimas dan Utara Jalan Kembang Japun. Bangunan yang ada hanya di sisi Barat Alun-alun yang merupakan bangunan balaikota Surabaya awal.

Bangunan balaikota di Surabaya awal berada di sisi Barat alun-alun kemudian balaikota kedua berada di sebelah Timur alun-alun dan terakhir di sebelah Utara alun-alun. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem penataan bangunan pemerintahan tidak ada aturan khusus mengenai letaknya terhadap alun-alun. Letak tersebut ditentukan berdasarkan tata kota dan arsitek bangunan balaikota. Akan tetapi, meskipun semua bangunan balaikota di Surabaya berada di sisi yang berbeda-beda pada alun-alun masing-masing, semuanya memiliki orientasi menghadap ke arah alun-alun.

Selain arah hadap balaikota dan letaknya terhadap alun-alun, komponen lain yang dapat di lihat adalah adanya pembatas antara alun-alun dan bangunan balaikota atau pendopo atau keraton. Terdapat dua kota yang memiliki alun-alun

dan balaikota menyatu dalam arti tidak terdapat pagar atau jalan sebagai pembatasnya. Balaikota Batavia lama (*Stadhuis*) langsung menghadap ke alun-alun *Stadhuisplein* yang menjadikannya halaman dari *Stadhuis*. Begitupula dengan balaikota Surabaya di Ketabang yang langsung menjadi satu dengan alun-alunnya.

Balaikota Batavia dan Weltevreden terpisah dengan *Koningsplein* oleh jalan *Koningsplein* South. Bangunan balaikota di kawasan ini bukan merupakan bagian dari *Koningsplein* seperti bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Balaikota Surabaya di Jembatan Merah juga dipisahkan oleh jalan di depannya namun tidak menunjukkan jarak antara jalan tersebut dengan alun-alunnya. Sementara alun-alun di Kepanjen terpisah dengan Balaikotanya oleh jalan Heerenweg (Jalan Tembaan).

Di Tegal, antara alun-alun dan balaikota dibatasi oleh jalan selebar 14 meter, namun pada saat ini keberadaan pendopo tersebut tidak ditemukan lagi karena telah dibangun Balaikota Tegal yang baru. Kota yang memiliki pendopo dan alun-alun yang dipisahkan oleh jalan selain Tegal adalah Cirebon, Pekalongan, dan Probolinggo. Sedangkan Pasuruan memiliki letak pendopo yang berbeda dengan kota-kota lainnya, yaitu di sebelah Utara alun-alun. Pendopo tersebut hanya di batasi oleh jalan di sisi Utara alun-alun. Di sebelah Barat pendopo tersebut terdapat menara air dan bangunan Kantor Pos.

Bila keberadaan bangunan-bangunan tersebut dilihat dari keletakannya yang dibedakan berdasarkan fungsinya, maka dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3 yang menunjukkan tidak ada keteraturan

Berdasarkan bangunan di dekat alun-alun yang berkaitan dengan pemerintahan kota maka dapat terlihat bahwa letak bangunan-bangunan tersebut tidak pada lokasi yang sama di setiap kota. Maka dapat di asumsikan bahwa tidak ada keteraturan dan kesepakatan dalam penataan kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa.

Berdasarkan kewenangan Kota *Gemeente* mengatur beberapa hal yang secara garis besar dapat dilihat dalam 3 dari 7 bentuk infrastruktur yang membentuk sistem sebuah kota yang saling berkait, yaitu: finansial, politik,

teknologi, keruangan, kesehatan masyarakat, sosial, dan kependudukan (Joel A. Tarr, 1984: 230). Ketiga bentuk infrastruktur tersebut berpengaruh kebijakan pemberlakuan bagi sebuah kota, yaitu: Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat (Kantor *Gemeente*, Jaringan Pipa Air Minum, tempat tempat rekreasi, sumur artetis), fasilitas transportasi (jalan-jalan umum, lapangan dan taman, dan penyeberangan dengan perahu tambang), Fasilitas Perekonomian (pasar).

3.1.1 Alun-alun, dan Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat

Perubahan status *gemeente* menunjukkan adanya perubahan dalam konsep pemerintahan, sehingga hal yang paling terlihat dalam perubahan kota-kota pelabuhan di pesisir Pantai Utara setelah mendapatkan status *gemeente* adalah adanya kantor pemerintah yang ditempati oleh walikota atau *burgemeester*. Oleh sebab itu, keletakan kantor tersebut dianggap menjadi penting sebagai tempat kegiatan administrasi sebuah pemerintahan daerah.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan keletakan kantor pemerintahan atau bangunan yang berkaitan dengan pemerintahan adalah letaknya yang strategis sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai pusat aktivitas kota. Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan pemerintahan *Gemeente* adalah: balaikota yang merupakan kantor *burgemeester* atau walikota dan sebagainya. Selain bangunan pemerintahan kota, di dekat alun-alun juga ditemukan bangunan yang berkaitan dengan pemerintahan pribumi. Bangunan-bangunan tersebut adalah: pendopo, dan keraton. Bangunan pemerintahan yang lebih tinggi seperti kantor gubernur juga ditemukan di dekat alun-alun kota Batavia dan Surabaya.

3.1.1.2 Balaikota.

Balaikota adalah tempat kerja *Burgemeester* atau walikota pada masa *Gemeente*. Untuk memudahkan kegiatan pemerintahan, biasanya balaikota dibangun di pusat kota. Bangunan ini juga ditemukan pada kota-kota *Gemeente* di pesisir Utara Jawa, namun tidak semuanya merupakan bangunan baru. Perubahan status *Gemeente* tidak membuat sebuah kota mendirikan bangunan perkantoran

pemerintahan yang baru. Sebagai contoh: kota Batavia, yang masih menggunakan balaikota lamanya di *Stadhuis* untuk kegiatan pemerintahan.

Tabel 3.3 Balaikota *Gemeente* di Jawa
(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

No.	Kota	Orientasi dari Alun-alun	
		Jarak	Letak
1	Batavia 1 (Stp)	0 km	Selatan
2	Batavia 2 (Knp)	0,025 km	Selatan
3	Cirebon	0,235 km	Utara
4	Tegal	1,25 km	Barat Laut
5	Pekalongan	1,12 km	Barat Laut
6	Semarang	1,44 km	Barat daya
7	Surabaya 1 (Ktb)	0 km	Utara
8	Surabaya 2 (Kpj)	0,03 km	Timur
9	Pasuruan	0,56 km	Timur
10	Probolinggo	1 km	Selatan

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Pada Tabel 3.1 diperlihatkan bahwa hanya kota Batavia dan Surabaya yang memiliki Balaikota dekat dengan alun-alun kotanya. Kota-kota *Gemeente* di Pesisir Utara yang lainnya tidak memiliki balaikota di dekat alun-alunnya. Balaikota diletakkan pada bangunan kolonial lama maupun baru yang terletak lebih dari 100 m dari alun-alun lama. Selain itu, bangunan tersebut juga bukan bangunan pertama yang langsung ke alun-alun tetapi dipisahkan oleh bangunan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pemisahan antara pemerintahan kolonial dengan pemerintahan sebelumnya.

Balaikota berada dekat alun-alun kota pada *Gemeente* Batavia dikarenakan alun-alun yang kotanya merupakan halaman dari Balaikota atau *Stadhuis*. Sedangkan pada balaikota yang di Weltevreden, semua bangunan penting memang sengaja dipusatkan di sekitar *Koningsplein* sebagai pusat kota yang baru. Bangunan yang digunakan sebagai Balaikota di *Koningsplein* pun sebenarnya bukan didirikan pada masa *Gemeente* melainkan sudah ada pada masa

sebelumnya. Balaikota Batavia di daerah Weltevreden saat ini menjadi kantor Gubernur Jakarta yang berada di sebelah Selatan alun-alun *Koningsplein*.

Balaikota Pasuruan memiliki jarak 560 m dari alun-alun kota Pasuruan, yang artinya jarak tersebut tidak terlalu jauh maupun tidak terlalu dekat. Letak bangunan tersebut dipisahkan oleh bangunan-bangunan lainnya dengan alun-alun, sehingga bangunan tersebut dianggap bukan bangunan di sekitar alun-alun. Saat ini gedung balaikota tersebut digunakan sebagai gedung DPRD Pasuruan.

Bangunan balaikota Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pasuruan, dan Probolinggo memiliki jarak yang jauh dengan alun-alun kotanya, sehingga tidak termasuk bangunan di sekitar alun-alun. Bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki letak yang sama pada setiap kota. Di kota Cirebon dan Surabaya, memiliki balaikota yang terletak di sebelah Utara alun-alunnya. Tegal, dan Pekalongan, memiliki balaikota terletak di Barat Laut alun-alunnya, sedangkan di Semarang justru berada di sebelah Timur Laut. Balaikota terletak di sebelah Timur pada kota Pasuruan dan di Selatan pada kota Probolinggo. Letak tersebut diperkirakan disesuaikan dengan arah perkembangan kotanya.

Kota Cirebon memiliki satu Balaikota yang berjarak 0,235 km dari alun-alunnya. Balaikota pada kota Cirebon justru lebih dekat dengan stasiun. Hal tersebut diperkirakan karena stasiun yang dibangun belakangan mungkin sengaja didekatkan dengan bangunan permukiman Eropa. Sementara di daerah sekitar alun-alun Cirebon telah berdiri bangunan tempat tinggal Bupati, masjid (bangunan diperbaharui) dan hotel Wilhelmina (sudah tidak ditemukan) serta permukiman di sekitarnya.

Kota Tegal memiliki Balaikota yang letaknya 1,25 km Barat Laut dari alun-alun kotanya. Balaikota Tegal pada masa *gemeente* berada di bangunan yang sekarang digunakan sebagai kantor pos. Bangunan tersebut terkumpul dengan bangunan-bangunan kolonial lainnya.

Balaikota Pekalongan terletak di daerah Bundaran Jatayu sekitaran Jalan Diponegoro, Pekalongan atau kurang lebih 1,12 km sebelah barat laut alun-alun kotanya.

Semarang merupakan kota yang secara penuh dikuasai dan menjadi pusat di Jawa Tengah oleh pemerintah kolonial sehingga hampir sebagian besar kota ini terdapat bangunan kolonial. Balaikota Semarang pada masa *gemeente* terletak di daerah Jalan Pemuda (*Bodjong Road*), Kranggan atau sekitar 1,44 km sebelah Selatan dari alun-alun dan masjid Kauman.

Kantor gubernur merupakan tempat kedudukan gubernur di tiap propinsi ketika undang-undang pembentukan propinsi diberlakukan. Kantor tersebut berada di 3 kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa, yaitu: Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di Batavia, kantor gubernur berada di Istana Negara saat ini yang terletak di sebelah Utara *Koningsplein*. Semarang memiliki kantor gubernur di Jalan Pahlawan no. 9 atau sekitar 2,79 km dari alun-alun Johar, Di Surabaya, kantor gubernur berada di sebelah Barat alun-alun Jembatan merah kemudian di pindahkan di sebelah Timur alun-alun Kepanjen.

Surabaya memiliki 2 alun-alun yang berada di Kepanjen, dan Ketabang. Alun-alun Kepanjen yang kini menjadi lapangan tugu Pahlawan hanya berjarak 30 meter dengan Kantor Gubernur. Balaikota Ketabang langsung menghadap ke alun-alun yang berada tepat didepannya.

3.1.1.2 Pendopo

Bangunan pendopo ditemukan pada kota-kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa, antara lain: Tegal, Pekalongan, Pasuruan, dan Probolinggo. Bangunan pendopo tersebut kesemuanya berada di sisi Selatan alun-alun masing-masing kota. Pendopo pada kota-kota tersebut justru ditemukan bukan sebagai bagian dari keraton. Pendopo menjadi identik dengan alun-alun pada beberapa kota di Jawa. Di pendopo tersebut juga terkadang terdapat bangunan pemerintahan kota.

Tabel 3.4 Pendopo pada *Gemeente* di Jawa

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

No.	Kota	Jarak dan Posisi dari Alun-alun	
		Jarak	Letak
1	Batavia 1 (Stp)	tidak ada	
2	Batavia 2 (Knp)	tidak ada	
3	Cirebon	15 m	Selatan
4	Tegal	20 m	Selatan
5	Pekalongan	15 m	Selatan
6	Semarang	tidak ada	
7	Surabaya 1 (Ktb)	tidak ada	
8	Surabaya 2 (Kpj)	tidak ada	
9	Pasuruan	30 m	Utara
10	Probolinggo	44 m	Selatan

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Keberadaan pendopo di sebelah Selatan tersebut berkaitan dengan pengertiannya sendiri, yaitu bagian dari keraton, rumah besar, atau masjid yang berfungsi untuk menerima tamu. Maka seharusnya terdapat bangunan lain di bagian Selatan pendopo. Bangunan tersebut dapat berbentuk keraton, rumah atau hanya tempat kerja bagi pengelola daerah tersebut. Bangunan berupa masjid tidak dimungkinkan ada di bagian Selatan pendopo.

Lima kota yang memiliki pendopo, yaitu Cirebon, Tegal, Pekalongan, Pasuruan, dan Probolinggo. Sementara kota-kota lainnya tidak ditemukan pendopo pada masa *gemeente*. Pendopo di kelima kota tersebut memiliki jarak yang dekat yaitu kurang dari 100 meter dari alun-alun dan hanya dipisahkan oleh jalan. Sehingga dapat diperkirakan, bangunan tersebut masih digunakan pada masa *gemeente* dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari daerah alun-alun.

Kota Cirebon memiliki pendopo sebagai bagian dari rumah dinas Bupati, begitu pula di kota-kota lainnya. Pendopo menjadi bagian depan kantor bupati yang sekaligus rumah dinas bupati. Pendopo tersebut berada di sebelah Selatan alun-alun Kejaksaan.

3.1.2 Alun-alun, dan Fasilitas Transportasi

Transportasi sebagian merupakan tanggung jawab dari *gemeente*, terutama untuk pengadaan infrastruktur jalan dan perawatan jalan. Stasiun Kereta api dan jalur rel kereta ditemukan di hampir semua kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa. Bangunan stasiun kereta merupakan tempat pemberhentian kereta yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Stasiun kereta telah dibangun sejak sebelum masa *gemeente* dan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan perkembangan kota. Namun, meskipun perkeretaapian adalah sarana transportasi yang cukup penting, hak pengelolaannya tidak diserahkan pada *gemeente* melainkan kepada *Staatspoor (SS)*.

3.1.2.1 Stasiun Kereta Api dan Pelabuhan

Fasilitas transportasi tersebut terletak pada posisi yang berbeda terhadap alun-alun di tiap kota. Stasiun kereta api sebgaiian besar berada di sebelah Utara yaitu 3, sedangkan di sebelah barat, barat daya, timur, dan tenggara masing masing 2. Stasiun Kereta yang berada di sebelah Utara alun-alun ditemukan di kota Semarang (stasiun Tawang), Pasuruan (stasiun Pasuruan), dan Probolinggo (Stasiun Probolinggo). Di kota Batavia (*Stadhuisplein*) dan Pekalongan, memiliki stasiun kereta di sebelah barat alun-alunnya dan berjarak masing-masing 243 meter dan 1,26 km.

Alun-alun kedua kota Batavia atau *Koningsplein* tepat bersebelahan dengan Stasiun Weltevreden yang berada di sisi Timurnya. Letak stasiun kereta di sisi Timur juga ditemukan di Kota Tegal yang langsung dihubungkan jalan lurus sejauh 450 m dari alun-alunnya.

Kota Cirebon memiliki alun-alun kejkasaan dengan 2 stasiun di kota tersebut, yaitu Kejaksaan dan Parujakan, namun stasiun yang paling dekat dengan alun-alun Kejaksaan adalah stasiun Kejaksaan yang juga dekat dengan balaikota. Stasiun Kejaksaan memiliki jarak 420 m sebelah Utara alun-alunnya.

Di kota Surabaya terdapat dua alun-alun di dualokasi dan masing-masing berdekatan dengan tiga stasiun yang berbeda. Alun-alun Surabaya di Ketabang berjarak 740 m dari Stasiun Gubeng yang berada di sebelah Tenggaraanya. Stasiun

kedua adalah Pasar Turi yang berada pada 850 meter di sebelah Barat Daya alun-alun Kepanjen.

Selain Transportasi kereta api, setiap kota di pesisir Utara Jawa juga memiliki pelabuhan laut. Pelabuhan tersebut sebagian besar berada di sebelah Utara alun-alun kotanya yang berjarak 900 m di kota Cirebon hingga 6,14 di Surabaya dari alun-alun Ketabang. Hanya dua pelabuhan laut yang berada di sebelah Timur Laut alun-alun kotanya, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok yang berjarak 7,53 km dari alun-alun *Koningsplein*, dan Pelabuhan Pasuruan yang berjarak 1,4 km dari alun-alunnya.

Jarak pelabuhan tersebut termasuk sedang hingga jauh dari alun-alun kota masing-masing, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan bangunan di sekitar alun-alun. Letak pelabuhan semuanya menghadap ke laut Jawa dan memiliki ukuran yang beragam tergantung kotanya. Kota Batavia memiliki Pelabuhan Tanjung Priok yang termasuk besar, begitupula pelabuhan Tanjung Mas di Semarang dan Tanjung Perak di Surabaya.

Bila diperhatikan mengenai keletakan Stasiun dan Pelabuhan, Kota Semarang dan Probolinggo memiliki letak Stasiun dan Pelabuhan di sebelah Utara dan dapat ditarik Garis lurus dari alun-alunnya. Terutama untuk kota Probolinggo yang memiliki stasiun berjarak 70 m dari alun-alunnya dan lurus ke Utara sejauh 753 m hingga pelabuhan.

Tabel 3.5 Fasilitas Transportasi Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Sarana Transportasi						
	Stasiun			Pelabuhan			
	Nama	Letak dari Alun-alun	Jarak	Nama	Letak dari Alun-alun	Jarak	
Batavia 1 (Stp)	Beos	Barat	0,243 km	Sunda Kelapa	Utara	1,33 km	
Batavia 2 (Knp)	Weltevreden	Timur	0 km	Tanjung Priok	Timur Laut	7,53 km	
Cirebon	Kejaksanaan	Barat	0,420 km	Cirebon	Utara	1,3 km	
Tegal	Tegal	Timur	0,45 km	Tegal	Utara	1,65 km	
Pekalongan	Pekalongan	Barat	1,26 km	Pekalongan	Utara	4,43 km	
Semarang	Tawang	Utara	1 km	Tanjung Mas	Utara	1,75 km	
Surabaya 1 (Ktb)	Gubeng	Tenggara	0,74 km	Tanjung Perak	Utara	6,14 km	
Surabaya 2 (Kpj)	Pasar Turi	Barat daya	0,85 km	Tanjung Perak	Utara	3,85 km	
Surabaya 3 (Jm)	Kota	Tenggara	0,82 km	Tanjung Perak	Utara	3,96 km	
Pasuruan	Pasuruan	Utara	0,5 km	Pasuruan	Timur Laut	1,4 km	
Probolinggo	Probolinggo	Utara	0,04 km	Probolinggo	Utara	0,753 km	

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Selain kereta api, sarana transportasi lainnya adalah pelabuhan untuk perhubungan laut. Namun, hak pengelolaannya juga tidak diserahkan kepada *gemeente* melainkan *Staatspoor*. Sedangkan pelabuhan dikelola oleh perusahaan Haven Badrift.

3.1.2.2 Jalan

Terdapat banyak ruas jalan di setiap kota yang menjadi tanggung jawab tiap *gemeente* baik jalan lama maupun baru. Jalan digunakan sebagai jalur perjalanan sekaligus pembatas untuk tiap area ataupun bangunan di kota. Setiap alun-alun juga dilewati jalan untuk aksesnya, Jalan tersebut beberapa merupakan jalan utama kota, namun ada juga yang hanya berupa jalan sekeliling alun-alun.

Berdasarkan tabel 3.5 tidak semua alun-alun memiliki jalan di keempat sisinya. Terdapat 3 alun-alun yang memiliki jalan tidak di keempat sisinya, yaitu Alun-alun *Stadhuis* di batavia yang hanya dilalui oleh jalan Kali Besar Utara di sebelah Utaranya, dan Jalan Pos Kota di sisi Selatannya. Alun-alun lainnya memiliki ruas jalan hanya di tiga sisi adalah alun-alun Jembatan Merah di Surabaya. Alun-alun tersebut di batasi oleh jalan Garuda di sebelah Utara, jalan Internatio di sebelah Barat, dan jalan Kembang Japun di sebelah Selatan sepanjang 1,57 km. Di Alun-alun Ketabang Surabaya, juga dibatasi oleh Jalan Sedap malam di sebelah Timur, Jalan Jaksa Suprpto di Sebelah Barat, dan dilewati Jalan Subeng Pojok di sebelah Selatan yang merupakan jalan utama sepanjang 1 km. Kota-kota lainnya memiliki 4 jalan di keempat sisi alun-alunnya.

Hal lain yang berbeda adalah adanya alun-alun yang dilewati jalan akses ke daerah lain di salah satu sisinya dan alun-alun yang hanya dikelilingi jalan pendek. Alun-alun kota Pekalongan misalnya di lewati jalan Alun-alun yang menghubungkan Dekoro dan Pekalongan Timur sejauh 1,2 km. Jalan utama lainnya di temukan di kota Pasuruan yang berada di sisi Barat alun-alun. Jalan tersebut sepanjang 1 km dari Trejeng hingga Kebonagung.

Tabel 3.6 Daftar jalan yang melewati alun-alun kota *Gemeente*

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Sisi Alun-alun											
	Utara			Timur			Selatan			Barat		
	Nama Jalan	Lebar		Nama Jalan	Lebar		Nama Jalan	Lebar		Nama Jalan	Lebar	
Batavia 1 (Stp)	Kali Besar Utara	9 m	o	o	o	o	Pos Kota	10 m	o	o	o	o
Batavia 2 (Knp)	Medan Merdeka Utara	38 m	Medan Merdeka Timur	25 m	Medan Merdeka Selatan	30 m	Medan Merdeka Barat	50 m	Medan Merdeka Barat	50 m	Medan Merdeka Barat	50 m
Cirebon	Kejaksanaan	12 m	RA. Kartini	12 m	setapak	4 m	setapak	4 m	setapak	4 m	setapak	4 m
Tegal	Alun-alun	9,5 m	Alun-alun Timur	10 m	Alun-alun	9 m	Masjid	8 m	Masjid	8 m	Masjid	8 m
Pekalongan	Alun-alun Utara	8 m	Alun-alun Timur	9 m	Alun-alun Selatan	9 m	Alun-alun	9 m	Alun-alun	9 m	Alun-alun	9 m
Semarang	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Surabaya 1 (Ktb)	o	o	Sedap Malam	15 m	Gubeng Pojok	13 m	Jaksa Agung Suprpto	18 m	Jaksa Agung Suprpto	18 m	Jaksa Agung Suprpto	18 m
Pasuruan	Alun-alun Utara	9 m	Alun-alun Timur	9 m	Alun-alun Selatan	10 m	Hayam Wuruk	12 m	Hayam Wuruk	12 m	Hayam Wuruk	12 m
Probolinggo	Stasiun	8 m	Alun-alun Timur	9 m	Gatof Subroto	12 m	Alun-alun Barat	9 m	Alun-alun Barat	9 m	Alun-alun Barat	9 m

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Gemeente Batavia memiliki ruas jalan yang sangat banyak menghubungkan antar daerah, dan kawasan. Terdapat satu ruas jalan utama yang langsung menghubungkan kota lama Batavia dan kota baru Weltevreden, yaitu jalan Molenvliet. Alun-alun di kota Batavia (*Stadhuisplein*) hanya terdapat jalan kecil yang melintas di sisi Utara, Timur, dan Selatan alun-alun tersebut. Jalan-jalan tersebut hanya berfungsi untuk memisahkan alun-alun dengan bangunan di sekitarnya sehingga menunjukkan bahwa alun-alun *Stadhuisplein* adalah bagian halaman *Stadhuis*.

Weltevreden yang merupakan kota baru memiliki ruas jalan yang lebih banyak, namun di daerah tersebut terdapat beberapa ruas jalan yang menjadi orientasi bangunan di kawasan ini, yaitu: Noordwijk, Rijswijk, *Koningsplein* West, *Koningsplein* South, *Koningsplein* East, *Koningsplein* North. Jalan *Koningsplein* mengelilingi alun-alun *Koningsplein*.

Kota Cirebon memiliki satu alun-alun yang dibuat pada masa kolonial, dibatasi jalan di sisi Utara dan Timurnya. Sementara di sisi Selatan dan Barat hanya terdapat jalan setapak. Jalan tersebut terlihat pada peta 2.6 yang memisahkan alun-alun dengan pendopo di sebelah Timurnya. Sedangkan di sebelah Selatan alun-alun atau Utara Tajug Agung hanya dibuat jalan kecil.

Kota Pekalongan juga merupakan salah satu kota yang dilewati Jalan Raya Pos, memiliki orientasi jalan kota yang searah jalan raya pos pada masa *gemeente*. Alun-alun dikelilingi oleh jalan yang sekaligus memberikan batasan dengan bangunan-bangunan lain disekelilingnya, termasuk pendopo di sebelah Selatan alun-alun.

Di Kota Semarang terdapat jalan raya pos dari arah barat hingga stasiun kotanya (Poncol) kemudian belok ke Selatan. Permukiman sebagian besar berorientasi ke jalan tersebut. Alun-alun Johar yang kini menjadi pasar Johar awalnya hanya terdapat satu ruas jalan di sisi Utara. Alun-alun tersebut seolah menyatu menjadi halaman masjid.

Kota Surabaya memiliki permukiman yang berorientasi pada sungai Brantas, begitu pula jalan utama yang melintas di kota tersebut yang sejajar dengan sungai Brantas. Jalan utama di kota tersebut adalah jalan Heerenweg dan Heerenstraat. Alun-alun Surabaya (kini Tugu Pahlawan) dikelilingi jalan yang

juga memisahkan alun-alun tersebut dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya.

Kota Pasuruan di belah oleh jalan *Heerenstraat* yang melintas dari Trejeng hingga Kebonagung. Alun-alun kotanya berada di sebelah Timur jalan tersebut tepatnya di dekat Trejeng. Jalan *Heerenstraat* tersebut memisahkan alun-alun dan masjid sejauh 9 meter, sehingga memberi kesan alun-alun tersebut bukan bagian dari masjid. Alun-alun Pasuruan sendiri dikelilingi oleh jalan yang ujung awalnya dari *Heerenstraat* dan kembali lagi di ujung lainnya. Pola jalan tersebut memperlihatkan bahwa jalan di sekeliling alun-alun memang sengaja untuk membatasi alun-alun tersebut.

Bentuk jalan di kota Probolinggo memiliki pola yang teratur dan memberi kesan membagi-bagi kota tersebut menjadi beberapa bagian. Jalan tersebut tertata seperti kotak-kotak yang makin besar berpangkal pada alun-alun.

3.1.3 Alun-alun, dan Fasilitas Perekonomian (Pasar)

Fasilitas perekonomian yang tersedia dan menjadi kewenangan *gemeente* adalah pengadaan dan pengelolaan pasar. Lokasi pasar di setiap kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa berbeda-beda. Pada awalnya menurut konsep alun-alun di Jawa, maka pasar biasanya terletak dekat dengan alun-alun. Biasanya di sebelah Utara atau Timur alun-alun.

Pasar memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sebuah kota. Letak pasar pada konsep alun-alun kota-kota di Jawa umumnya berada di sebelah Timur. Namun, tidak semua kota ditemukan pasar di dekat alun-alunnya pada masa *gemeente*. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Pasar di dekat Alun-alun Kota *Gemeente*

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Nama Pasar	Posisi terhadap Alun-alun		Ket.
		Letak	Jarak	
Batavia 1 (Stp)	o	o	o	o
Batavia 2 (Knp)	Gambir	Timur	0 m	sudah tidak ada
Cirebon			0 m	
Tegal	Alun-alun	Timur	270 m	sudah tidak ada
Pekalongan	Alun-alun	Timur	20 m	sudah tidak ada
Semarang	Johar	Timur	0 m	sudah diperbaharui
Surabaya 1 (Ktb)	o	o	o	o
Surabaya 2 (Kpj)	Pasar Besar	Timur	80 m	tinggal bangunan
Pasuruan	Poncol	Selatan	40 m	sudah tidak ada
Probolinggo	o	o	o	o

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Terdapat 4 alun-alun di 3 kota yang tidak ditemukan pasar di dekatnya. Hal tersebut diperkirakan karena pada kota-kota dengan konsep kolonial seperti Batavia memiliki alun-alun yang semula berada di dalam benteng, sehingga keberadaan pasar otomatis di luar benteng. Sementara kota Surabaya memiliki Pasar Besar Surabaya berada pada 80 m sebelah Timur dari alun-alun (Tugu Pahlawan). Surabaya termasuk kota yang dikuasai oleh kolonial belanda cukup lama, sehingga sebagian besar bangunan pemerintahan dan tata kotanya dirancang oleh Belanda. Termasuk tata letak pasarnya yang mengutamakan kemudahan akses ke pasar, sehingga dibuat lebih dekat dengan alun-alun.

Alun-alun di kota Batavia dibangun pada masa kekuasaan kolonial, baik alun-alun *Stadhuisplein* maupun *Koningsplein*. Alun-alun *Stadhuisplein* merupakan bagian dari bangunan-bangunan kolonial di dalam benteng, sehingga tidak ditemukan adanya pasar di dekat alun-alun tersebut. Pasar atau pusat perdagangan justru ditemukan di daerah pecinan Glodok.

Koningsplein di Weltevreden dirancang sebagai permukiman eropa sehingga keberadaan pasar di daerah tersebut berupa pasar tradisional di temukan di daerah Gambir. Pasar Gambir terletak di sekitar stasiun kereta api Gambir. Jadi langsung bersebelahan dengan *Koningsplein*.

Di Kota Cirebon yang memiliki alun-alun dan tata ruang kota di sekitar alun-alun yang tidak memperlihatkan adanya pasar di dekatnya. Alun-alun tersebut termasuk dalam deretan bangunan-bangunan pemerintahan dan permukiman kolonial. Pasar di dekat alun-alun justru ditemukan di sisi lain kota yang masih merupakan daerah kesultanan Cirebon.

Letak pasar yang berada di sebelah Utara alun-alun terlihat di kota Tegal, namun pasar tersebut tidak berada pada sekitaran alun-alun. Letaknya sejauh 373 m dari alun-alun.

Pasar di kota Pekalongan berada di sebelah Timur alun-alun kotanya yang saat ini sudah tidak ditemukan lagi sisanya. Letaknya tepat diseberang jalan Timur alun-alun.

Kota Semarang memiliki alun-alun yang berada di depan masjid Besar Kauman dan sekarang telah menjadi Pasar Johar. Pasar di alun-alun kota Semarang awalnya berada di dekat pohon Johar namun diperluas dan alun-alun tersebut menjadi pasar.

Di dekat alun-alun kota Pasuruan tidak ditemukan pasar pada masa *gemeente*. Hal tersebut mungkin karena perkembangan permukiman yang cukup pesat sehingga pasar tidak berada di dekat alun-alun. Pasar yang disebut sebagai Pasar Poncol justru berada di sebelah selatan masjid jami Pasuruan. Begitupula Kota Probolinggo juga tidak memiliki pasar dekat dengan alun-alunnya.

3.1.3 Alun-alun, dan Fasilitas Publik Lainnya

Fasilitas publik yang berkaitan dengan alun-alun tidak semuanya ditangani langsung oleh pemerintah *gemeente* namun tetap menjadi bagian dari kota dan masih di bawah kekuasaan administratif pemerintahan. Bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan yang digunakan masyarakat secara umum dan cenderung terletak di dekat alun-alun kota. Keberadaan bangunan tersebut juga cenderung lebih dulu ada sebelum status *gemeente* diberlakukan dan telah menjadi bagian dari alun-alun kota. Bangunan tersebut antara lain:

3.1.3.1 Masjid

Masjid biasanya ada di dekat alun-alun kota-kota di Jawa. Masjid tersebut berada di sebelah Barat alun-alun dan pintu masuknya menghadap ke alun-alun tersebut. Masjid di dekat alun-alun terlihat pada kota-kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa, antara lain:

Tabel 3.8 Masjid di dekat Alun-alun

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Nama Masjid	Orientasi terhadap Alun-alun	
		Letak	Jarak (km)
Batavia 1 (Stp)	o	o	o
Batavia 2 (Knp)	o	o	o
Cirebon	Tajug Agung (At Taqwa)	Selatan	0
Tegal	Masjid Agung Tegal	Barat	0,01
Pekalongan	Masjid Jami Kauman Pekalongan	Barat	0,01
Semarang	Masjid Besar Kauman	Barat	0
Surabaya 1 (Ktb)	o	o	o
Surabaya 2 (Kpj)	o	o	o
Pasuruan	Masjid Agung Pasuruan	Barat	0,02
Probolinggo	Masjid Agung Raudatul Janah	Barat	0,01

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Dari tabel 3.8 tersebut terlihat 6 kota memiliki bangunan masjid di dekat alun-alunnya dan merupakan bangunan lama. Masjid-masjid tersebut hanya berjarak 0,01 sampai 0,02 km dari alun-alun dan semuanya berada di sisi Barat, kecuali Cirebon yang memiliki Tajug Agung di sebelah Selatan. Hal tersebut diperkirakan karena masjid di Indonesia memang selalu memiliki pintu masuk di sebelah Timur.

Kota Jakarta dan Surabaya tidak memiliki masjid di dekat alun-alunnya. Hal tersebut diperkirakan karena alun-alun di kedua kota tersebut dibangun oleh pemerintah kolonial sehingga masjid tidak menjadi bagian dari kotanya.

3.1.3.2 Gereja

Bangunan publik lainnya yang merupakan tempat peribadatan adalah gereja. Pada beberapa kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa yang dikuasai oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadikan gereja adalah bagian dari kotanya. Hal tersebut terlihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Bangunan Gereja di dekat Alun-alun

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Nama Gereja	Orientasi terhadap Alun-alun	
		Letak	Jarak (km)
Batavia 1 (Stp)	De Oude Hollandsche Kerk	Barat	0,01
Batavia 2 (Knp)	Immanuel	Timur	0,03
Cirebon	o	o	o
Tegal	o	o	o
Pekalongan	o	o	o
Semarang	o	o	o
Surabaya 1 (Ktb)	o	o	o
Surabaya 2 (Kpj)	Roman Chatolic Church	Utara	0,14
Pasuruan	o	o	o
Probolinggo	o	o	o

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Kota yang memiliki gereja berdekatan dengan alun-alun kotanya hanya dua, yaitu Batavia dan Surabaya. Di Batavia, kedua alun-alunnya memiliki gereja yang hanya berjarak 0,01 km—0,03 km. Letak kedua gereja tersebut berbeda, pada alun-alun *Stadhuisplein* di Batavia lama, gereja terletak di sebelah Barat alun-alun. Sementara itu, di *Koningsplein* memiliki gereja yang terletak di sebelah Timurnya.

Di Kota Surabaya, gereja di temukan di dekat alun-alun kepanjen. Gereja tersebut berada di sebelah Utara alun-alun dan berjarak cukup jauh yaitu 0,14 km. Bangunan gereja tersebut bersebelahan dengan bangunan kantor pos besar Surabaya.

3.1.3.3 Kantor Pos

Kantor pos hampir ada di setiap kota di Jawa terutama di pesisir Utara Jawa. Kantor pos tersebut ditemukan di beberapa kota diletakkan berdekatan dengan alun-alun kotanya. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Kantor Pos
(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Letak Administratif	Orientasi terhadap alun-alun	
		Letak	Jarak
Batavia 1 (Stp)	Batavia (oud)	Utara	0,01
Batavia 2 (Knp)	Weltevreden	Timur	1,26
Cirebon	Kebonbaru	Utara	1,42
Tegal	Kemandunga	Utara	1
Pekalongan	Panjang Wetan	Barat Laut	1,38
Semarang	Sekayu	Utara	0,14
Surabaya 1 (Ktb)	o	o	o
Surabaya 2 (Kpj)	Kepanjen	Utara	0,03
Pasuruan	Trajeng	Utara	0,03
Probolinggo	Mayangan	Selatan	0,37

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Semua kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa memiliki kantor pos yang letaknya berbeda-beda terhadap alun-alun kotanya. Bangunan kantor pos tersebut beberapa terletak lebih dekat dengan alun-alun, yaitu di alun-alun *Stadhuisplein* yang memiliki kantor pos berada di 0,01 km di sebelah Utaranya. Kantor pos lainnya yang dekat dengan alun-alun berada di kota Surabaya (Kepanjen), dan Pasuruan yang masing-masing berjarak 0,03 km di sebelah Utara alun-alun.

4.1.4.4 Penjara

Penjara di dekat alun-alun dijumpai pada kota Probolinggo, yang letaknya 10 meter di sebelah Timur. Penjara tersebut masih dapat dijumpai hingga saat ini dan masih difungsikan. Bangunan penjara tersebut juga tidak terlalu jauh jaraknya dengan bangunan pendopo bupati yaitu di sebelah Utara atau depan pendopo

bupati. Sebenarnya konsep penjara dekat dengan alun-alun juga di jumpai di *Stadhuis* pada kota Batavia.

3.1.3.4 Jaringan Pipa dan Sumur Artesis

Informasi mengenai jaringan pipa diperoleh dari sejarah Batavia yang pada dasarnya jaringan tersebut sudah dibangun dari sebelum *gemeente*. Namun, tidak diperoleh informasi mengenai titik-titik sumur dan persebarannya di Batavia ataupun kota lainnya. Sehingga analisa mengenai pola dan keberadaan sumur-sumur artesis pada Kota *Gemeente* akan sulit dilakukan.

Informasi mengenai sumur artesis di Batavia pun hanya sepintas dalam sejarahnya, dan dengan perkembangan Batavia hingga menjadi Jakarta yang begitu pesat, maka akan sangat sulit ditelusuri keberadaan sumur-sumur tersebut dilapangan.

3.1.4.6 Menara Air

Bangunan menara air hanya di temukan di dekat alun-alun kota Tegal, dan Pasuruan. Di kota Tegal, menara air terletak pada 183 meter sebelah Timur diantara alun-alun dan stasiun kereta, sedangkan di Pasuruan terletak di 34 meter sebelah Utara alun-alunnya. Menara air di alun-alun kemungkinan untuk menampung air yang digunakan bagi bangunan-bangunan disekitar alun-alun.

3.1.4.7 Tempat Rekreasi

Salah satu bentuk pelayanan masyarakat adalah pengadaan dan pengelolaan tempat rekreasi. Tiap-tiap kota di Jawa memiliki tempat rekreasi yang berbeda-beda dan memunculkan keunikannya masing-masing. Bahkan tempat-tempat rekreasi kota-kota di Jawa telah terkenal hingga ke manca negara. Berikut adalah daftar tempat rekreasi yang ada di kota-kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa.

Di Batavia, tempat rekreasi yang tersedia berada di pusat kota adalah Weltevreden yang memiliki berbagai lokasi tujuan, antara lain: Istana Gubernur Jenderal, Sepanjang Waterloplein, Museum Gajah, dan *Koningsplein*. Berdasarkan data dari peta tahun 1914 dan *Guide and Tourist Handbook "Java The*

Wonderland”, juga terdapat hotel sebagai fasilitas wisata di Batavia. Tempat-tempat wisata tersebut beserta hotel-hotel yang tersedia di Batavia memiliki posisi dan jarak terhadap pusat kota sebagai berikut:

Tabel 3.11 Lokasi Wisata dan Hotel di Weltevreden tahun 1920

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

No.	Tempat	Posisi dari Alun-alun
	Wisata	
1	Museum Gajah	74 m ke Barat
2	Istana Gubernur Jenderal	67 m ke Utara
3	Waterloplein	600 m ke Timur
4	<i>Koningsplein</i>	o
	Hotel	
1	des Indes	560 m ke Barat Laut
2	Der Netherlander	210 m ke Utara
3	Java	269 m ke Timur Laut
4	de France	525 m ke Utara
5	Official Tourist Berrau	290 m ke Utara

Keterangan: Jauh (> 1 km), Sedang (0,1—1 km), Dekat (< 0,1 km)

Kota batavia merupakan pusat kekuasaan Hindia Belanda sejak lama, sebagian besar kota merupakan daerah hunian orang-orang eropa yang di tandai dengan banyaknya bangunan-bangunan kolonial. Sehingga wajar apabila jumlah hotel dan layanan wisata di kota tersebut lebih lengkap dari kota-kota lainnya. Sebagai contoh dalam tabel 3.11 diperlihatkan bahwa bangunan-bangunan hotel dan lokasi wisata berada terkumpul di Weltevreden yang merupakan daerah pusat kota baru.

Di Cirebon, tidak terdapat tempat wisata di sekitar alun-alun selain alun-alun itu sendiri. Namun, di sebelah Barat alun-alunnya berdasarkan peta 2.6 terdapat bekas Hotel Wilhelmina. Penanganan *gemeente* untuk tempat wisata di Cirebon tidak terlalu banyak informasi diperoleh. Kota Cirebon memiliki bentuk yang merupakan kota lama dan tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan kekuasaan kolonial. Hal tersebut karena masih adanya kekuasaan lokal yang

meskipun pada akhirnya hanya menjadi simbol. Bangunan kolonial lebih banyak berada di daerah pesisir dan sekitaran jalan Siliwangi.

Sedangkan kota Tegal, dan Pekalongan juga tidak terdapat informasi mengenai lokasi wisata yang dikelola oleh *Gemeente*. Tegal dan Pekalongan adalah daerah pesisir yang memiliki kawasan laut. Kemungkinan wisata yang dikembangkan adalah wisata bahari. Di sekitar alun-alun kedua kota tersebut tidak terdapat tempat wisata selain alun-alunnya dan masjid.

Hal tersebut juga terjadi di Pasuruan, dan Probolinggo yang merupakan kota-kota yang didirikan untuk pengembangan komoditi gula dan hasil bumi lainnya. Sementara di Surabaya dan Semarang, terdapat beberapa hotel yang hampir sama dengan Batavia. Di Semarang terdapat hotel des Indes, Centrum, Jansen, du Pavillon, New Holland, dan Hindia. Namun, semua hotel tersebut memiliki letak yang jauh dari alun-alun dan tersebar.

Kota Surabaya juga memiliki beberapa hotel yang tersebar di kota tersebut, antara lain: hotel *des Indes* (850 m), *Wijhveld* (1,11 km) dan *Oranje* (1 km). Letak hotel-hotel tersebut yang relatif jauh dari pusat kota atau alun-alun mungkin disebabkan bangunan kota di sekitar alun-alun Surabaya memang telah penuh. Bila dilihat dari peta Surabaya tahun 1920, maka terlihat bahwa pembangunan kota Surabaya searah dengan Sungai Brantas yang membelah kota.

Indikator keberadaan lokasi dan fasilitas wisata pada kota-kota *gemeente* tidak dapat dibandingkan satu kota dengan kota lainnya. Kota-kota tersebut memiliki bentuk dan struktur serta kompleksitas yang berbeda-beda. Begitupula tujuan pendiriannya, semua kota memiliki karakter wisata yang berbeda. Mengingat pula tidak semua kota memiliki bangunan pariwisata di sekitar alun-alunnya. Maka, objek dan fasilitas wisata tidak menjadi bahan analisa pola bangunan di sekitar alun-alun.

3.2 Bangunan disekitar Alun-alun Berdasarkan Periodenya

Berdasarkan periode pembangunan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun terbagi menjadi bangunan yang dibangun sebelum periode pemberlakuan status *gemeente* dan bangunan yang dibangun setelah status *gemeente* di berlakukan. Pola yang dilihat berdasarkan periode pembangunan akan memperlihatkan bentuk perubahan yang dilakukan oleh *gemeente*. Perubahan tersebut merupakan hasil dari pemberlakuan sistem *gemeente*.

Tabel 3.12 Periode Pendirian Bangunan di Sekitar Alun-alun Kota *Gemeente* di Pesisir Utara Jawa
(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Jenis Bangunan	Tahun	Digunakan
Batavia 1 (Stp)	Balaikota	1627	--1923
	Stasiun Beos	1870	
	Gereja Belanda Baru	1640	
	Kantor Pos	1746	
	Kantor Pengadilan	1870	
Batavia 2 (Knp)	Balaikota	?1700	1926--1942
	Stasiun Weltevreden	1821	
	Pasar Gambir	1920	1920--1942
	Gereja Immanuel	1834	
Cirebon (Kjs)	Masjid	1918	
	Rumah Bupati	?	
	Hotel Wilhelmina	1900	
Tegal	Pendopo	? lama	
	Menara Air	? 1800an	
	Pasar Alun-alun	? lama	
	Stasiun Tegal	1885	
Pekalongan	Pendopo	? lama	
	Masjid Agung	? lama	
	Pasar Alun-alun	? lama	
Semarang	Masjid Kauman	1741	
	Pasar Johar	1935	
	Kantor Pos Kota	?1800an	
Surabaya 1 (Ktb)	Balaikota	1923	1927
Surabaya 2 (Kpj)	Balaikota	?1930	
	Pasar Besar	?lama	
	Gereja Katolik Roma	1822	
	Kantor Pos Kepanjen	?1800	

Kota	Jenis Bangunan	Tahun	Digunakan
Pasuruan	Pendopo	? lama	
	Poncol	? lama	
	Kantor Pos Trajeng	? 1800	
Probolinggo	Pendopo	? lama	
	Stasiun Probolinggo	Akhir abad 19	

Keterangan: ? - tidak diketahui, lama – diperkirakan dari masa sebelum kolonial

Dari tabel 2.12 terlihat bahwa hanya 3 bangunan di 2 kota yang dibangun pada periode pemberlakuan *gemeente*. Hal tersebut diperkirakan karena periode pemberlakuan *gemeente* yang terlalu singkat menjadikan pemerintahan *gemeente* meskipun memiliki otonomi, namun tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan dalam perkembangan arsitektural kota.

Pola yang terlihat pada bangunan-bangunan di dekat alun-alun kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa memiliki kecenderungan menggunakan bangunan lama untuk dimanfaatkan kembali. Hal tersebut kemungkinan karena adanya faktor penataan kota yang masih tidak memerlukan perubahan. Hanya kota Surabaya yang membangun balaikota dekat alun-alun pada masa *gemeente*. Bila dikaitkan dengan bentuk kotanya, kota besar seperti Semarang dan Surabaya memiliki potensi lebih besar untuk melakukan penataan dan pembangunan, namun pada kota besar semacam Batavia, justru tidak terlihat adanya bangunan baru. Hal tersebut dikarenakan Batavia telah memiliki struktur kota yang masif dan bukan bangunan pemerintahan di pusat kotanya lagi yang menjadi konsentrasi pembangunan.

Kota Batavia bila dikaitkan dengan sejarahnya, telah memiliki bangunan-bangunan yang cukup baik di pusat kotanya, namun kekurangan dalam pengadaan permukiman. Bangunan yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur dan penambahan permukiman bagi penduduk Batavia yang terus meningkat. Pemanfaatan bangunan-bangunan lama yang masih ada menjadi pilihan yang lebih baik daripada mendirikan bangunan baru.

Sedangkan kota Cirebon yang memiliki pemerintahan pribumi sebelumnya dan masih memiliki bangunan keraton sebagai tempat tinggal sultan. Maka

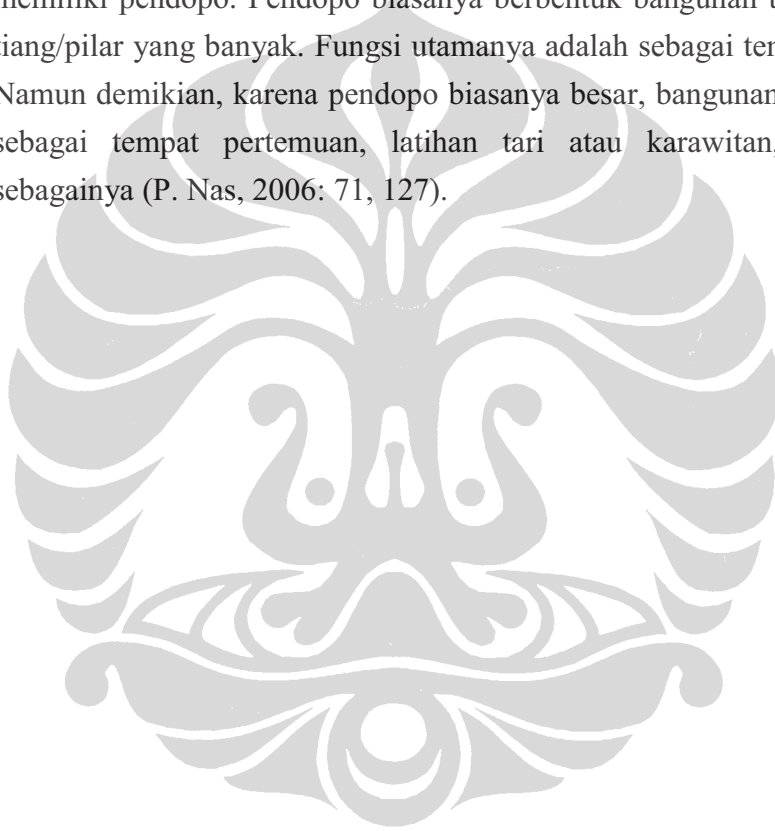
pendirian bangunan baru tidak berada di pusat kota lamanya, melainkan di daerah lain. Alun-alun baru dibuat di daerah Kejaksaan dan sekitarnya masih merupakan daerah perkantoran dan permukiman Eropa yang pada masa *gemeente* menjadi pusat kegiatan administratif. Bangunan-bangunan di sekitar alun-alun tetap dipertahankan bahkan hingga sekarang, kecuali bangunan Tajug Agung yang kini menjadi Masjid At Taqwa.

Kota-kota seperti Tegal, Pekalongan, dan Pasuruan, Probolinggo merupakan kota *gemeente* yang tidak terlalu besar. Alun-alun kota tegal tidak terlalu banyak mengalami perubahan pada masa *gemeente*. Begitupula Pekalongan, Pasuruan, dan Probolinggo, yang tidak terlalu pesat mengalami penambahan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Sehingga bangunan yang ada masih dapat dimanfaatkan hingga *gemeente* diberlakukan. Kondisi alun-alun tetap dipertahankan diperkirakan karena pembangunan kota bukan merupakan tujuan utama pada masa *gemeente*. Kota-kota tersebut hanya merawat dan memanfaatkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang ada.



Catatan:

¹ Pendopo (bahasa Jawa: *pendâpâ*, berasal dari kata 'mandapa' dari bahasa Sanskerta yang artinya bangunan tambahan) adalah bagian bangunan yang terletak di muka bangunan utama. Sejumlah tipe bangunan rumah tradisional Sumatra, Semenanjung Malaya, Jawa, Bali, dan Kalimantan diketahui memiliki pendopo sebagai hal yang "wajib". Struktur ini kebanyakan dimiliki rumah besar atau keraton, letaknya biasanya di depan *dalem*, bangunan utama tempat tinggal penghuni rumah. Masjid-masjid berarsitektur asli Nusantara, kerap kali juga memiliki pendopo. Pendopo biasanya berbentuk bangunan tanpa dinding dengan tiang/pilar yang banyak. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat menerima tamu. Namun demikian, karena pendopo biasanya besar, bangunan ini difungsikan pula sebagai tempat pertemuan, latihan tari atau karawitan, rapat warga, dan sebagainya (P. Nas, 2006: 71, 127).



BAB 4

POLA PUSAT KOTA *GEMEENTE* DI PESISIR UTARA JAWA

Pola pada alun-alun kota, didasari konsep alun-alun merupakan bagian dari arsitektur setiap kota yang menjadi area publik (ruang terbuka publik) dan sebagai penunjuk pusat kota yang ada. Ruang publik dipahami sebagai ruang yang diperuntukkan sebagai sebuah ruang kota yang dapat diakses secara umum dan menawarkan daya tarik, peristirahatan, pasar dan upacara rakyat, tempat untuk berjumpa teman dan menghabiskan waktu serta berfungsi sebagai tempat aktifitas komersial seperti pasar, kegiatan budaya, dan tempat berdirinya kantor pelayanan umum (Shirvani, 1985: 60, Michael Webb, 1990: 150, Rob Krier, 1979: 58).

Alun-alun kota di Jawa, umumnya telah ada sejak masa sebelum kolonial, sehingga konsep yang masih di bawa pun adalah konsep kota kerajaan Jawa yang kemudian dikembangkan dengan adanya perubahan status dan penguasa kota. Berdasarkan landasan berpikir yang dijelaskan pada bab 1 halaman 10—12 maka konsep alun-alun kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa pada awal abad ke-20 dapat diuraikan.

Konsep yang pertama mengenai pola adalah berdasarkan pada pengertian alun-alun dan posisinya terhadap bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Konsep tersebut menjelaskan bahwa alun-alun dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu: (1) alun-alun yang bukan bagian bangunan, dan (2) alun-alun sebagai bagian dari bangunan.

Kedua kategori tersebut dilihat dari keberadaan alun-alun secara fisik yang dipisahkan dengan bangunan lain atau justru menyatu dengan bangunan lainnya. Segi bentuk tidak menjadi permasalahan yang signifikan pada alun-alun tersebut. Jarak dengan bangunan lain menjadi pertimbangan yang utama dalam menguraikan bentuk tersebut. Selain itu, keberadaan jalan di sekeliling alun-alun juga membuktikan adanya batas alun-alun terhadap bangunan lainnya.

Pola lainnya dijelaskan berdasarkan kondisi Morfologi kota-kota Jawa masa kolonial atau yang disebut juga kota Hindia Belanda. Kota-kota tersebut hingga masa *gemeente* memiliki coraknya sendiri, sehingga dapat dibedakan ke

dalam kategori morfologi kota-kota di pesisir Utara Jawa dari segi morfologinya. Kota-kota tersebut selanjutnya dibagi ke dalam 3 kategori kota, yaitu: pertama arsitektur kota Kolonial Awal, kedua pola arsitektur pusat kota Hindia Belanda Lama (*Oud Indische Stad*), dan ketiga disebut pola arsitektur pusat kota Hindia Belanda Baru (*Nieuwe Indische Stad*).

Uraian tersebut selanjutnya menjadi dasar pada pengelompokan pola bangunan-bangunan di sekitar *gemeente* di pesisir utara Jawa. Dimulai dari pengelompokan pola berdasarkan letak bangunan pada konsep alun-alun sebagai bagian atau bukan bagian bangunan lain. Pengelompokan berikutnya berdasarkan morfologi kota yang tumbuh dari awal hingga yang terlihat pada masa *gemeente*.

Bentuk pemerintahan kolonial mengalami perubahan sejak masa VOC hingga akhir masa kolonial juga berpengaruh terhadap kedudukan dan wewenang kota. Hingga menjadi *gemeente* terlebih dahulu kota-kota tersebut mengalami beberapa fase perubahan kedudukan terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut kemungkinan juga mempengaruhi prioritas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kota.

Perbedaan kedudukan dari setiap kota sebelum pemberlakuan *gemeente* membuat karakter tiap kota berbeda ketika menjadi *gemeente*. Meskipun status *gemeente* menjadikan semua kota tersebut memiliki wewenang yang sama, namun karena latar belakang perkembangan kedudukan sebelumnya yang berbeda membuat bentuk kota yang berbeda.

4.1 Pola Alun-alun

Pola alun-alun dan bangunan-bangunan disekitarnya pada pusat kota *gemeente* di pesisir utara Jawa di bagi menjadi 2 kategori sebagai berikut: (1) alun-alun bukan bagian dari bangunan, dan (2) alun-alun sebagai bagian dari bangunan yang ada.

Konsep peletakan bangunan di sekitar alun-alun kota di Jawa cenderung berada di sebelah Selatannya. Kosep tentang keberadaan alun-alun dan letak bangunan pemerintahan tersebut diambil dari “*Encyclopedie van Nederlandsch Indie*” (Paulus, 1917:31) yang menyatakan:

“Di hampir setiap tempat kediaman Bupati, seorang kepala distrik di Jawa, orang selalu menjumpai adanya sebuah lapangan rumput yang luas, yang dikelilngi

oleh pohon beringin di tengahnya. Lapangan inilah yang dinamakan 'alun-alun'. Di kota-kota bekas kerajaan kuno (seperti Surakarta dan Yogyakarta), mempunyai dua buah 'alun-alun', sebuah terletak di Utara Kraton dan sebuah lagi terletak disebelah Selatan Kraton. Di permukaan alun-alun tersebut tidak boleh ada rumput tumbuh dan diatasnya ditutup dengan pasir halus. Di bagian Selatan dari alun-alun tersebut terdapat pintu masuk yang menuju ketempat kediaman Raja atau Bupati, dimana disana berdiri sebuah pendopo. Pegawai negeri atau orang-orang lain yang ingin bertemu dengan raja atau Bupati menunggu waktunya disana untuk dipanggil, jika Raja merestui untuk menerima kedatangan mereka. Oleh sebab itu pendopo tersebut kadang-kadang dinamakan juga Paseban (asal kata seba). Pada masa lampau di alun-alun tiap hari Sabtu atau Senin (Seton atau Senenan) diadakan permainan Sodoran (pertandingan diatas kuda dengan menggunakan tombak yang ujungnya tumpul), atau pertandingan macan secara beramai-ramai yang dinamakan 'rampog macan'. Pada waktu pertunjukan ini raja duduk di Siti Inggil, tempat yang paling tinggi dimuka pintu Kraton. Pada tempat-tempat Bupati terdapat panggung untuk melihat tontonan tersebut. Di Jawa Barat juga terdapat alun-alun kecil di depan rumah kepala desa, tapi alun-alun tersebut tidak dikelilingi oleh pohon beringin. Mesjid seringkali terdapat disebelah Barat dari alun-alun".

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bangunan pemerintahan merupakan bagian dari alun-alun yang dapat memiliki berbagai macam bentuk. Namun, pada perkembangannya kota-kota di Jawa tidak berhenti dengan konsep tersebut. Sebagian kota-kota di Jawa mengalami perubahan kekuasaan dari penguasa pribumi menjadi penguasa kolonial Hindia Belanda yang beberapa bergerak seiring. Perubahan tersebut membawa dampak adanya pembangunan kota yang mengikuti rancangan berpikir pemerintahnya tersebut. Kota-kota kolonial mengangkat rancangan konsep peletakan alun-alun yang memadukan keberadaan pemerintahan pribumi dan pemerintah kolonial. Hal tersebut terlihat pada pernyataan dalam Dimensi Arsitektur "Alun-alun sebagai Identitas Kota di Jawa, Dulu dan Sekarang" (Handinoto, 1992: 11-13) bahwa:

"Dalam sistim pemerintahan kolonial, Jawa dibagi menjadi 3 Propinsi, 18 Karesidenan yang masing-masing dibawahih oleh seorang residen, serta 66 Kabupaten yang masing-masing dikuasi secara bersama oleh seorang Asisten Residen (orang Belanda) dan seorang Bupati (Pribumi). Pada pusat kota Kabupaten inilah dibakukan semacam lambang pemerintahan bersama antara Asisten Residen dengan Bupati dalam bentuk phisik. Wujudnya adalah bentuk phisik tradisional berupa rumah Bupati dengan pendopo didepannya. Di depan rumah Bupati tersebut terdapat alun-alun yang ditumbuhi oleh dua buah atau kadang-kadang sebuah pohon beringin. Rumah Bupati terletak disebelah Selatan alun-alun, di sebelah Barat terdapat mesjid Agung sesuai dengan kraton Yogyakarta atau Surakarta. Di sebelah Utara alun-alun yang berhadapan dengan rumah Bupati sekarang diletakkan kantor Asisten Residen Belanda, yang mengingatkan kita pada benteng *Vastenburg* dan *Vredenburgh* di hadapan Kraton Yogyakarta dan Surakarta. Di sekitar alun-alun juga terdapat pasar, stasiun bus, serta daerah pertokoan yang terletak tidak jauh dari bangunan pemerintahan dan alun-alunnya. Model alun-alun inilah yang kemudian berkembang sebagai prototype identitas kota Jawa pada jaman kolonial".

Dari pernyataan tersebut maka alun-alun kota kolonial memiliki komponen-komponen, antara lain: Rumah Bupati dengan Pendopo, Masjid, Kantor pemerintahan Belanda, pasar dan pertokoan, dan Stasiun bus. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah bangunan-bangunan yang berkaitan dengan wewenang *gemeente*, antara lain: bangunan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bangunan perekonomian, bangunan fasilitas transportasi, dan bangunan lainnya yang menjadi fasilitas publik di dekat alun-alun. Pada perkembangannya juga dibangun stasiun kereta.

Bentuk bangunan-bangunan di sekitar alun-alun berbeda di tiap kota dengan latar belakang kedudukan yang berbeda di setiap kota. Kota Batavia misalnya sejak awal merupakan kota pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang kedudukannya otomatis lebih tinggi di banding kota-kota lainnya. Sebagai pusat juga akan mendapatkan prioritas lebih dalam pembangunan infrastrukturnya, sehingga pada saat pemberlakuan *gemeente* maka infrastruktur tersebut sudah tersedia dan hanya tinggal pemanfaatannya.

Hal tersebut berbeda dengan kota Tegal yang kedudukannya sebelum pemberlakuan *gemeente* adalah *afdeling* di bawah karesidenan Pekalongan. Kedudukan tersebut membuat prioritas terhadap pembangunan kota Tegal tidak terlalu signifikan. Perhatian pemerintah pusat pun kurang dibandingkan dengan pusat karesidenannya yaitu Pekalongan. Sehingga meskipun status *gemeente* diberlakukan tidak terlalu banyak merubah kota tersebut. Mengingat juga, pemberlakuan *gemeente* hanya dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang sekitar 36 tahun.

Bila dilihat kembali pada alun-alun kota *gemeente* di Pesisir Utara Jawa, maka bangunan-bangunan tersebut dapat tersusun sebagai berikut:

Tabel 4.1 Bangunan di dekat alun-alun kota *Gemeente* di Jawa

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Bangunan Pemerintahan		Stasiun	Pasar	Tempat Ibadah	Bangunan Lain		
	Pribumi	Eropa				Kantor Pos	Penjara	Menara air
Batavia 1 (Stp)	0	1	1	0	1	1	1	0
Batavia 2 (Knp)	0	1	1	1	1	0	0	0
Cirebon (Kjs)	0	1	0	0	1	0	0	0
Tegal	1	0	1	1	1	0	0	1
Pekalongan	1	0	0	1	1	0	0	0
Semarang	0	0	0	1	1	1	0	0
Surabaya 1 (Ktb)	0	1	0	0	0	0	0	0
Surabaya 2 (Kpj)	0	1	0	1	1	1	0	0
Pasuruan	1	0	0	1	1	1	0	1
Probolinggo	1	0	1	0	1	0	1	0
Jumlah	6	4	4	8	10	4	2	2

Keterangan: 0 : tidak ada, 1 : ada.

4.1.1 Alun-alun yang bukan Bagian Bangunan.

Kategori pertama ditemukan pada alun-alun Batavia (*Koningsplein*), Tegal, Surabaya (Kepanjen), Pasuruan, dan Probolinggo. Pola tersebut terlihat pada alun-alun yang memiliki pembatas berupa jalan dengan bangunan-bangunan lainnya.

Susunan bangunan pada alun-alun tersebut memiliki kesamaan pada peletakan bangunan yang bukan menjadi bagian dari alun-alun.

Tabel 4.2 Bangunan terhadap Alun-alun bukan bagian suatu Bangunan

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Bangunan Pemerintahan	Stasiun	Pasar	Masjid	Gereja	Menara Air
Batavia (<i>Koningsplein</i>)	Selatan (Balaikota)	Timur	Timur		Timur	
Tegal	Selatan (Pendopo)	Timur	Timur	Barat		Timur
Surabaya (Kepanjen)	Timur (Balaikota)	o	Timur		Barat	
Pasuruan	Utara (Pendopo)	o	Selatan	Barat		Utara
Probolinggo	Selatan (Pendopo)	Utara	o	Barat		

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa terdapat 3 alun-alun yang memiliki bangunan pemerintahan di sebelah Selatan, yaitu Batavia (*Koningsplein*) yang memiliki balaikota, Tegal dan Probolinggo yang memiliki Pendopo. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk peletakan bangunan pemerintahan di sebelah Selatan cenderung terlihat pada alun-alun dengan konsep pribumi kecuali Batavia.

Batavia memindahkan kegiatan pemerintahannya di Selatan *Koningsplein* pada masa *gemeente* tahun 1923 sehingga kemungkinan peletakannya memiliki konsep tertentu sangat diragukan. Hal tersebut berbeda dengan peletakan pendopo di Tegal dan Probolinggo yang merupakan tempat kediaman penguasa setempat.

Letak Balaikota di Surabaya (Kepanjen) justru berada di sebelah Timur, yang membuat semakin berbeda dengan Batavia yang juga sama-sama Balaikota.

Universitas Indonesia

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam peletakan balai kota yang dibangun atau dipindahkan pada masa *gemeente* tidak didasari konsep tata kota yang sama di semua kota. Pola tidak akan terlihat dari bangunan-bangunan pemerintahan di kota-kota yang memiliki alun-alun bukan bagian dari bangunan.

Pola juga tidak terlihat pada kota yang memiliki bangunan penguasa pribumi namun alun-alunnya bukan bagian dari bangunan. Hal tersebut ditunjukkan pada perbedaan keletakan pendopo di Tegal, Pasuruan, dan Probolinggo. Bila dikaitkan dengan konsep tata kota masa kolonial yang disampaikan oleh Handinoto (1992) maka kemungkinan letak pendopo di Pasuruan yang berada di sisi Utara seharusnya bangunan tersebut adalah bangunan Eropa. Sementara dari temuan diperoleh bahwa bangunan di Pasuruan tersebut adalah bangunan lokal. Maka dapat diasumsikan bahwa kota Pasuruan memiliki struktur yang di rancang berbeda dengan kota-kota lainnya.

Keunikan kota Pasuruan lainnya adalah adanya pasar di sebelah Barat Daya atau Selatan Masjid. Sementara di semua kota memiliki pasar berada di sebelah Timur alun-alunnya. Posisi tersebut bisa dikatakan sebagai pola yang dipertahankan pada masa *gemeente*.

Pola alun-alun lain yang dipertahankan adalah keberadaan masjid di sebelah Barat alun-alun kota. Sementara gereja tidak terdapat aturan khusus dan bisa diletakkan di mana saja. Masjid dan gereja tersebut bukanlah bangunan baru, namun pada masa *gemeente* kedua bangunan tersebut dipertahankan oleh pemerintah *gemeente* sebagai bagian dari kota. Sehingga dapat diasumsikan bahwa bangunan-bangunan di sekitar alun-alun yang berupa bangunan peribadatan tetap dipertahankan oleh pemerintah *gemeente*.

Jadi letak bangunan pada pusat kota *gemeente* yang memiliki alun-alun bukan bagian dari bangunan tidak memperlihatkan pola pada bangunan pemerintahan, stasiun kereta api, pasar, gereja, dan menara air. Justru yang terlihat adalah pola yang mempertahankan letak bangunan peribadatan berupa Masjid di sisi Barat alun-alunnya. Kota tua yang dikaji adalah kota-kota yang memiliki bentuk tata kota tertentu dan mendapat pengaruh dari pemerintahan kolonial.

4.1.2 Alun-alun sebagai Bagian Bangunan.

Alun-alun bagian dari bangunan berarti memiliki struktur denah yang menyatu dengan bangunan di salah satu sisinya. Alun-alun kategori kedua ditemukan pada alun-alun Batavia (*Stadhuisplein*), Cirebon (Kejaksan), Pekalongan, Semarang, dan Surabaya (Ketabang). Pada alun-alun yang menjadi halaman bangunan memiliki keletakan yang berbeda. Hal tersebut tergantung pada jenis dan fungsi bangunannya.

Tabel 4.3 Bangunan di dekat Alun-alun yang Merupakan bagian suatu Bangunan (Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Alun-alun	Bagian dari bangunan	Bangunan Pemerintahan	Pasar	Masjid	Gereja
Batavia (<i>Stadhuisplein</i>)	Pemerintahan	Selatan (Balaikota)	o	o	Barat
Cirebon (Kjs)	Peribadatan	o	o	Selatan	o
Pekalongan	Pemerintahan	Selatan (Pendopo)	Timur	Barat	o
Semarang	Peribadatan	o	Timur	Barat	o
Surabaya (Ketabang)	Pemerintahan	Utara (Balaikota)	o	o	o

Bangunan yang memiliki alun-alun pada tabel 4.3 terlihat yang paling banyak adalah bangunan pemerintahan. Sedangkan kota Semarang justru alun-alun menjadi halaman depan masjid pada masa *gemeente*. Hal tersebut berdasarkan identifikasi bahwa pada masa pemberlakuan *gemeente* di kota Semarang, di dekat alun-alun tidak ditemukan lagi adanya keraton atau pendopo. Kondisi seperti itu membuat alun-alun menjadi bagian dari dari masjid dan terhubung langsung sebagai halamannya.

Empat kota yang lain memiliki alun-alun yang menjadi bagian dalam denah bangunan pemerintahan, antara lain: Batavia (*Stadhuisplein*), dan Surabaya (Ketabang) menjadi bagian dari bangunan Balaikota. Namun, letak bangunan di kedua kota tersebut berbeda, di Batavia, bangunan balaikota terletak di sebelah

Selatan alun-alun, sedangkan di Surabaya justru terletak di sebelah Utara. Kemungkinan perbedaan tersebut karena perbedaan masa mendirikan bangunan dan keletakan terhadap pelabuhan sebagai pintu masuk kota. Di Batavia (*Stadhuisplain*) merupakan bangunan lama dari abad ke-17, sehingga konsep bangunan kotanya masih menjadi bagian dari benteng Batavia yang menghadap ke arah laut. Sedangkan di Surabaya, bangunan balaikota Ketabang berada di daerah yang lebih dalam dan merupakan bangunan baru yang didirikan pada tahun 1923 sehingga tidak mengikuti konsep benteng laut melainkan konsep tata kota kolonial akhir. Sehingga keletakan bangunan terhadap arah laut bukan menjadi yang utama.

Cirebon memiliki alun-alun Kejaksaan yang terlihat terbagi menjadi wilayah alun-alun dan Tajug Agung. Alun-alun tersebut hanya di pisahkan jalan kecil dengan Tajug Agung sehingga kemungkinan, alun-alun masih merupakan bagian dari bangunan peribadatan tersebut. Bangunan pendopo yang merupakan tempat tinggal bupati di sebelah Timurnya dipisahkan dengan Jalan yang cukup besar.

Pola terlihat pada letak pasar yang berada di sisi Timur alun-alun di semua kota, kecuali Batavia dan Surabaya yang memang tidak memiliki pasar di dekat alun-alunnya. Letak pasar di dekat alun-alun bukan merupakan hal baru, karena pada konsep kota Jawa, sebelum pemerintahan kolonial pun, alun-alun memang memiliki pasar. Di Batavia tidak ditemukan pasar karena bangunan-bangunan kolonial sejak awal memang dipisahkan dengan pasar, sehingga tidak ditemukan di dekat alun-alunnya. Begitupula di Surabaya yang pusat pemerintahannya juga dibangun terpisah tanpa keharusan ada pasar didekatnya.

Pola berikutnya terlihat pada keletakan masjid di sebelah Barat alun-alun yang merupakan bangunan sebelum masa *gemeente* namun tetap dipertahankan. Letak tersebut juga diikuti oleh bangunan bekas Gereja Belanda Baru. Meskipun masjid dan gereja merupakan bangunan yang berbeda secara ideologi, namun ternyata memiliki kesamaan pada letaknya. Bila dikaitkan dengan sejarahnya, bangunan masjid dan gereja di keempat kota tersebut sama-sama bangunan lama abad ke-16 atau 17, maka pada masa tersebut kemungkinan peletakan bangunan

alun-alun selalu menempatkan bangunan ibadah di sebelah Baratnya. Kemungkinan yang lainnya adalah keletakan gereja tersebut hanya mempertimbangkan kondisi teknis saja.

Masjid diletakkan di sebelah Barat karena bangunan tersebut memiliki arah kiblat yang berada di sebelah Barat. Pintu masuk Masjid di Indonesia selalu berada di sebelah Timur. Keuntungan lainnya masjid diletakkan di sebelah Barat alun-alun adalah penggunaan alun-alun sebagai halaman tambahan bagi masjid.

Di Alun-alun Batavia (*Stadhuisplein*) sebenarnya juga terdapat bangunan lain berupa Kantor Pos di sebelah Utara dan Kantor Pengadilan di sebelah Timur. Kedua bangunan tersebut berbeda dengan alun-alun kota lain yang meletakkan pasar di sebelah Timur.

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pola hanya terlihat pada peletakan pasar dan fasilitas peribadatan (masjid, dan gereja) yang tetap dipertahankan. Sementara bangunan pemerintahan pada 3 kota yang dibangun sejak sebelum pemberlakuan *gemeente* memiliki letak di sebelah Selatan. Hal tersebut menunjukkan adanya latak yang dipertahankan, akan tetapi bangunan yang lebih baru di Surabaya sudah tidak mengikuti pola tersebut. Maka pola keletakan bangunan pemerintahan pada masa *gemeente* tidak ditemukan.

4.2 Pola berdasarkan Morfologi Kota

Perkembangan kota-kota di Jawa tidak berhenti pada konsep kota kerajaan Jawa atau kolonial awal. Sebagian kota-kota di Jawa mengalami perubahan kekuasaan dari penguasa pribumi menjadi penguasa kolonial Hindia Belanda yang beberapa bergerak seiring. Perubahan tersebut membawa dampak adanya pembangunan kota yang mengikuti rancangan berpikir pemerintahnya tersebut. Kota di Jawa dalam perkembangannya setelah kolonial Belanda berhasil menguasai seluruh pulau Jawa, antara tahun 1800-1900 disebut sebagai kota "*indisch*". Pada prinsipnya bentuk kota "*indisch*" ini terdiri atas pusat kota, yang berupa alun-alun dengan bangunan pemerintahan dan keagamaan di sekelilingnya, serta bangunan fasilitas umum yang letaknya tidak jauh dari pusat kota tersebut.

Kota *Indisch* di Jawa dibagi menjadi 2 bagian, pertama disebut sebagai “*oud Indische Stad*”, dan kedua disebut sebagai “*Nieuwe Indische Stad*” (Handinoto, 1998: 5). Yang dimaksud dengan kota Hindia Belanda lama (*Oud Indische Stad*) adalah sebuah kota yang pusat kotanya (daerah alun-alun), terdapat pemisahan antara pemerintahan kolonial Belanda (yang diwakili oleh Residen atau Asisten Residen) dengan gedung pemerintahan Pribumi (yang diwakili oleh Bupati). Jadi pada dasarnya gedung pemerintahan yang termasuk mengatur kota tersebut dalam satu kota terpisah satu sama lain. Gedung pemerintahan Pribumi biasanya terletak di Selatan alun-alun. Sedangkan kantor Asisten Residen ada di bagian lain di kota tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Hindia Belanda Baru (*Nieuwe Indische Stad*), adalah sebuah kota yang pusat kotanya (daerah alun-alun) antara pusat pemerintahan Pribumi (Kabupaten) dengan pusat pemerintahan Kolonial Belanda (Kantor Asisten Residen) ada disekitar alun-alun tersebut.

Batavia dan Surabaya adalah contoh kota *Indisch* yang berbeda dengan kota-kota tersebut. Kota Batavia dan Surabaya merupakan dua kota yang tidak memiliki struktur pemerintah pribumi dan kolonial, karena telah dikuasai secara penuh oleh pemerintah kolonial sejak masa VOC. Oleh sebab itu, pembangunan dan rancangan kotanya hampir semua merupakan peninggalan kolonial, sehingga morfologi kotanya berbeda dengan kota lainnya. Maka kota semacam ini disebut sebagai kota kolonial awal.

Dari uraian morfologi kota tersebut, maka kota-kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa memiliki 3 bentuk yang dapat dilihat dari bangunan-bangunan di sekitar alun-alunnya. Bentuk pertama adalah arsitektur kota Kolonial Awal, kedua disebut arsitektur kota Hindia Belanda Lama (*oud Indische Stad*), ketiga adalah arsitektur kota Hindia Belanda Baru (*Nieuwe Indische Stad*).

4.2.1 Alun-alun pada arsitektur Kota Kolonial Awal

Kota di Jawa tidak semuanya mempertahankan pemerintahan lokalnya hingga pemberlakuan *gemeente*, namun beberapa kota justru mendirikan pusat kota kolonial saja. Hal tersebut dapat di temukan pada kota-kota Batavia,

Surabaya, dan Semarang yang sejak masa VOC telah dikuasai oleh orang-orang Eropa. Bangunan-bangunan berikut alun-alun yang dibuat pun sebagian besar merupakan bangunan kolonial awal, sehingga tidak lagi ditemukan bangunan pemerintah lokalnya.

Bangunan-bangunan di sekitar alun-alun kota tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Bangunan di dekat Alun-alun Kota Kolonial Awal

(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Bangunan di sekitar Alun-alun				
	Pemerintahan	Pasar	Gereja	Stasiun	Kantor Pos
Batavia (Stadhuisplein)	Selatan (Balaikota)	o	Barat (Bekas Gereja)	Selatan	Utara
Batavia (Koningsplein)	Selatan (Balaikota)	Timur	Timur	Timur	o
Semarang	o	Timur	o	o	Utara
Surabaya (Ketabang)	Utara (Balaikota)	o	o	o	o
Surabaya (Kepanjen)	Timur (Balaikota)	Timur	Utara	o	Utara

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa dari 5 alun-alun yang ada di 3 kota, tidak menunjukkan pola sama sekali pada peletakan bangunan pemerintahan. Bangunan balaikota di sebelah Selatan alun-alun hanya ada di kota Batavia. Di Semarang, bangunan pemerintahan tidak berada di sekitar alun-alun lamanya. Dalam hal ini, kota Semarang tidak memiliki alun-alun di pusat kota kolonialnya. Namun, juga tidak ditemukan bangunan pemerintahan lokal di dekat alun-alun lamanya. Bangunan yang tersisa hanya masjid dan pasar Johar yang saat ini telah diperluas hingga menutupi alun-alun. Pusat kota Semarang berada di sekitar Tugu Muda saat ini.

Letak pasar di sebelah Timur menunjukkan keseragaman di 3 alun-alun. Namun, tidak ditemukan pasar di dekat alun-alun Batavia (Stadhuisplein), dan Surabaya (Ketabang). Pasar tersebut merupakan pasar tradisional yang bertahan hingga masa *gemeente*.

Pola tidak terlihat pada bangunan gereja dan stasiun di dekat alun-alun, selain karena tidak semua kota memiliki bangunan tersebut, juga karena ketidaksamaan letaknya terhadap alun-alun. Bangunan-bangunan tersebut hanya terdapat di beberapa kota saja dan pada dasarnya menunjukkan adanya pemukiman Eropa. Gereja memang tidak memiliki aturan khusus dalam meletakkan arah pintu masuknya, sehingga dapat dibangun di sebelah Barat maupun Timur alun-alun.

Pola terlihat pada keletakan bangunan kantor pos yang berada di sebelah Utara pada 3 alun-alun. Meskipun pada dua alun-alun, tidak terdapat kantor pos, namun pola tersebut dapat terlihat.

Alun-alun Surabaya Ketabang memiliki kekhususan karena tidak memiliki komponen lain selain bangunan Balaikota. Balaikota beserta alun-alun tersebut memang sengaja dibangun pada masa *gemeente* sebagai kantor walikota yang baru. Bangunan tersebut dibangun tanpa mempertimbangkan ketersediaan bangunan lain. Bila dibandingkan dengan kota Batavia, maka terlihat adanya pengaruh periode pembangunan terhadap peletakan bangunan. Kota Batavia, semua bangunan yang masih ada dan dimanfaatkan pada masa *gemeente* merupakan bangunan lama dari abad ke-18, sedangkan di Surabaya merupakan bangunan baru abad ke-20. Terdapat kesamaan pada masa *gemeente*, bangunan balaikota tidak dipilih berdasarkan konsep keletakannya yang khusus, akan tetapi hanya berdasarkan pertimbangan praktis pada tata kotanya.

Kota kolonial awal sangat terlihat berbeda pada setiap kotanya dipengaruhi pula adanya perbedaan kedudukan pemerintahan kota sebelum pemberlakuan *gemeente*. Perbedaan kedudukan tersebut cukup memperlihatkan bahwa perhatian pemerintahan kolonial berbeda pada kota dengan tingkat yang berbeda pula. Kota-kota Batavia, Semarang, dan Surabaya merupakan pusat-pusat pemerintahan Hindia Belanda yang secara otomatis memiliki prioritas utama dalam pembangunannya.

Kota Batavia sebagai tempat kedudukan gubernur Jenderal memiliki prioritas utama sehingga infrastrukturnya lebih kompleks di banding kota-kota lainnya. Batavia juga memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan kota-kota

lainnya dengan kebutuhan penduduk yang tinggi. Hal tersebut disebabkan perekonomian dan pemerintahan kolonial ditempatkan di kota tersebut. *Gemeente* merupakan representasi dari desentralisasi sehingga kewenangan yang besar diberikan pada setiap daerah. Namun, pengaruh sentralisasi yang sebelumnya diberlakukan memiliki pengaruh yang lebih besar.

Status kota pada hierarki pemerintahan mempengaruhi bentuk kota yang akhirnya bentuk kota tampak berbeda pada saat pemberlakuan *gemeente*. Selain itu juga pengaruh dari peningkatan pertumbuhan penduduk yang menuntut kebutuhan infrastruktur publik yang lebih tinggi pula.

4.2.2 Alun-alun pada arsitektur Kota Hindia Belanda Lama (*oud Indische Stad*)

Alun-alun kota Hindia Belanda Lama merupakan kota-kota yang memisahkan pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan Pribumi. Maka bangunan pemerintahan kolonial Belanda tidak ditemukan di sekitar alun-alun kotanya. Kota dengan bentuk morfologi semacam ini ditemukan pada kota Pasuruan, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon.

Bentuk dan peletakan bangunan di sekitar alun-alun kota tersebut masih merupakan bangunan pribumi, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Bangunan di dekat Alun-alun Kota Hindia Belanda Lama
(Dok: Y. R. Priyantoko, 2009)

Kota	Bangunan di sekitar Alun-alun		
	Pemerintahan	Pasar	Masjid
Cirebon	Pendopo (Timur)	o	Selatan
Tegal	Pendopo (Selatan)	Timur	Barat
Pekalongan	Pendopo (Selatan)	Timur	Barat
Pasuruan	Pendopo (Utara)	Selatan	Barat

Sebagian besar bangunan pemerintahan berada di sebelah Selatan, yaitu berada di 4 alun-alun berupa Pendopo. Kota Cirebon memiliki bangunan yang disebut pendopo adalah bangunan rumah dinas pemerintah Cirebon yang letaknya di sebelah timur Alun-alun kejaksaan. Sedangkan kota Pasuruan memiliki

Universitas Indonesia

bangunan pendopo yang berada di sebelah Utara alun-alunnya. Sedangkan di kota Tegal dan Pekalongan memiliki latar belakang pemerintahan dipegang oleh bupati maka tidak memiliki keraton selain pendopo di tempat tinggal dan kerja bupatinya.

Pola tidak terlihat dari keletakan bangunan pemerintahan tersebut, karena adanya perbedaan di salah satu kota. Bangunan pemerintahan pribumi pada kota Hindia Belanda lama yang dipertahankan pada masa *gemeente* tetap didekat alun-alun tidak memperlihatkan keseragaman konsepnya.

Pola juga tidak terlihat pada peletakan bangunan Pasar yang pada 3 kota memiliki pasar di sebelah Timur alun-alunnya. Namun, di Pasuruan, pasarnya justru di sebelah Selatan.

Bangunan masjid merupakan bangunan pribumi yang tetap dipertahankan di dekat alun-alun kota Hindia Belanda Lama. Begitupula keletakannya yang tetap berada di sebelah Barat alun-alun.

Kota Hindia Belanda Lama tidak terlalu merubah bangunan di sekitar alun-alun kotanya yang merupakan pusat pemerintahan pribumi. Namun, pihak kolonial mendirikan bangunan pemerintahan dan fasilitas lainnya di lokasi yang berbeda. Sehingga konsep keletakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar alun-alun masih menggunakan konsep kota-kota Jawa tradisional dari masa Islam.

4.2.3 Alun-alun pada arsitektur Kota Hindia Belanda Baru (*Nieuwe Indische Stad*)

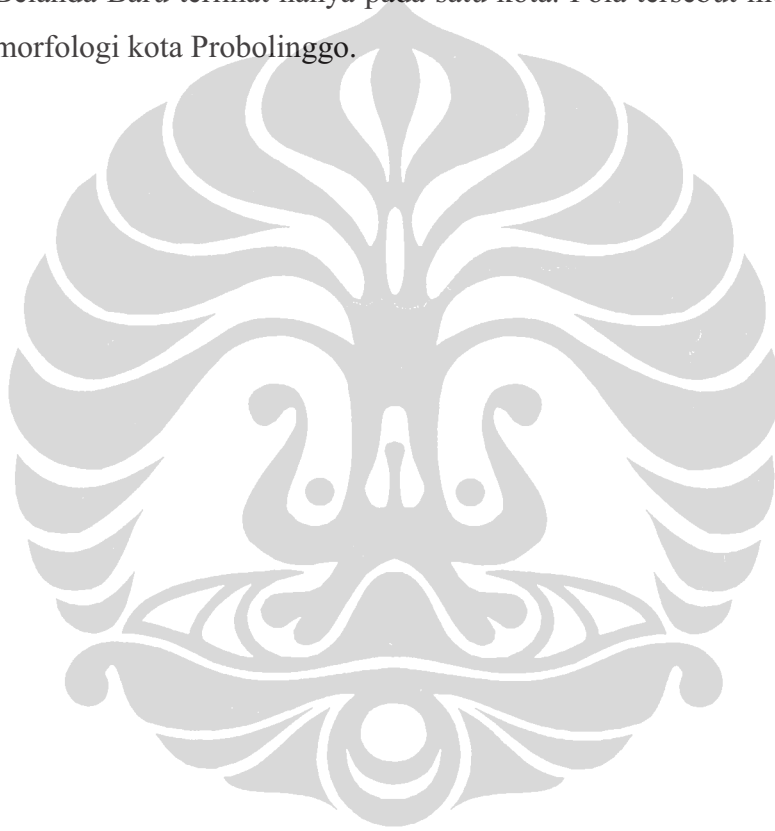
Kota Hindia Belanda Baru memiliki bangunan pemerintahan kolonial dan pribumi di pusat kotanya (alun-alun). Bangunan pemerintahan pribumi biasanya berada di sebelah Selatan alun-alun, sedangkan pemerintahan kolonial di sebelah Utara. Kota-kota yang memiliki morfologi Kota Hindia Belanda Baru tersebut adalah Probolinggo.

Alun-alun Probolinggo berdekatan dengan bangunan pemerintahan berupa pendopo dan kantor Residen lurus 840 m di Selatannya. Di sebelah Timur terdapat Penjara yang menunjukkan adanya pembauran pengaruh kolonial di pusat

kota. Masjid tetap dipertahankan di sebelah Barat alun-alun. Sementara di sebelah Utara terdapat stasiun kereta api yang berbatasan jalan dengan alun-alun.

Bangunan-bangunan pemerintah kolonial dan fasilitasnya berada di sepanjang jalan Suroyo (*Heerenstraat*). Jalan tersebut melintas sepanjang 1 km dari alun-alun kota Probolinggo ke Jalan Panglima Sudirman. Bangunan-bangunan yang terdapat di jalan tersebut antara lain Kantor Pos, Gereja Katolik Probolinggo, dan Graha Binaharja.

Pola bangunan di sekitar alun-alun *Gemeente* dari morfologi kota Hindia Belanda Baru terlihat hanya pada satu kota. Pola tersebut menunjukkan kekhasan morfologi kota Probolinggo.



BAB 5

PENUTUP

5. Kesimpulan

Pola pusat kota pada delapan kota *gemeente* di pesisir Utara Jawa dianalisis dengan menggunakan konsep letak bangunan di sekitar alun-alun. Dasar pada pengelompokan pola bangunan-banguna di sekitar *gemeente* di pesisir Utara Jawa. Dimulai dari pengelompokan pola berdasarkan letak bangunan pada konsep alun-alun sebagai bagian atau bukan bagian bangunan lain. Pengelompokan berikutnya berdasarkan morfologi kota yang tumbuh dari awal hingga yang terlihat pada masa *gemeente*.

Pengelompokan pertama membagi alun-alun kota *gemeente* menjadi 2, yaitu: (1) alun-alun yang bukan bagian bangunan, dan (2) alun-alun sebagai bagian bangunan. Sedangkan pengelompokan kedua berdasarkan morfologi kotanya. Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 3 kategori kota yang selanjutnya di lihat pusat kotanya (alun-alun), yaitu: (1) alun-alun kota Hindia Belanda Lama, (2) alun-alun kota Hindia Belanda Baru, dan (3) alun-alun kota Kolonial awal.

Kelompok alun-alun yang bukan bagian dari bangunan menghasilkan analisis yang memperlihatkan bahwa pola tidak ditemukan pada bangunan pemerintahan, stasiun kereta api, pasar, gereja, dan menara air. Bangunan bangunan tersebut terlihat tersebar di sisi alun-alun yang berbeda di setiap kota. Namun, pola terlihat pada letak bangunan masjid yang tetap dipertahankan keberadaannya. Pada alun-alun yang bukan bagian bangunan tersebut terkumpul 5 alun-alun di 5 kota.

Alun-alun yang menjadi bagian dari bangunan terdapat 5 alun-alun di 5 kota. Meskipun 3 alun-alun merupakan bagian dari bangunan pemerintahan, pola justru tidak terlihat pada bangunan pemerintahan. Pola terlihat pada bangunan masjid yang kebetulan juga sama letaknya dengan gereja di Batavia. Letak masjid tersebut memperlihatkan adanya sesuatu yang dipertahankan di dekat alun-alun

mengingat sebagian besar penduduk telah menganut Islam. Sehingga masjid di pusat kota merupakan hal penting yang dipertahankan oleh pemerintah kolonial.

Letak masjid tersebut diperkuat dengan adanya pola yang sama pada alun-alun yang bukan bagian dari bangunan dan alun-alun yang menjadi bagian dari bangunan. Letak masjid sama-sama di sebelah Barat, dan tetap dilokasinya meskipun pemerintahan kolonial berkuasa di Jawa. Masjid tersebut mungkin sengaja dipertahankan untuk tetap menarik simpati penduduk pribumi yang mayoritas menganut agama Islam. Selain itu, acara-acara tradisi daerah yang dilaksanakan di dekat alun-alun selalu melibatkan masjid yang ada di dekatnya.

Pola yang berkaitan dengan morfologi kota, seperti dijelaskan sebelumnya yang terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama adalah alun-alun kota *gemeente* yang memperlihatkan morfologi kota Hindia Belanda Lama tidak memperlihatkan pola pada bangunan pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari adanya bangunan pemerintahan di kota Pasuruan yang letaknya berbeda dengan kota-kota lainnya. Pola justru terlihat pada bangunan Masjid yang dipertahankan dari masa sebelum pemberlakuan *gemeente*.

Morfologi kota Hindia Belanda Baru hanya terlihat pada satu kota yaitu Probolinggo. Bentuk pada kota tersebut memperlihatkan pusat kota yang menyatukan bangunan pribumi dan bangunan Eropa. Pola tidak dapat terlihat dari satu kota, sehingga kota *gemeente* di Pesisir Utara Jawa yang dianggap memiliki morfologi kota Hindia Belanda Baru dianggap tidak ada.

Kota Kolonial Awal memperlihatkan bahwa pada 3 kota di pesisir Utara Jawa, yaitu: Batavia, Semarang, dan Surabaya. Kota-kota tersebut tidak memperlihatkan pola pada bangunan-bangunan pemerintahan dan gereja. Namun, pola masih dapat terlihat dari adanya bangunan pasar dan kantor pos. Kedua bangunan tersebut merupakan bangunan lama yang masih dipertahankan letaknya hingga pemberlakuan *gemeente*. Kota Semarang memiliki perbedaan dengan Batavia dan Surabaya karena masih memiliki masjid dan alun-alun kota sebelum masa kolonial. Namun, di kota tersebut telah dibangun pula bangunan-bangunan

Eropa sebagai pusat kota lainnya, sehingga fungsi alun-alun dirubah menjadi pasar. Bangunan kolonial yang tersisa hanya kantorpos di sebelah Utara alun-alun.

Dari semua uraian tersebut maka dapat terlihat bahwa bangunan-bangunan pusat kota atau disekitar alun-alun kota-kota *gemeente* di Pesisir Utara Jawa tidak memperlihatkan pola yang signifikan. Meskipun pemberlakuan *gemeente* berarti memberikan hak otonomi kepada setiap daerah, namun tidak mendorong pemerintah tiap daerah tersebut untuk mendirikan bangunan baru di pusat kotanya. Sehingga kondisi pusat kota yang ada justru merupakan sisa-sisa bangunan lama yang masih digunakan pada masa *gemeente*.

Pola yang terlihat sebagian besar hanya pada bangunan masjid yang juga bukan merupakan bangunan baru. Bangunan masjid tersebut tetap berada pada tempatnya meskipun pemerintahan telah dikuasai oleh kolonial Belanda. Sebagian besar kota *gemeente* memiliki bangunan Eropa yang terpisah antara bangunan pribumi dan bangunan pemerintah Hindia Belanda. Bangunan Eropa tersebut dibangun di daerah lain dan bukan di sekitar alun-alun kotanya.

Pola terlihat berbeda pada kota Batavia, Semarang, dan Surabaya yang memang merupakan kota kolonial awal. Ketiga kota tersebut telah dikuasai oleh pemerintah kolonial sejak masa VOC, sehingga bangunan-bangunan yang ada di kota tersebut sebagian besar adalah bangunan kolonial awal. Bangunan kolonial awal yang terlihat antara lain: *Stadhuis* (Balaikota), Kantor Pos, Gereja, dan Pasar. Perkembangan selanjutnya, juga ditemukan adanya stasiun kereta api di dekat alun-alunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- BAPEDA Kota Pekalongan, *Kajian dalam Rangka Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan*. Pekalongan: BAPEDA. 2006.
- Batavia Vereeniging Toeristenverkeer*, Java The Wonderland. Batavia: Official Tourist Bureau. 1900: 12-26
- Carmona, Matthew. *Public places, urban spaces: the dimensions of urban design*. New York: Architectural Press. 2003.
- Christaller, Walter. Die zentralen Orte in Suddeutschland. Jena: Gustav Fischer, 1933. diterjemahkan oleh Charlisle W. Baskin, *Central Places in Southern Germany*. Prentice Hall, 1966.
- Day, Clive. *The Dutch in Java*. London: Oxford University Press. 1972.
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978.
- Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. *Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007:
- Fagan, Brian M., *In The Beggining: An Introduction to Archaeology*, Totont: Little Brown & Co. 1975.
- Furnivall, J.S., *Netherlands India: a study of plural economy* (Cambridge: at the University Press. 1967.
- Groeneveldt, W.P. Historical notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese sources. Djakarta: C.V. Bhratara. 1960.
- Hall, M., & Stephen Silliman.W., ed., *Historical Archaeology*. Malden: Blackwell Publishing. 2006.
- Handinoto. “Alun-alun Sebagai Indentitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang” dalam Majalah arsitektur *Dimensi Edisi 18*. 1992. Surabaya: Pusat Penelitian Arsitektur Universitas Kristen Petra. 1992.

- Handinoto. *Perkembangan Kota Dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra Surabaya dan Penerbit Andi Yogyakarta. 1996.
- Handinoto. “Bentuk dan Struktur Kota Probolinggo Tipologi Sebuah Kota Administratif Belanda” dalam Majalah arsitektur *Dimensi Edisi 23*. 1997. Surabaya: Pusat Penelitian Arsitektur Universitas Kristen Petra. 1997.
- Handinoto. “Perubahan Besar Morfologi Kota-Kota Di Jawa Pada Awal Dan Akhir Abad ke 20” dalam Majalah arsitektur *Dimensi Edisi 26*. 1998. Surabaya: Pusat Penelitian Arsitektur Universitas Kristen Petra. 1998.
- Handinoto. *Pasuruan dan Arsitektur Etnis China Akhir Abad 19 dan Awal Abad 20*. Prosiding Simposium Nasional Arsitektur Vernakular 2, Pertemuan Arsitektur Nusantara. Bandung. 2008.
- Handoyo, B.H.C., *Kilas balik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta : Sebuah Tinjauan historis yuridis*. Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya. 1998.
- Haryoto, Kunto. 1986. *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung: PT. Granesia.
- Heuken, Adolf. *Tempat-tempat bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka. 1997.
- Ioannidis C., Chlepa H., 1999. “Spatial Information System for the geometric documentation and restoration studies of monuments: An application to the wall of ancient Messene”, dalam *International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing (IAPRS), Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol. XXXII*, part 5W11, Thessaloniki: IAPRS.
- Kasmidi, Hartono. et al., *Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950*, Semarang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985.
- Kaloh, Johan. 2003. *Kepala daerah: pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krier, Rob. *Urban Space*. New York. Rizzoli International Publications. 1979: 58
- Keijzer (ed.), S., *François Valentijn's Oud en Nieuw Oost-Indiën en de VOC, derde deel* (Amsterdam: Wed. J.C. Van Kesteren & Zoon), 1862, hlm. 277-278.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa : silang budaya : kajian sejarah terpadu Jilid II*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1996.

- Lohanda, Mona. *The kapitan Cina of Batavia, 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society*. Jakarta: Djambatan. 1996: 287
- Leech, Roger., *Report on The Situation of Urban Archaeology in Europe*. Council of Europe Publishing. 1999:
- Michrob, Halwany. *Catatan Masa Lalu Banten*. Serang: Percetakan Saudara. 1993.
- Moerdjoko. *Alun-alun Ruang Publik Bersejarah dan Konservasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2005. Hal 100
- Moughtin, Cliff. *Urban design: street and square*. New York: Architectural Press. 2003.
- Nas, Peter. J.M dan Martien de Vletter (ed). *The past in the present: architecture in Indonesia*. Rotherdam: NAI Publisher. 2006: 71, 127.
- Nix, Thomas. *In Indonesië en de Stedebouwkundige Vormgeving: Een studie over de algemene vormgeving in de stedebouw en haar toepassing op de stedebouw in Indonesië*, Uitgevers: Nix, Bandoeng, and de Toorts, Heemstede. 1949.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Paulo P.A., ed. *Historical Archaeology, Back From the Edge*. London: Routledge. 1999:
- Paulus, J. *Encyclopedie van Nederland Indie*, Twee Druk, Martinus Nijhoff, S'Gravenhage, NV v/h E.J. Brill, Leiden. 1917. Hal: 33
- Pusponegoro, M.D., *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia, Jilid IV*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2008: 352.
- Pigeaud, Theodore G. Th. (1960-1963), *Java in the 14th century : a study in cultural history - the Nagara-Kertagama by Rakawi, Prapanca of Majapahit, 1365 A.D* Jilid III.
- Rahardjo, Supratikno. *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: C.V. Eka Dharma. 1998: 38.
- Rahardjo, Supratikno. *Peradaban Jawa : Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2002: 33

- Rahardjo, Supratikno. Kota-kota Prakolonial Indonesia : pertumbuhan dan keruntuhan. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. 2007.
- Renvrew, C., dan Bahn, P. *Archaeology The Key Concepts*. New York: Routledge. 2005: 77.
- Ricklefs. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Chicago: Stanford Univ Press. 2002: 194.
- Samudra, S.G.L. *Menimbang otonomi vs federal: Mengembangkan wacana federalisme dan otonomi luas menuju masyarakat madani Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Santoso, Jo. *Arsitektur-kota Jawa : Kosmos, Kultur & Kuasa*. Jakarta: Centropolis-Magister Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanegara. 2008.
- Santoso, Jo. *Menyiasati Kota Tanpa Warga*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. 2006.
- Shahab, Alwi. *Betawi Queen of the East*. Jakarta: Republika. 2004.
- Sharer, R.J. & Wendy A., *Fundamental of Archaeology*. California: The Benjamin/Cummings Publishing Co. 1979: 11
- Sharer, R.J. & Wendy A., *Archaeology: Discovering Our Past 3rd edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2003: 120-124.
- Soeparmo, Yanti. *Runtuhnya Menara Azan*. Jakarta: Mizan. 2009: 222
- Shirvani, Hamid. *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold. 1985.
- Soejono, R.P. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka. 1990: 286
- Soetandyo W. *Desentralisasi dalam tata pemerintahan kolonial Hindia-Belanda: kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia, 1900-1940*. Jakarta: Bayumedia.2004: 15—21, 68
- Sri Narni, *Keanekaragaman Pola Permukiman di Daerah Terjal Studi Kasus: Candi Semarang*. Thesis, pada program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. 1995:

- Sutherland, Heather. 1979. *The making of a bureaucratic elite: the colonial transformation of the Javanese Priyayi* (Singapore: Heinemann/Asian Studies Association of Australia, Southeast Asia Publications Series 2
- Tarr, Joel A., "Water and Wastes: A Retrospective Assessment of Wastewater Technology in the U. S., 1800-1932", *Technology and Culture*, 25 (April, 1984) 226-263, with J. McCurley F.C. McMichael, and T.F. Yosie.
- Untoro, Heriyanti Ongkodharma. *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten*. Jakarta: Yayasan Kota Kita. 2006.
- van Laanen, J. T. M. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987:
- van Niel, Robert. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1984: 51.
- Webb, Michael. *The city square: A historical evolution*. New York. Whitney Library of Design. 1990:
- Weber, Max. *The City*. London: Collier-McMillan Ltd. 1966: 66—67.
- Wertheim, W.F. "De Stad in Indonesië" dalam *Indonesië*, V. 1951-1952: 24-40.
- Wibawa, S. *Neues Steuerungsmodell : Belajar otonomi dari Jerman*. Jakarta : Kerjasama Institut Tafsir Wacana (ISTAWA) [dengan] Wacana. 2001: 234.
- Widodo, Sutejo K. *Ikan layang terbang menjulang : perkembangan pelabuhan Pekalongan menjadi pelabuhan perikanan 1900-1990*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005: 201-207.
- Yulianti, Dewi. "Industrialisasi di Semarang (1906-1930)" Kongres Nasional Sejarah 1996 sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III, Jakarta: Dep. P & K, 1997.
- Zein, Abdul Baqir. *Masjid-masjid bersejarah di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani. 1999: 261
- Zuhdi, Susanto. *Cilacap (1830-1842): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2002.